

TEORI AKUNTANSI

Paradigma Utama dan Isu Perkembangan Terkini

Oky Syahputra, S.Akun., M.Ak.
Debi Eka Putri, S.E., M.M.
Catur Ragil Sutrisno, S.E., M.Si., Ak.
Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Dr. Heni Purwantini, S.E., M.M.
Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak., CA.
Indriyani, S.E., M.Ak.
Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.
Kenny Ardillah, S.E., M.Ak., CFP., CSP., CSRS., CSRA., RSA.,
CRA., CPTT
Mohklas, S.E., M.Si.
Dr. Neni Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.
Anastasia Anggarkusuma A., M.Pd
Nurul Izzah Lubis, S.E., M.Ak.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

TEORI AKUNTANSI
Paradigma Utama dan Isu Perkembangan Terkini

Penulis : Oky Syahputra, S.Akun., M.Ak. | Debi Eka Putri, S.E., M.M. | Catur Ragil Sutrisno, S.E., M.Si., Ak. | Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Ak., CA. | Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak. | Dr. Heni Purwantini, S.E., M.M. | Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak., CA. | Indriyani, S.E., M.Ak. | Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si. | Kenny Ardillah, S.E., M.Ak., CFP., CSP., CSRS., CSRA., RSA., CRA., CPTT | Mohklas, S.E., M.Si. | Dr. Neni Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. | Anastasia Anggarkusuma A., M.Pd | Nurul Izzah Lubis, S.E., M.Ak.

Editor : Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.

Desain Sampul : Firman Isma'il

Tata Letak : Husnun Nur Afifah

ISBN :

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Teori Akuntansi.

Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip, asumsi, konsep, dan metodologi yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengarahkan praktik akuntansi. Teori ini berfungsi sebagai dasar ilmiah yang memberikan kerangka kerja dalam memahami bagaimana informasi keuangan dihasilkan, disajikan, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Teori akuntansi tidak hanya menjelaskan apa dan bagaimana transaksi dicatat, tetapi juga mengapa perlakuan akuntansi tertentu diterapkan. Pembahasan dalam buku ini meliputi filosofi teori akuntansi, konsep dasar teori akuntansi, perumusan teori akuntansi, perekayasaan pelaporan keuangan, standar-standar akuntansi, konsep dan karakteristik aset, konsep dan karakteristik kewajiban, konsep dan karakteristik ekuitas, konsep dan karakteristik pendapatan, konsep dan karakteristik beban dan biaya, konsep dan karakteristik laba, konsep dan karakteristik persediaan, teori akuntansi positif dan normatif dan tren dan isu terkini dalam teori akuntansi.

Pembahasan materi dalam buku ini telah disusun secara sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca. Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi praktisi, akademisi, terkhusus mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan Pengantar Akuntansi ataupun siapa saja yang ingin lebih memahami akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi keputakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga, April 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 FILOSOFI TEORI AKUNTANSI	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Filosofi dalam Akuntansi	1
C. Hubungan Filosofi dengan Teori Akuntansi.....	2
D. Pentingnya Filosofi dalam Pengembangan Akuntansi	3
E. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Filosofi Teori Akuntansi	4
F. Dasar Filosofis dalam Akuntansi	5
G. Perkembangan dan Evolusi Teori Akuntansi.....	9
H. Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	18
TENTANG PENULIS	20
BAB 2 KONSEP DASAR TEORI AKUNTANSI	21
A. Pendahuluan	21
B. Pendekatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi	23
C. Asumsi Dasar Akuntansi	26
D. Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	29
E. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi.....	32
F. Konsep Pengukuran dalam Akuntansi	34
G. Konsep Lain dalam Teori Akuntansi.....	36
H. Kesimpulan	38
DAFTAR PUSTAKA	39
TENTANG PENULIS	41
BAB 3 PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI	43
A. Pendahuluan	43
B. Identifikasi Masalah-Masalah Akuntansi dalam Praktik.....	44
C. Pendekatan dalam Perumusan Teori Akuntansi	46
D. Kesimpulan	56

	DAFTAR PUSTAKA	57
	TENTANG PENULIS	58
BAB 4	PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN.....	59
	A. Pendahuluan	59
	B. Definisi dan Konsep Perekayasaan Pelaporan Keuangan	60
	C. Proses Perekayasaan	62
	D. Aspek Semantik dalam Perekayasaan	64
	E. Struktur Akuntansi dalam Bentuk Diagram.....	69
	F. Motivasi dan Faktor Pendorong Perekayasaan Pelaporan Keuangan	73
	G. Teknik Perekayasaan Pelaporan Keuangan.....	76
	H. Penilaian dan Deteksi Perekayasaan Pelaporan Keuangan	78
	I. Upaya Pencegahan dan Pengendalian	81
	J. Prospek dan Tantangan Masa Depan	83
	K. Kesimpulan.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	TENTANG PENULIS	88
BAB 5	STANDAR - STANDAR AKUNTANSI	89
	A. Pendahuluan	89
	B. <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS)	90
	C. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.....	91
	D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	91
	E. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	93
	F. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)	94
	G. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS).....	96
	H. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	98
	I. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)	99
	J. Kesimpulan.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102
	TENTANG PENULIS	103

BAB 6	KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASET	105
	A. Pendahuluan	105
	B. Karakteristik Aset.....	107
	C. Pencatatan Aset	109
	D. Kesimpulan	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	TENTANG PENULIS	120
BAB 7	KONSEP DAN KARAKTERISTIK KEWAJIBAN.	121
	A. Pendahuluan	121
	B. Definisi Kewajiban, Karakteristik dan Konsep Kewajiban.....	122
	C. Konsep Kewajiban dalam Teori Akuntansi.....	124
	D. Klasifikasi Kewajiban.....	128
	E. Pengukuran Kewajiban dalam SAK dan IFRS	132
	F. Pengakuan Kewajiban dalam SAK dan IFRS	135
	G. Penyelesaian Kewajiban	137
	H. Kesimpulan	138
	DAFTAR PUSTAKA.....	140
	TENTANG PENULIS	141
BAB 8	KONSEP DAN KARAKTERISTIK EKUITAS	143
	A. Pendahuluan	143
	B. Konsep Ekuitas	144
	C. Komponen Ekuitas.....	145
	D. Karakteristik Ekuitas.....	148
	E. Pelaporan dan Pengungkapan Ekuitas	149
	F. Pelaporan dan Pengungkapan Ekuitas untuk Emiten atau Perusahaan Publik	150
	G. Kesimpulan	150
	DAFTAR PUSTAKA.....	153
	TENTANG PENULIS	154
BAB 9	KONSEP DAN KARAKTERISTIK PENDAPATAN .	155
	A. Pendahuluan	155
	B. Konsep Pendapatan	157
	C. Elemen-Elemen Pendapatan	160
	D. Klasifikasi Pendapatan	162
	E. Karakteristik Pendapatan.....	165

	F. Kesimpulan.....	174
	DAFTAR PUSTAKA	175
	TENTANG PENULIS	177
BAB 10	KONSEP DAN KARAKTERISTIK BEBAN DAN BIAYA	179
	A. Pendahuluan	179
	B. Biaya	179
	C. Beban	180
	D. Kriteria Pengakuan.....	181
	E. Relevansi dan Ketidakpastian Keberadaan	182
	F. Kemungkinan Rendahnya Arus Masuk atau Keluar Manfaat Ekonomi	182
	G. Basis Pengukuran	183
	H. Alokasi Beban.....	187
	I. Klasifikasi Beban.....	188
	J. Hubungan Biaya dan Beban.....	189
	K. Pembayaran, Biaya, dan Beban.....	190
	L. Kesimpulan.....	191
	DAFTAR PUSTAKA	193
	TENTANG PENULIS	194
BAB 11	KONSEP DAN KARAKTERISTIK LABA	195
	A. Pendahuluan	195
	B. Pengertian Laba	196
	C. Karakteristik Laba	197
	D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba	207
	E. Pentingnya Laba dalam Pengambilan Keputusan Bisnis	209
	F. Kesimpulan.....	211
	DAFTAR PUSTAKA	212
	TENTANG PENULIS	214
BAB 12	KONSEP DAN KARAKTERISTIK PERSEDIAAN....	217
	A. Pendahuluan	217
	B. Perlakuan Akuntansi Persediaan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.....	219
	C. Sistem Pencatatan Persediaan.....	222
	D. Manajemen Persediaan dalam Operasi Bisnis	223

	E. Pengendalian Internal Atas Persediaan	226
	F. Kesalahan dalam Perhitungan Persediaan	228
	G. Kesimpulan	230
	DAFTAR PUSTAKA.....	232
	TENTANG PENULIS	234
BAB 13	TEORI AKUNTANSI POSITIF DAN NORMATIF ...	235
	A. Pendahuluan	235
	B. Teori Akuntansi Normatif.....	236
	C. Teori Akuntansi Positif.....	238
	D. Perbedaan Teori Akuntansi Normatif dan Teori Akuntansi Positif	243
	E. Kesimpulan	244
	DAFTAR PUSTAKA.....	245
	TENTANG PENULIS	247
BAB 14	TREN DAN ISU TERKINI DALAM TEORI AKUNTANSI.....	249
	A. Pendahuluan	249
	B. Perkembangan Lingkungan Bisnis dan Implikasinya terhadap Teori Akuntansi	250
	C. Akuntansi Berkelanjutan dan ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>)	253
	D. Digitalisasi Akuntansi dan <i>Big Data</i>	257
	E. Perkembangan Standar Akuntansi Global	261
	F. Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Teori Akuntansi.....	263
	G. Kesimpulan	266
	DAFTAR PUSTAKA.....	268
	TENTANG PENULIS	271

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Asumsi Dasar Akuntansi	29
Tabel 3.1	Perbedaan Teori Akuntansi Positif dan Normatif	48
Tabel 7.1	Pengakuan Kewajiban menurut IFRS.....	134
Tabel 14.1	Pengaruh Teknologi Digital dalam Teori Akuntansi .	258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pendekatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi	24
Gambar 4.1	Struktur Akuntansi dalam Bentuk Diagram	72
Gambar 8.1	Rumus Ekuitas	144
Gambar 14.1	Integrasi ESG dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	255

BAB

1

FILOSOFI TEORI AKUNTANSI

Okky Syahputra, S.Akun., M.Ak.
Universitas Battuta

A. Pendahuluan

Filosofi teori akuntansi adalah area penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang mendasari penerapan akuntansi. Penggunaan akuntansi tidak sekadar berfungsi sebagai metode untuk mencatat transaksi finansial, namun juga sebagai suatu sistem informasi yang memiliki dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan etika. Penelitian mengenai filosofi teori akuntansi bertujuan untuk menggali dasar-dasar konseptual yang membangun norma-norma akuntansi serta bagaimana teorinya dapat diimplementasikan dalam membuat keputusan finansial. Dengan memahami filosofi teori akuntansi, akademisi dan praktisi dapat menilai ketepatan serta relevansi data yang disajikan dalam laporan finansial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam sektor bisnis.

B. Pengertian Filosofi dalam Akuntansi

Filosofi dalam akuntansi merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip mendasar yang membentuk sistem akuntansi. Menurut Scott (2015), filosofi akuntansi adalah kerangka pemikiran yang membahas bagaimana informasi keuangan dikumpulkan, diolah, dan disajikan berdasarkan konsep-konsep

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis. Filosofi akuntansi mencakup aspek ontologi, yaitu hakikat keberadaan informasi akuntansi, epistemologi yang membahas sumber serta validitas pengetahuan akuntansi, dan aksiologi yang menilai nilai serta etika dalam praktik akuntansi.

Belkaoui (2019) menambahkan bahwa filosofi akuntansi memiliki peran penting dalam membangun kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk mengembangkan standar akuntansi yang lebih objektif dan transparan. Hal ini memungkinkan akuntansi untuk berkembang tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan keuangan.

Menurut Deegan (2020), filosofi akuntansi juga membantu dalam memahami bagaimana standar dan prinsip akuntansi berevolusi sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Misalnya, pendekatan akuntansi berbasis nilai wajar semakin berkembang karena kebutuhan akan informasi yang lebih relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman filosofi akuntansi sangat penting bagi akademisi, regulator, dan praktisi dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam sistem akuntansi modern.

C. Hubungan Filosofi dengan Teori Akuntansi

Filosofi akuntansi memiliki hubungan erat dengan teori akuntansi, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun dasar-dasar konseptual praktik akuntansi. Filosofi akuntansi berperan dalam memberikan landasan pemikiran terhadap teori akuntansi, sehingga standar dan prinsip akuntansi dapat dikembangkan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dan tujuan akuntansi itu sendiri (Scott, 2015). Menurut Hendriksen dan Van Breda (2018), filosofi akuntansi membentuk fondasi bagi teori akuntansi dengan mengeksplorasi aspek epistemologis dan ontologis dari informasi keuangan. Teori akuntansi yang kuat harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang

mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan etika dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini membantu dalam menciptakan sistem akuntansi yang tidak hanya objektif tetapi juga relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Deegan (2020) menekankan bahwa filosofi akuntansi membantu menjelaskan mengapa berbagai teori akuntansi berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungan bisnis. Misalnya, teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (2016) didasarkan pada prinsip bahwa praktik akuntansi harus dijelaskan berdasarkan pengamatan empiris terhadap perilaku pelaku bisnis dan regulator. Di sisi lain, teori normatif lebih menitikberatkan pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ideal yang didukung oleh filsafat moral dan etika.

Gaffikin (2017) juga menambahkan bahwa hubungan antara filosofi dan teori akuntansi semakin penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan transparansi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang filosofi akuntansi, teori akuntansi dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan dunia bisnis modern.

D. Pentingnya Filosofi dalam Pengembangan Akuntansi

Filosofi memainkan peran penting dalam pengembangan akuntansi karena memberikan dasar konseptual yang kuat bagi teori dan praktik akuntansi. Filosofi akuntansi membantu menentukan prinsip-prinsip yang mendasari standar akuntansi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan relevan (Scott, 2015). Dengan memahami filosofi akuntansi, para akuntan dan pembuat kebijakan dapat merumuskan standar yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan masyarakat. Belkaoui (2019) menjelaskan bahwa filosofi akuntansi juga berperan dalam menciptakan keadilan dalam pelaporan keuangan. Melalui pendekatan etika dan nilai-nilai moral, filosofi akuntansi memastikan bahwa laporan keuangan

tidak hanya digunakan untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ini sangat penting dalam mencegah praktik manipulasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Menurut Deegan (2020), filosofi akuntansi membantu dalam memahami bagaimana sistem akuntansi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, seperti globalisasi dan digitalisasi. Dengan filosofi yang kuat, teori akuntansi dapat berkembang untuk menjawab tantangan modern, seperti pelaporan keuangan berbasis teknologi dan standar keberlanjutan dalam akuntansi. Gaffikin (2017) menambahkan bahwa filosofi akuntansi juga memungkinkan para akademisi dan praktisi untuk mengevaluasi kembali asumsi-asumsi yang mendasari standar akuntansi saat ini. Ini membuka peluang bagi inovasi dalam akuntansi, termasuk pengembangan metode baru dalam pengukuran dan pelaporan keuangan yang lebih relevan di era modern.

E. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Filosofi Teori Akuntansi

Mempelajari filosofi teori akuntansi memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang penting bagi perkembangan ilmu akuntansi dan praktik bisnis. Salah satu tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar konseptual akuntansi, sehingga para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan standar yang lebih objektif dan relevan (Scott, 2015). Menurut Belkaoui (2019), filosofi akuntansi membantu dalam mengidentifikasi serta mengevaluasi asumsi-asumsi yang mendasari praktik akuntansi. Dengan demikian, para akuntan dapat memahami bagaimana standar akuntansi dikembangkan dan mengapa suatu metode akuntansi lebih disukai dalam konteks tertentu. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Deegan (2020) menambahkan bahwa memahami filosofi teori akuntansi memungkinkan pengembangan sistem akuntansi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan

bisnis dan teknologi. Filosofi akuntansi juga membantu dalam merancang kebijakan yang lebih etis dan berkelanjutan, yang dapat mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Gaffikin (2017) menjelaskan bahwa filosofi akuntansi tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan regulator, tetapi juga bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Dengan memahami dasar filosofis dari berbagai teori akuntansi, perusahaan dapat mengimplementasikan sistem akuntansi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global.

F. Dasar Filosofis dalam Akuntansi

1. Ontologi Akuntansi (Hakikat dan Realitas dalam Akuntansi)

Ontologi akuntansi membahas tentang hakikat dan realitas dalam akuntansi, termasuk bagaimana informasi akuntansi mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Menurut Watts dan Zimmerman (2010), realitas akuntansi dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama: pendekatan normatif dan positif. Pendekatan normatif lebih menekankan pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, sedangkan pendekatan positif mencoba menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi berdasarkan data empiris.

Chambers (2011) menekankan bahwa akuntansi harus berlandaskan prinsip realisme, di mana laporan keuangan harus mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Sementara itu, Ijiri (2013) mengajukan konsep akuntansi berbasis pertanggungjawaban (*accountability-based accounting*), yang menekankan bahwa akuntansi harus mampu mencerminkan tanggung jawab manajemen terhadap pemangku kepentingan. Dalam perspektif ontologi kritis, Tinker (2014) menyatakan bahwa akuntansi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, akuntansi tidak bisa dianggap sebagai suatu ilmu yang netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang membentuk praktiknya.

Secara keseluruhan, ontologi akuntansi mencerminkan hubungan antara konsep, realitas ekonomi, dan pengguna informasi akuntansi. Teori akuntansi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan regulasi yang ada, sehingga pemahaman terhadap hakikat dan realitas dalam akuntansi menjadi semakin penting.

2. Epistemologi Akuntansi (Sumber dan Validitas Pengetahuan Akuntansi)

Epistemologi akuntansi berfokus pada sumber dan validitas pengetahuan dalam akuntansi, termasuk bagaimana informasi akuntansi dihasilkan dan divalidasi. Menurut Scott (2015), pengetahuan akuntansi diperoleh melalui penelitian empiris, teori normatif, serta praktik profesional yang berkembang seiring waktu. Sementara itu, Deegan (2016) menekankan bahwa validitas pengetahuan akuntansi bergantung pada metode ilmiah yang digunakan dalam pengujian konsep dan praktik akuntansi. Godfrey *et al.* (2017) menyatakan bahwa epistemologi akuntansi mencerminkan hubungan antara teori dan praktik, di mana standar akuntansi didasarkan pada temuan akademis serta kebutuhan praktis dari dunia bisnis. Menurut Gaffikin (2018), ada dua pendekatan utama dalam epistemologi akuntansi: pendekatan positivis yang berfokus pada pengamatan empiris dan pendekatan interpretatif yang melihat akuntansi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi.

Watts dan Zimmerman (2016) menambahkan bahwa teori akuntansi harus diuji melalui pendekatan ilmiah yang ketat agar dapat menghasilkan informasi yang andal dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, epistemologi akuntansi berperan penting dalam memastikan bahwa pengetahuan akuntansi tidak hanya

bersifat deskriptif tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.

3. Aksiologi Akuntansi (Nilai dan Etika dalam Akuntansi)

Aksiologi akuntansi membahas tentang nilai dan etika yang menjadi dasar dalam praktik akuntansi. Akuntansi bukan hanya sekadar pencatatan transaksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan etika dalam memberikan informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipercaya. Menurut Deegan (2016), nilai dalam akuntansi berhubungan dengan manfaat informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Scott (2015) menekankan bahwa etika dalam akuntansi sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan, seperti praktik *earnings management*, dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, standar etika seperti yang ditetapkan dalam *Code of Ethics for Professional Accountants* oleh IFAC (International Federation of Accountants) harus dijunjung tinggi.

Godfrey *et al.* (2017) menyatakan bahwa aksiologi akuntansi juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan dalam melaporkan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern, di mana perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Gaffikin (2018) menyoroti bahwa akuntansi memiliki peran dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bias dan dapat digunakan secara adil oleh semua pihak. Oleh karena itu, regulasi dan standar akuntansi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan.

Watts dan Zimmerman (2010) menambahkan bahwa aksiologi akuntansi juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan secara objektif, sementara akuntabilitas memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Secara keseluruhan, aksiologi akuntansi menekankan pentingnya nilai dan etika dalam praktik akuntansi. Tanpa etika yang kuat, informasi akuntansi dapat disalahgunakan dan mengarah pada krisis kepercayaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang nilai dan etika dalam akuntansi sangat diperlukan bagi para profesional di bidang ini.

4. Perdebatan Filosofis dalam Akuntansi

Akuntansi sebagai ilmu dan praktik mengalami berbagai perdebatan filosofis yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Salah satu perdebatan utama adalah antara pendekatan normatif dan positif dalam akuntansi. Watts dan Zimmerman (2010) menekankan bahwa teori akuntansi positif berfokus pada bagaimana praktik akuntansi berkembang secara empiris, sedangkan teori normatif menekankan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ideal.

Menurut Deegan (2016), perdebatan lain muncul antara pendekatan objektivis dan konstruktivis dalam akuntansi. Pendekatan objektivis berargumen bahwa informasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi yang objektif, sedangkan pendekatan konstruktivis menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan budaya. Scott (2015) menyoroti perbedaan antara akuntansi berbasis biaya historis dan akuntansi nilai wajar. Pendukung biaya historis berpendapat bahwa metode ini lebih andal karena berbasis pada transaksi yang sudah terjadi, sedangkan akuntansi nilai wajar dianggap lebih relevan

karena mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, meskipun memiliki tingkat subjektivitas yang lebih tinggi.

Godfrey *et al.* (2017) menambahkan bahwa perdebatan juga terjadi dalam konteks regulasi akuntansi, yaitu antara pendekatan prinsip (*principles-based*) dan pendekatan aturan (*rules-based*). Pendekatan berbasis prinsip memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi, sementara pendekatan berbasis aturan lebih ketat dan mengurangi kemungkinan manipulasi, tetapi terkadang tidak dapat mengakomodasi berbagai situasi bisnis yang kompleks. Dalam perspektif kritis, Tinker (2014) berpendapat bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat netral untuk pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu dalam ekonomi global. Oleh karena itu, beberapa akademisi menyerukan perlunya pendekatan akuntansi yang lebih transparan dan berorientasi pada keadilan sosial.

Secara keseluruhan, perdebatan filosofis dalam akuntansi mencerminkan kompleksitas ilmu ini dalam menjembatani antara realitas ekonomi, praktik bisnis, serta nilai dan etika yang berlaku di masyarakat. Pemahaman terhadap berbagai perspektif ini penting bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi yang lebih baik di masa depan.

G. Perkembangan dan Evolusi Teori Akuntansi

1. Sejarah Perkembangan Teori Akuntansi

Perkembangan teori akuntansi tidak terlepas dari evolusi kebutuhan bisnis dan ekonomi yang terus berubah. Akuntansi telah mengalami perubahan besar sejak awal kemunculannya di zaman kuno hingga menjadi sistem yang kompleks seperti saat ini. Pada abad ke-15, sistem pencatatan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli menjadi tonggak penting dalam perkembangan akuntansi modern. Sistem ini memberikan dasar bagi pencatatan yang lebih akurat dan transparan dalam transaksi bisnis.

Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori akuntansi berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis. Pada masa ini, konsep biaya historis mulai diterapkan secara luas, di mana aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Pada pertengahan abad ke-20, berkembang berbagai teori akuntansi seperti teori akuntansi normatif dan positif. Watts dan Zimmerman (2010) memperkenalkan teori akuntansi positif yang berfokus pada bagaimana praktik akuntansi berkembang secara empiris berdasarkan perilaku manajerial dan ekonomi. Di sisi lain, teori normatif lebih menekankan pada bagaimana standar akuntansi seharusnya dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ideal.

Dalam dekade terakhir, muncul perdebatan mengenai relevansi antara akuntansi berbasis biaya historis dan akuntansi nilai wajar. Menurut Deegan (2016), akuntansi nilai wajar semakin populer karena dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan biaya historis, meskipun lebih rentan terhadap subjektivitas dan volatilitas pasar. Evolusi akuntansi juga dipengaruhi oleh perkembangan standar internasional, seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) dan US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Standar ini dibuat untuk menyelaraskan praktik akuntansi di berbagai negara, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap laporan keuangan.

Dalam konteks regulasi, muncul perdebatan antara pendekatan prinsip (*principles-based*) dan aturan (*rules-based*). Scott (2015) menjelaskan bahwa pendekatan *principles-based* lebih fleksibel dalam penerapan standar, sementara *rules-based* memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, tetapi sering kali dianggap terlalu kaku dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern. Secara keseluruhan, perkembangan teori akuntansi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan bisnis, teknologi, dan

kebutuhan akan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pemahaman terhadap sejarah dan evolusi teori akuntansi sangat penting bagi akademisi dan praktisi untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan dapat memenuhi tuntutan ekonomi yang dinamis.

2. Paradigma dalam Akuntansi: Klasik vs Modern

Dalam perkembangan teori akuntansi, terdapat perbedaan mendasar antara paradigma klasik dan modern. Paradigma klasik dalam akuntansi lebih berfokus pada aspek pencatatan dan pengukuran yang bersifat historis, sementara paradigma modern mengarah pada pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada relevansi informasi keuangan bagi pengambilan keputusan.

a. Paradigma Klasik dalam Akuntansi

Paradigma klasik dalam akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip konservatif yang menekankan objektivitas dan keandalan informasi keuangan. Konsep utama dalam paradigma ini adalah:

- 1) Biaya Historis. Biaya historis merupakan dasar utama dalam pencatatan transaksi. Pendekatan ini dianggap lebih objektif karena berdasarkan pada harga perolehan yang telah terjadi (Hendriksen & Van Breda, 2012)
- 2) Konservatisme. Prinsip ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan pencatatan beban, sebagaimana dijelaskan oleh Scott (2015).
- 3) Stabilitas Unit Moneter. Paradigma klasik mengasumsikan bahwa nilai uang tetap stabil sepanjang waktu, meskipun dalam praktiknya inflasi dan deflasi dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan (Godfrey *et al.*, 2017).

Kelebihan paradigma klasik adalah memberikan kepastian dan konsistensi dalam pencatatan transaksi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya relevansi

informasi keuangan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

b. Paradigma Modern dalam Akuntansi

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, paradigma modern dalam akuntansi mulai berkembang. Paradigma ini lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna informasi keuangan dan fleksibilitas dalam pelaporan. Beberapa karakteristik utama dari paradigma modern adalah:

- 1) Akuntansi Berbasis Nilai Wajar. Menurut Deegan (2016), pendekatan ini lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan biaya historis. Nilai wajar memungkinkan aset dan kewajiban untuk dinilai berdasarkan harga pasar terkini.
- 2) Pendekatan *Principles-Based*. IFRS lebih mengedepankan pendekatan berbasis prinsip dibandingkan pendekatan berbasis aturan yang diterapkan dalam US GAAP (Scott, 2015). Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi.
- 3) Akuntansi Keberlanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya pelaporan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Godfrey *et al.* (2017).

Paradigma modern lebih relevan dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Namun, tantangan utama dalam pendekatan ini adalah tingkat subjektivitas yang lebih tinggi dalam penentuan nilai wajar dan perlunya standar akuntansi yang lebih dinamis.

Perkembangan dan evolusi teori akuntansi telah mengalami perubahan signifikan dari paradigma klasik yang berbasis pada biaya historis dan konservatisme menuju paradigma modern yang lebih fleksibel dan berorientasi pada relevansi informasi. Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, standar akuntansi internasional terus berkembang

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Pemahaman terhadap sejarah dan perubahan paradigma dalam akuntansi sangat penting bagi akademisi dan praktisi agar dapat mengadaptasi sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, teori akuntansi akan terus mengalami perubahan untuk menjawab tantangan baru dalam dunia bisnis dan keuangan.

3. Pengaruh Ekonomi, Sosial, dan Politik terhadap Teori Akuntansi

Teori akuntansi tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik yang terus berubah. Faktor-faktor ini mempengaruhi cara standar akuntansi dikembangkan, diterapkan, dan diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan.

a. Pengaruh Ekonomi

Perubahan dalam kondisi ekonomi global mempengaruhi teori dan praktik akuntansi. Misalnya, krisis keuangan tahun 2008 mendorong regulator untuk memperketat aturan terkait transparansi keuangan. Hal ini juga memunculkan perdebatan mengenai relevansi penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan (Ball, 2020).

b. Pengaruh Sosial

Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan. Akuntansi keberlanjutan dan pelaporan sosial telah berkembang sebagai respons terhadap tekanan publik untuk mempertanggung jawabkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis (Gaffikin, 2018).

c. Pengaruh Politik

Regulasi akuntansi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Standar akuntansi yang diterapkan di suatu negara dapat berbeda tergantung pada kebijakan pemerintah dan kepentingan pemangku kepentingan.

Misalnya, penerapan IFRS di berbagai negara sering kali mengalami hambatan karena adanya perbedaan kebijakan domestik (Nobes & Parker, 2019).

Perkembangan teori akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paradigma klasik dan modern, serta dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Dengan semakin kompleksnya lingkungan bisnis, teori akuntansi akan terus berevolusi untuk menjawab tantangan baru dalam dunia keuangan dan pelaporan perusahaan.

4. Peran Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Akuntansi

Akuntansi sering kali dianggap sebagai disiplin ilmu yang bersifat kuantitatif dan objektif, berfokus pada angka dan laporan keuangan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ilmu sosial dan humaniora mulai memainkan peran penting dalam pengembangan teori akuntansi. Ilmu sosial dan humaniora membantu memahami dimensi sosial, budaya, dan etika dalam praktik akuntansi, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fungsi dan dampak akuntansi dalam masyarakat.

a. Akuntansi sebagai Praktik Sosial

Akuntansi tidak hanya sekadar teknik pencatatan transaksi, tetapi juga praktik sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Menurut Burchell *et al.* (2014), akuntansi adalah konstruksi sosial yang merefleksikan nilai-nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Misalnya, standar akuntansi yang diterapkan dalam suatu negara sering kali dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya. Selain itu, teori akuntansi kritis menyoroti bagaimana praktik akuntansi dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol dalam organisasi dan masyarakat. Tinker (2014) berpendapat bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai alat hegemonik yang memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam perekonomian global.

b. Etika dan Moralitas dalam Akuntansi

Ilmu humaniora, khususnya filsafat dan etika, berkontribusi dalam membangun fondasi etis dalam akuntansi. Prinsip etika seperti transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas sangat penting dalam profesi akuntansi. Menurut Gray *et al.* (2016), tanpa landasan etika yang kuat, akuntansi dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, seperti manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom. Penerapan etika dalam akuntansi juga berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Perusahaan semakin didorong untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan mereka melalui pelaporan keberlanjutan, yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam praktik bisnis.

c. Akuntansi dan Teori Organisasi

Ilmu sosial, khususnya teori organisasi, membantu memahami bagaimana akuntansi digunakan dalam pengelolaan organisasi. Hopwood (2015) menyatakan bahwa akuntansi bukan hanya sistem pencatatan, tetapi juga alat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku organisasi. Pendekatan ini dapat dilihat dalam konsep management accounting, di mana informasi akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Misalnya, teori agensi menjelaskan bagaimana hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dapat dipengaruhi oleh informasi akuntansi, di mana konflik kepentingan dapat muncul jika informasi tidak diungkapkan secara transparan.

d. Dampak Sosial dari Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak hanya berdampak pada investor dan manajer, tetapi juga pada masyarakat luas. Ilmu sosial membantu memahami bagaimana laporan keuangan mempengaruhi berbagai pemangku

kepentingan, termasuk karyawan, komunitas lokal, dan regulator. Bourdieu (2017) mengembangkan konsep modal sosial yang dapat diterapkan dalam konteks akuntansi. Modal sosial mencakup jaringan hubungan yang dimiliki individu atau organisasi yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan politik. Dalam konteks akuntansi, transparansi laporan keuangan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan legitimasi organisasi di mata publik.

e. Akuntansi dan Politik

Akuntansi juga memiliki hubungan erat dengan sistem politik. Kebijakan akuntansi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kebijakan pemerintah. Nobes dan Parker (2019) menunjukkan bahwa standar akuntansi internasional, seperti IFRS, sering kali diperdebatkan di tingkat politik karena implikasinya terhadap kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, akuntansi memainkan peran dalam transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Audit laporan keuangan pemerintah menjadi alat penting dalam memastikan bahwa dana publik dikelola secara efektif dan tidak disalahgunakan.

Perkembangan teori akuntansi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ilmu sosial dan humaniora. Akuntansi bukan hanya disiplin teknis yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga praktik sosial yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dengan memahami peran ilmu sosial dan humaniora dalam akuntansi, kita dapat mengembangkan sistem akuntansi yang lebih transparan, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

H. Kesimpulan

Filosofi dalam akuntansi berperan sebagai landasan konseptual yang membentuk cara pandang terhadap pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan.

Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filosofi akuntansi membantu menjelaskan hakikat informasi akuntansi, validitas pengetahuan yang digunakan, serta nilai-nilai dan etika yang mendasari praktiknya. Dengan demikian, filosofi ini tidak hanya mempengaruhi praktik teknis akuntansi, tetapi juga membentuk kerangka etis dan intelektual yang relevan dalam pengambilan keputusan keuangan dan penyusunan standar akuntansi yang transparan dan bertanggung jawab.

Filosofi akuntansi dan teori akuntansi memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Filosofi memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pengembangan teori-teori akuntansi, baik normatif maupun positif, serta menjelaskan bagaimana teori-teori ini berevolusi seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan pemahaman filosofi yang mendalam, teori akuntansi dapat menjawab tantangan global dan menyediakan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan di era bisnis modern.

Pentingnya mempelajari filosofi akuntansi terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar dan asumsi yang mendasari praktik akuntansi. Hal ini mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan transparansi, serta mendukung keberlanjutan sistem akuntansi. Melalui pemahaman aspek ontologis, seperti realitas ekonomi yang ingin dicerminkan oleh laporan keuangan, dan pengakuan bahwa akuntansi merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik, filosofi akuntansi membantu profesi ini tetap adaptif, etis, dan relevan dalam menghadapi dinamika bisnis global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, R. (2020). *The Economics of Accounting Policy Choice*. Cambridge University Press.
- Belkaoui, A. R. (2019). *Accounting Theory*. Cengage Learning.
- Bourdieu, P. (2017). *The Forms of Capital*. Polity Press.
- Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A. G., Hughes, J., & Nahapiet, J. (2014). *Accounting in Its Social Context: Towards a History of Value Added in the United Kingdom*. Routledge.
- Chambers, R. J. (2011). *An Accounting Revolution*. Routledge.
- Deegan, C. (2020). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Education.
- Gaffikin, M. (2018). *Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice*. Routledge.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2017). *Accounting Theory*. Wiley.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2016). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment*. Pearson.
- Hendriksen, E. S., & Van Breda, M. (2018). *Accounting Theory*. Richard D. Irwin, Inc.
- Hopwood, A. G. (2015). *Accounting and Human Behaviour*. Butterworth-Heinemann.
- Ijiri, Y. (2013). *Theory of Accounting Measurement*. American Accounting Association.
- MayFriscia, S., Syahputra, O., & Aristantya, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan PT. Deli Jaya Samudera*.
- Nobes, C., & Parker, R. (2019). *Comparative International Accounting*. Pearson.

- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Pearson.
- Tinker, T. (2014). *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. Praeger.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (2016). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.

TENTANG PENULIS



Oky Syahputra, S.Akun., M.Ak.
Universitas Battuta

Penulis lahir di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 08 November 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Battuta. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi di masing-masing Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya pada tahun 2016 dan Universitas Prima Indonesia pada tahun 2021. Penulis sudah dua kali memenangi hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2024 (DRTPM DITJEN DIKTIRISTEK) Skema Penelitian Dosen Pemula. Penulis saat ini menekuni bidang kemahasiswaan di Universitas Battuta, dan juga memiliki motivasi untuk terus membuat karya ilmiah, terutama dibidang Akuntansi. Buku ini merupakan karya ketiga penulis, dan berharap karya ini menjadi motivasi untuk penulisan karya ilmiah lainnya.

BAB 2

KONSEP DASAR TEORI AKUNTANSI

Debi Eka Putri, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulan Agung

A. Pendahuluan

Dalam dunia yang dipenuhi oleh dinamika bisnis dan perkembangan regulasi, teori akuntansi memegang peran penting sebagai fondasi dari praktik akuntansi yang dijalankan sehari-hari. Ia tidak hanya sekadar kumpulan prinsip atau konsep abstrak, melainkan sebuah sistem berpikir yang membantu memahami, menjelaskan, dan bahkan memprediksi perilaku pelaporan keuangan dalam berbagai konteks organisasi. Menurut Belkaoui (2004), teori akuntansi juga menjadi alat bantu dalam menganalisis relevansi, keandalan, dan kebermanfaatan informasi keuangan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, manajemen, dan regulator.

Tanpa adanya pemahaman yang kuat mengenai teori akuntansi, seseorang hanya akan memahami akuntansi secara teknis dan prosedural, tanpa mampu menangkap alasan mendasar dari setiap keputusan akuntansi (Martini *et al.*, 2023). Hal ini berisiko menimbulkan praktik yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial.

1. Urgensi dan Tujuan Memahami Teori Akuntansi

Pemahaman terhadap teori akuntansi menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis modern, termasuk keberadaan entitas

multinasional, inovasi keuangan, dan tuntutan transparansi publik. Mengutip Scott (2015), teori akuntansi hadir untuk memberikan arah dan pijakan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, baik dalam konteks pengambilan keputusan, penetapan kebijakan akuntansi, maupun dalam perumusan standar pelaporan keuangan.

Afriyenti dan Misra (2019) menegaskan bahwa, di lingkungan akademik, teori akuntansi menjadi basis dalam pengembangan kurikulum dan riset-riset akuntansi. Sementara di lingkungan profesional, teori berfungsi sebagai acuan dalam menyikapi berbagai isu praktis yang kerap tidak memiliki jawaban tunggal. Misalnya, dalam menghadapi pengakuan pendapatan pada transaksi digital, pemahaman teori sangat dibutuhkan agar praktisi tidak hanya berpegang pada standar, tetapi juga pada landasan konseptual yang mendasarinya.

2. Kaitan Teori Akuntansi dengan Praktik

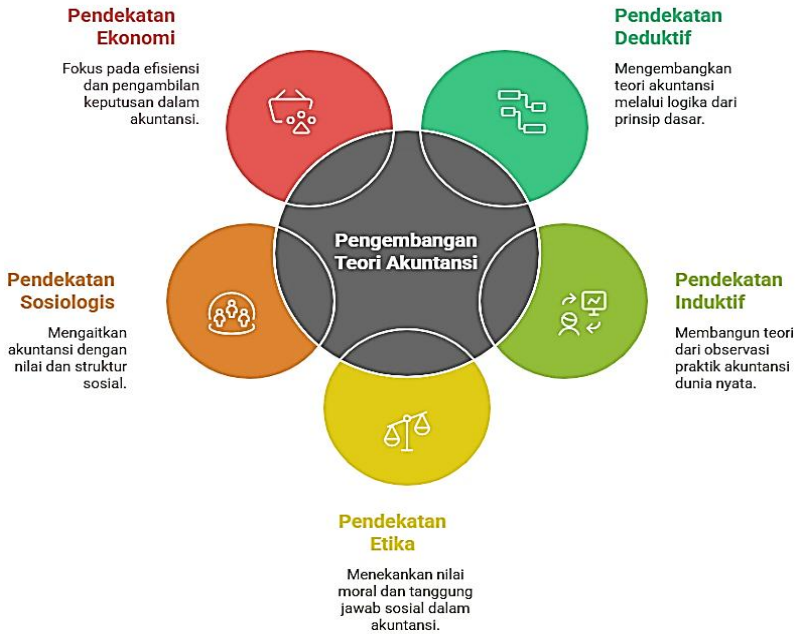
Hubungan antara teori dan praktik akuntansi bersifat timbal balik. Uraian dari Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa teori memberikan kerangka konseptual yang mendasari keputusan-keputusan akuntansi, sedangkan praktik menyediakan data empirik untuk menguji dan mengembangkan teori. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan menjadi pemicu lahirnya teori-teori baru atau penyesuaian terhadap teori yang sudah ada.

Sebagai contoh, tantangan dalam mengukur aset tidak berwujud atau dalam menyajikan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) telah mendorong para akuntan dan akademisi untuk memikirkan kembali pendekatan akuntansi konvensional. Teori-teori seperti teori legitimasi atau teori pemangku kepentingan kemudian hadir untuk memberikan penjelasan atas fenomena tersebut dan menawarkan cara pandang baru dalam pelaporan keuangan (Indriani, Ramadhani and Astuti, 2020).

Menurut Mardiasmo (2009), praktik akuntansi juga tidak terlepas dari pengaruh konteks sosial, budaya, dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori akuntansi yang mempertimbangkan kearifan lokal menjadi penting agar praktik yang dijalankan tidak hanya legal, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

B. Pendekatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi

Teori akuntansi tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pendekatan ilmiah. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan beragam perspektif dalam melihat fungsi dan tujuan akuntansi, serta menjelaskan bagaimana teori dikonstruksi agar dapat menjawab kebutuhan informasi keuangan yang terus berkembang. Pendekatan dalam pengembangan teori akuntansi memberikan kerangka yang berguna bagi akademisi dan praktisi untuk memahami latar belakang, relevansi, serta arah dari teori yang digunakan dalam praktik sehari-hari.



Gambar 2.1 Pendekatan dalam Pengembangan Teori Akuntansi
Sumber: diolah penulis (2025)

Uraian pendekatan dalam pengembangan teori akuntansi sebagai berikut:

1. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif dimulai dari prinsip atau asumsi dasar yang dianggap benar, lalu diturunkan menjadi teori dan aplikasi dalam praktik akuntansi. Pendekatan ini logis dan sistematis karena membangun teori dari kerangka berpikir umum ke kasus-kasus khusus. Menurut Belkaoui (2004), biasanya digunakan dalam pengembangan teori normatif yang menekankan bagaimana akuntansi *seharusnya* dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ideal. Namun, pendekatan ini bisa menghadapi tantangan jika teori yang dibangun tidak diuji dalam realitas atau praktik nyata.

2. Pendekatan Induktif

Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Menurut Deegan (2014), ini dimulai dari observasi terhadap praktik-praktik akuntansi yang ada di lapangan.

Dari pola-pola umum yang ditemukan, kemudian disusun teori atau prinsip yang bersifat lebih general. Pendekatan ini lebih cocok digunakan dalam pengembangan teori positif, yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik akuntansi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Karena berbasis data empiris, pendekatan ini cenderung lebih relevan dengan kondisi aktual, tetapi bisa menjadi kurang ideal jika praktik yang diamati terlalu sempit atau bersifat sementara.

3. Pendekatan Etika

Dalam pendekatan ini, akuntansi dipandang sebagai kegiatan yang tidak netral secara nilai. Artinya, sebagaimana dijelaskan Belkaoui (2004), penyusunan teori akuntansi harus mempertimbangkan nilai moral, keadilan, dan kepentingan publik. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berguna untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga harus bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan etika relevan dalam konteks akuntansi sosial, pelaporan keberlanjutan, dan akuntabilitas sektor publik. Banyak pemikir menyatakan bahwa akuntansi sebaiknya tidak bebas nilai karena dampaknya menyangkut banyak pihak, terutama masyarakat luas.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menempatkan akuntansi sebagai bagian dari sistem sosial. Akuntansi dilihat tidak hanya sebagai sistem informasi keuangan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat. Andika dan Olli (2023) menegaskan bahwa praktik akuntansi dapat digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan atau sebaliknya, menjadi alat perubahan sosial. Pendekatan ini memandang bahwa teori akuntansi harus mempertimbangkan faktor budaya, norma sosial, dan dinamika kelompok sosial dalam masyarakat.

5. Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi menjadi salah satu pendekatan dominan dalam pengembangan teori akuntansi, terutama yang terkait dengan efisiensi informasi dan pengambilan

keputusan ekonomi. Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa informasi akuntansi diposisikan sebagai alat yang membantu pihak-pihak seperti investor dan manajer dalam mengambil keputusan rasional. Teori keagenan dan teori biaya transaksi adalah contoh konkret yang berkembang dari pendekatan ini. Pendekatan ekonomi menekankan bahwa teori akuntansi sebaiknya mampu menjelaskan bagaimana informasi memengaruhi perilaku dan keputusan dalam pasar.

6. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis berfokus pada bagaimana pengguna laporan keuangan memahami, menilai, dan merespons informasi akuntansi. Pendekatan ini memperhatikan aspek kognitif dan emosional individu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi bukan hanya data objektif, tetapi juga sesuatu yang ditafsirkan dan dipengaruhi oleh persepsi, bias, dan pengalaman pengguna (Sunaryo, Dadang and Erdawati, 2021). Oleh karena itu, teori yang dikembangkan dari pendekatan ini cenderung mempertimbangkan bagaimana pengguna benar-benar memproses informasi, bukan hanya bagaimana informasi seharusnya dipresentasikan.

C. Asumsi Dasar Akuntansi

Di balik sistem akuntansi yang tampak formal dan sistematis, sesungguhnya terdapat dasar-dasar pemikiran yang sangat mendasar dan menjadi pondasi dalam setiap proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Dasar pemikiran ini dikenal sebagai asumsi dasar akuntansi. Asumsi ini bukan sekadar teori, melainkan “kerangka logika” yang telah disepakati secara luas dan diandalkan agar laporan keuangan bisa disusun secara konsisten dan dapat digunakan oleh berbagai pihak (Kirowati and Amir, 2019).

Bayangkan saja jika sebuah perusahaan menyusun laporan keuangan tanpa menggunakan asumsi dasar tertentu. Bisa jadi satu perusahaan mencatat pendapatan saat menerima

kas, sementara yang lain saat barang dikirim. Atau, perusahaan A mencampur keuangannya dengan milik pribadi pemiliknya, sedangkan perusahaan B memisahkannya. Tanpa kerangka dasar ini, laporan keuangan akan sulit dibandingkan dan bisa sangat menyesatkan. Menurut Deegan (2014), asumsi dasar adalah elemen-elemen yang membuat teori akuntansi tetap relevan, dapat diterapkan, dan memiliki daya guna dalam dunia nyata. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa pemahaman terhadap asumsi dasar penting bukan hanya bagi praktisi akuntansi, tetapi juga bagi para akademisi dan mahasiswa agar bisa memahami esensi akuntansi sebagai sistem informasi yang andal.

Empat asumsi dasar utama yang berlaku secara luas dalam akuntansi modern di antaranya:

1. Asumsi Akrual (*Accrual Basis*)

Asumsi akrual menyatakan bahwa transaksi keuangan dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui ketika diperoleh (*earned*), dan beban diakui saat menjadi kewajiban (*incurred*), bukan ketika uang berpindah tangan. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan jasa menyelesaikan proyek pada tanggal 25 Desember, tetapi pembayaran baru diterima tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Berdasarkan asumsi akrual, pendapatan tersebut tetap dicatat pada Desember, karena jasa sudah diberikan.

Menurut Kieso *et al.* (2020), pendekatan ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kinerja dan posisi keuangan yang sebenarnya dalam satu periode akuntansi. Tanpa akrual, perusahaan bisa tampak “sehat secara keuangan” hanya karena arus kas besar, padahal sebenarnya memiliki beban dan kewajiban yang besar juga.

2. Asumsi Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Asumsi *going concern* menyatakan bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang dan tidak ada rencana untuk dilikuidasi. Ini penting karena memengaruhi cara aset dinilai dan beban diakui. Contoh ilustrasi, jika sebuah perusahaan diperkirakan akan bangkrut dalam waktu dekat,

maka nilai gedung dan peralatan tidak lagi dinilai berdasarkan nilai bukunya, melainkan berdasarkan nilai likuidasinya.

Asumsi ini memberikan kepastian bagi pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang (Scott, 2015). Di Indonesia, PSAK No. 1 secara eksplisit meminta manajemen untuk menilai validitas asumsi *going concern* dalam setiap penyusunan laporan keuangan.

3. Asumsi Entitas Ekonomi (*Economic Entity Assumption*)

Asumsi ini menyatakan bahwa entitas ekonomi diperlakukan sebagai unit yang terpisah dari pemilik atau entitas lain. Artinya, hanya transaksi yang berkaitan langsung dengan entitas yang dicatat, bukan aktivitas keuangan pribadi pemilik atau afiliasi lainnya (Al Amin, 2018). Misalnya, seorang pemilik toko membeli sepeda motor untuk keperluan pribadi. Transaksi ini tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan toko karena tidak berhubungan dengan operasi bisnis.

Penerapan asumsi ini sangat penting dalam menjaga objektivitas dan integritas laporan keuangan. Tanpa pemisahan entitas, laporan akan tercampur dan tidak lagi mencerminkan kinerja bisnis sebenarnya.

4. Asumsi Periode Akuntansi (*Accounting Period Assumption*)

Dalam dunia nyata, sebuah entitas dapat beroperasi terus-menerus selama bertahun-tahun. Namun, untuk keperluan pelaporan dan analisis, waktu tersebut harus dibagi menjadi periode-periode yang lebih pendek seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan. Ilustrasinya misalnya perusahaan A mungkin berdiri selama 50 tahun, tetapi tetap menyusun laporan keuangan tahunan untuk melaporkan kondisi dan kinerja selama setiap tahun tersebut.

Asumsi ini memungkinkan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara periodik dan membuat keputusan berdasarkan informasi terkini.

Tabel 2.1 Ringkasan Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi	Penjelasan	Relevansi Praktik Akuntansi
Akrua (<i>Accrual Basis</i>)	Pendapatan & beban dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima/ dibayar	Memberikan gambaran realistis tentang kinerja keuangan selama periode berjalan
<i>Going Concern</i>	Diasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang dapat diperkirakan	Menentukan metode penilaian aset dan pengakuan liabilitas
Entitas Ekonomi	Entitas bisnis dipisahkan dari pemilik dan entitas lainnya	Menjaga objektivitas & akurasi laporan keuangan
Periode Akuntansi	Aktivitas ekonomi dibagi ke dalam periode tertentu (bulanan, tahunan, dll.)	Memungkinkan evaluasi berkala atas kinerja keuangan perusahaan

Sumber: Kieso *et al.* (2019); Deegan (2014)

Asumsi dasar akuntansi bukan sekadar teori abstrak, tetapi fondasi praktis yang membuat laporan keuangan menjadi logis, terstruktur, dan dapat diandalkan. Tanpa keberadaan dan pemahaman terhadap asumsi ini, praktik akuntansi bisa kehilangan arah dan bahkan membahayakan pengambilan keputusan ekonomi.

D. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi merupakan fondasi utama dalam praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Prinsip ini berkembang dari praktik yang telah dilakukan secara luas dan diakui secara umum, baik oleh praktisi maupun lembaga penyusun standar. Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah agar penyusunan laporan keuangan menghasilkan

informasi yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

Prinsip biaya historis menegaskan bahwa aset dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan biaya perolehannya, yaitu nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Nilai ini dianggap objektif dan dapat diverifikasi karena merupakan hasil dari transaksi aktual. Pendekatan ini memberikan dasar yang stabil bagi pencatatan akuntansi, walaupun dalam beberapa kasus tidak mencerminkan nilai pasar terkini dari suatu aset (Martini *et al.*, 2023). Dalam konteks standar akuntansi di Indonesia, prinsip ini juga diadopsi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), di mana aset tetap dan persediaan pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan awalnya (IAI, 2023).

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan harus diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh, yaitu ketika manfaat ekonomi telah mengalir ke entitas dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan tidak selalu diakui saat kas diterima, melainkan ketika entitas telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan (Kieso *et al.*, 2020). Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang menyusun pengakuan pendapatan berdasarkan lima langkah utama, salah satunya adalah saat pengendalian aset berpindah ke pelanggan.

3. Prinsip Kecocokan (*Matching Principle*)

Prinsip kecocokan menyatakan bahwa beban harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan yang terkait, untuk mencerminkan hubungan sebab-akibat antara keduanya. Dengan demikian, laba atau rugi yang dilaporkan akan menunjukkan gambaran yang lebih realistis dan representatif dari kinerja perusahaan selama periode tertentu (Martini *et al.*, 2023). Penerapan prinsip ini juga menjadi dasar

dari penggunaan metode akrual dalam akuntansi, di mana pendapatan dan beban dicatat berdasarkan waktu terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

4. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Prinsip konsistensi menekankan bahwa metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi ini penting untuk memungkinkan perbandingan antar periode sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai tren dan kinerja organisasi secara andal (Belkaoui, 2004). Namun demikian, jika terdapat perubahan dalam metode akuntansi, maka perubahan tersebut harus diungkapkan dengan jelas beserta alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

5. Prinsip Materialitas (*Materiality Principle*)

Prinsip materialitas menunjukkan bahwa hanya informasi yang bersifat material yang harus disajikan secara rinci dalam laporan keuangan. Informasi dikatakan material jika kelalaiannya dalam penyajian dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan (Kieso *et al.*, 2019). Oleh karena itu, profesionalisme dan pertimbangan akuntan sangat penting dalam menilai tingkat materialitas suatu informasi. Di Indonesia, konsep ini juga diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan oleh IAI yang menyebutkan bahwa relevansi suatu informasi keuangan sangat ditentukan oleh tingkat materialitasnya.

6. Prinsip Konservatisme (*Conservatism Principle*)

Prinsip konservatisme mengarahkan akuntan untuk memilih metode pencatatan yang tidak melebih-lebihkan pendapatan atau aset, dan tidak meremehkan beban atau kewajiban. Dalam situasi ketidakpastian, prinsip ini menyarankan pencatatan yang cenderung berhati-hati untuk mencegah pelaporan keuangan yang terlalu optimis dan menyesatkan (Deegan, 2014). Konservatisme banyak diterapkan dalam penilaian persediaan dan piutang tak

tertagih. PSAK di Indonesia juga mengadopsi prinsip ini sebagai bagian dari kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan.

7. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi dan kejadian ekonomi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi ekonominya, bukan hanya bentuk hukumnya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencerminkan realitas ekonomi dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan (Scott, 2015). Contoh penerapan prinsip ini terlihat dalam akuntansi leasing, di mana transaksi yang secara hukum berupa sewa dapat diakui sebagai pembelian aset jika hak dan kewajiban yang timbul menunjukkan pengalihan pengendalian dan manfaat ekonomi.

E. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

Dalam penyusunan laporan keuangan, tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Agar tujuan ini tercapai, informasi yang disajikan harus memiliki kualitas tertentu yang menjadikannya layak dipercaya dan digunakan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi adalah atribut yang menentukan sejauh mana informasi akuntansi dapat memenuhi fungsi tersebut.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dari IAI dan IFRS, terdapat empat karakteristik utama yang perlu diperhatikan yaitu relevansi, keandalan, daya banding, dan konsistensi.

1. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi menunjukkan sejauh mana informasi akuntansi mampu memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian masa lalu, sekarang, atau masa depan. Informasi dianggap relevan jika memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik (*feedback value*). Artinya,

informasi tersebut tidak hanya membantu memperkirakan hasil di masa depan, tetapi juga memberi masukan terhadap evaluasi keputusan sebelumnya (Scott, 2015).

Sebagai contoh, laporan laba rugi yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode dapat membantu investor memperkirakan prospek keuntungan di masa depan. Di Indonesia, relevansi diakui sebagai karakteristik fundamental informasi keuangan dalam *Kerangka Konseptual IAI*.

2. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan berarti bahwa informasi akuntansi bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya oleh pengguna dalam menggambarkan realitas ekonomi. Informasi yang andal mencerminkan substansi dari suatu transaksi, dapat diverifikasi oleh pihak independen, dan disajikan secara jujur (*faithful representation*) (Deegan, 2014).

Sebagai ilustrasi, penyajian nilai aset tetap berdasarkan biaya historis dianggap andal karena nilainya dapat diverifikasi melalui dokumen pembelian. Di Indonesia, PSAK dan kerangka konseptual juga menekankan pentingnya keandalan agar informasi dapat digunakan secara sah dan dapat diuji kembali oleh akuntan lainnya.

3. Daya Banding (*Comparability*)

Daya banding merupakan kemampuan informasi akuntansi untuk dibandingkan antar perusahaan dan antar periode waktu. Karakteristik ini sangat penting karena memungkinkan pengguna menilai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas relatif terhadap entitas lainnya atau terhadap kinerja entitas yang sama di waktu yang berbeda (Kieso *et al.*, 2019).

Tanpa daya banding, analisis tren dan benchmarking menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang seragam secara internasional – seperti IFRS – mendukung tercapainya daya banding yang lebih baik. Di tingkat nasional, IAI juga mendorong harmonisasi dengan

IFRS agar laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dibandingkan secara global (IAI, 2023).

4. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi merupakan perpanjangan dari daya banding. Artinya, informasi akuntansi harus disusun dengan menggunakan metode dan prinsip yang sama dari periode ke periode, agar perbandingan waktu menjadi relevan. Jika terjadi perubahan metode, misalnya dari metode depresiasi garis lurus ke saldo menurun ganda, maka perubahan tersebut harus diungkapkan secara transparan beserta alasannya dan dampaknya terhadap laporan (Martini *et al.*, 2023). Konsistensi bukan berarti metode tidak boleh berubah, namun setiap perubahan harus dijustifikasi secara rasional dan diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan.

F. Konsep Pengukuran dalam Akuntansi

Pengukuran dalam akuntansi adalah proses menentukan jumlah moneter yang akan diakui dalam laporan keuangan untuk suatu aset, kewajiban, pendapatan, atau beban. Pengukuran menjadi bagian krusial karena hasil dari proses ini akan sangat memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal (Deegan, 2014). Pemilihan dasar pengukuran harus mempertimbangkan keseimbangan antara relevansi informasi dan tingkat keandalan yang dapat dicapai.

Beberapa pendekatan utama dalam pengukuran akuntansi yang lazim digunakan di antaranya:

1. Pengukuran Biaya Historis

Pengukuran biaya historis didasarkan pada nilai kas atau setara kas yang dikeluarkan pada saat suatu aset diperoleh atau suatu kewajiban timbul. Metode ini menawarkan objektivitas karena mencerminkan transaksi aktual yang terjadi. Selain itu, mudah diverifikasi karena adanya bukti transaksi, seperti faktur pembelian atau nota pembayaran.

Meski demikian, biaya historis memiliki keterbatasan dalam hal relevansi, terutama ketika nilai pasar suatu aset mengalami perubahan signifikan. Dalam konteks ekonomi yang mengalami inflasi atau penurunan nilai aset, informasi berbasis biaya historis menjadi kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Kieso *et al.*, 2019). Di Indonesia, metode ini masih banyak digunakan karena bersifat konservatif dan mudah diterapkan.

2. Nilai Wajar (*Fair Value*)

Nilai wajar mencerminkan harga yang akan diterima dalam penjualan suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi normal antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pendekatan ini bersifat lebih dinamis karena menyesuaikan dengan kondisi pasar terkini, sehingga lebih relevan bagi pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, penggunaan nilai wajar juga menghadirkan tantangan dalam hal keandalan, terutama bila tidak tersedia pasar aktif. Estimasi nilai wajar dalam kondisi tersebut membutuhkan pertimbangan profesional yang tinggi dan sering kali menggunakan model valuasi, sehingga dapat menimbulkan subyektivitas (Scott, 2015). Di Indonesia, pendekatan nilai wajar telah diakomodasi melalui PSAK 68 yang mengatur pedoman umum tentang pengukuran nilai wajar, termasuk teknik penilaian dan hierarki input dalam pengukuran.

3. Nilai Kini (*Present Value*)

Nilai kini digunakan untuk mengukur jumlah sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu aset atau yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Pendekatan ini memperhitungkan nilai waktu dari uang dan sangat relevan dalam pengakuan transaksi jangka panjang seperti kewajiban pensiun, kontrak leasing, atau obligasi.

Dengan mempertimbangkan diskonto atas arus kas masa depan, pendekatan nilai kini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai ekonomis suatu aset atau kewajiban. Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap estimasi masa depan dan tingkat diskonto yang dapat berubah tergantung pada asumsi ekonomi (Martini *et al.*, 2023).

4. Nilai Realisasi Bersih (*Net Realizable Value*)

Nilai realisasi bersih merupakan estimasi kas yang akan diperoleh dari penjualan aset dalam kondisi normal, setelah dikurangi biaya penyelesaian. Ini sering digunakan dalam pengukuran aset seperti persediaan atau piutang, di mana terdapat kemungkinan penurunan nilai karena usang, rusak, atau tidak tertagih (Yunita and Indahwati, 2022).

Metode ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan memberikan informasi yang lebih realistis mengenai jumlah yang kemungkinan besar akan direalisasikan dari aset tertentu. PSAK 14 secara eksplisit menetapkan bahwa persediaan harus dicatat sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

G. Konsep Lain dalam Teori Akuntansi

Dalam pengembangan teori akuntansi, selain prinsip dan asumsi dasar yang umum dikenal, terdapat beberapa konsep lain yang meskipun tidak selalu dituliskan secara eksplisit dalam kerangka konseptual, memiliki peranan yang krusial dalam membentuk praktik akuntansi yang andal dan akuntabel. Salah satunya adalah konsep pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menegaskan bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan entitas. Artinya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan aktivitas ekonomi perusahaan saja, bukan mencampurkan kepentingan pribadi pemilik. Prinsip ini menjadi sangat penting, terutama dalam dunia bisnis modern yang ditandai dengan keberadaan badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, di mana

tanggung jawab pemilik dibatasi oleh modal yang disetorkan (Deegan, 2014).

Selanjutnya, keanekaragaman perlakuan akuntansi antar entitas merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam praktik akuntansi. Meskipun standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara global telah berupaya menyatukan praktik, kenyataannya perbedaan tetap muncul. Hal ini karena setiap entitas memiliki karakteristik, kebutuhan informasi, dan kebijakan internal yang berbeda. Sebagai contoh, dalam metode penilaian persediaan, perusahaan dapat memilih antara FIFO, LIFO, atau metode rata-rata tertimbang, tergantung pada kebutuhan mereka. Kebebasan memilih metode inilah yang mencerminkan keanekaragaman perlakuan akuntansi, yang sah selama sesuai dengan standar dan diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan (IAI, 2023).

Terakhir, pentingnya pengendalian internal juga menjadi perhatian dalam teori akuntansi karena berkaitan langsung dengan keandalan dan integritas informasi keuangan. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, mencegah kesalahan dan kecurangan, serta memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dicatat secara akurat. Dalam praktiknya, pengendalian internal mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dengan memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung secara sistematis dan dapat diaudit. Laporan keuangan yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat lebih dipercaya oleh pengguna, baik internal maupun eksternal (Purwanti *et al.*, 2024).

Ketiga konsep ini memperkuat bahwa teori akuntansi tidak hanya berbicara tentang angka dan laporan, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola, kepemilikan, dan adaptasi terhadap konteks masing-masing entitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk memperkaya wawasan teoretis dan meningkatkan kualitas praktik akuntansi dalam berbagai sektor.

H. Kesimpulan

Teori akuntansi merupakan dasar konseptual yang penting dalam membentuk praktik akuntansi yang relevan, andal, dan akuntabel. Melalui berbagai pendekatan seperti deduktif, induktif, hingga pendekatan etika dan ekonomi, teori ini memberikan landasan logis dalam penyusunan standar. Asumsi dasar dan prinsip-prinsip akuntansi menjadi pedoman teknis dalam penyajian laporan keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu entitas secara wajar.

Selain itu, karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan konsep-konsep pengukuran menegaskan pentingnya penyajian informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Ditambah dengan konsep lain seperti pengakuan hak milik pribadi, keanekaragaman perlakuan akuntansi, dan pentingnya pengendalian internal, teori akuntansi terus berkembang mengikuti dinamika lingkungan bisnis, sehingga tetap relevan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, M. and Misra, F. (2019) 'Mengintegrasikan Keterampilan Kepemimpinan ke dalam Kurikulum Akuntansi: Persepsi Stakeholders dan Pengujian Model Pembelajaran Kooperatif', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), pp. 297-315. Available at: <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6146>.
- Al Amin, M. (2018) *Filsafat Teori Akuntansi*. Unimma Press.
- Andika, I.W.A. and Olli, N. (2023) 'Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Nilai Perusahaan Menurut Perkembangan Akuntansi Syariah Terkini', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), pp. 270-281. Available at: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/106>.
- Belkaoui, A.R. (2004) *Accounting Theory, 5th edn*. London: Thomson Learning.
- Deegan, C. (2014) *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Education (Australia) Pty Limited (McGraw-Hill education). Available at: <https://books.google.co.id/books?id=zH-BQAAQBAJ>.
- IAI (2023) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta.
- Indriani, E., Ramadhani, R.S. and Astuti, W. (2020) 'Standar akuntansi keuangan dan praktik manajemen laba di indonesia', *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), pp. 226-237. Available at: <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.77>.
- Kieso, D.E. et al. (2019) *Intermediate Accounting, Volume 2*. John wiley & sons.
- Kirowati, D. and Amir, V. (2019) 'Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan di era revolusi industri 4.0 (Studi kasus pada UMKM di Kota Madiun)', *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.32486/aksi.v4i1.48>.

- Mardiasmo (2009) *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Martini, A.N. et al. (2023) *Dasar-Dasar Akuntansi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Purwanti, A. et al. (2024) *Sistem Akuntansi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Scott, W.R. (2015) *Financial Accounting Theory*. Pearson. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=4oZxngEACAAJ>.
- Sunaryo, D., Dadang, D. and Erdawati, L. (2021) 'Pengaruh persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang akuntansi, pengetahuan akuntansi, dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi', *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), pp. 47-56. Available at: <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.4049>.
- Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. (1986) *Positive accounting theory*. Prentice-Hall Inc.
- Yunita, D.I. and Indahwati, R. (2022) 'Pengaruh Penerapan PSAK 71 terhadap Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Cadangan Penurunan Nilai Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan', *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), pp. 1-12. Available at: <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4542>.

TENTANG PENULIS



Debi Eka Putri, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulan Agung

Penulis lahir di Pematangsiantar pada tanggal 03 Agustus 1993. Penulis saat ini merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar. Disamping mengajar, penulis juga aktif sebagai Reviewer dan Editor di beberapa jurnal nasional Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan kajian pada bidang keuangan dan bisnis serta berkolaborasi dalam menulis sejumlah buku yang terkait dengan bidang Manajemen. Penulis menempuh pendidikan terakhir pada Program Magister di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selesai pada tahun 2017.

BAB 3

PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI

Catur Ragil Sutrisno, S.E., M.Si., Ak.
Universitas Pekalongan

A. Pendahuluan

Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah-masalah praktis dan profesional. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan, dapat dipertanggung jawabkan secara etis dan ilmiah (Suwardjono, 2011). Teori akuntansi menjadi landasan dalam regulasi, praktik dan pengembangan sistem akuntansi dalam lingkup keuangan dan bisnis. Menurut Scott (2015), teori akuntansi merupakan konsep yang terstruktur, digunakan untuk memberi gambaran dan penjelasan tentang fakta-fakta ekonomi yang ada dalam praktik akuntansi.

Sebagai suatu disiplin ilmu, akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga pada penyediaan kerangka konseptual yang memandu bagaimana informasi keuangan seharusnya diukur, diakui, dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Perumusan teori akuntansi menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun standar akuntansi, mengatasi masalah-masalah praktis, serta

memastikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dipercaya.

Bab ini akan membahas proses perumusan (formulasi) teori akuntansi, mulai dari identifikasi masalah-masalah akuntansi yang muncul dalam praktik, penyusunan kerangka teoritis yang komprehensif dan mengkaji berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, serta bagaimana masing-masing pendekatan tersebut berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi akuntansi dalam konteks ekonomi dan sosial.

Dengan memahami proses perumusan teori akuntansi, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi pentingnya teori dalam membentuk praktik akuntansi yang berkualitas serta dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan dinamika lingkungan bisnis dan regulasi yang terus berkembang.

B. Identifikasi Masalah-Masalah Akuntansi dalam Praktik

Identifikasi masalah-masalah akuntansi dalam praktik merupakan langkah awal yang krusial dalam proses perumusan teori akuntansi. Masalah-masalah ini sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara praktik akuntansi yang ada dengan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, perubahan lingkungan bisnis, atau ketidakkonsistenan dalam penerapan standar akuntansi. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, peneliti dan praktisi akuntansi dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif dan relevan, serta memperkuat landasan teoritis yang mendasari praktik akuntansi.

Suardjono (2011) menyebutkan beberapa pertanyaan yang merupakan contoh masalah yang dihadapi praktik akuntansi dan jawabannya dapat diberikan atas dasar taktik cerdas (*shrewd tact*) atau atas dasar penalaran yang sehat (*sound theory*), antara lain:

1. Apakah selisih kurs valuta asing dibiayakan atau dikapitalisasi?

2. Manakah istilah yang tepat untuk pada kata *cost of good sold*: harga pokok penjualan, beban pokok penjualan, atau kos barang terjual?
3. Apa kriteria kapitalisasi sewaguna yang seharusnya di Indonesia?

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, beberapa masalah akuntansi yang sering muncul dalam praktik, antara lain:

1. Kompleksitas Transaksi Bisnis

Perkembangan bisnis yang semakin kompleks, seperti munculnya instrumen keuangan derivatif, transaksi multinasional, dan model bisnis berbasis teknologi, menimbulkan tantangan dalam pengukuran, pengakuan, dan pelaporan transaksi tersebut. Akuntan sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan nilai wajar (*fair value*) atau mengalokasikan pendapatan dan biaya secara tepat.

2. Ketidacukupan Standar Akuntansi yang Ada

Standar akuntansi, seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), mungkin tidak selalu mampu mengakomodasi transaksi atau situasi bisnis yang baru. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan dan mengurangi keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan.

3. Konflik Kepentingan dan Manipulasi Laporan Keuangan

Praktik akuntansi sering kali dihadapkan pada risiko manipulasi laporan keuangan, seperti *window dressing* atau *earnings management*, yang dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar atau kepentingan tertentu. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas informasi akuntansi dan merugikan pemangku kepentingan.

4. Perbedaan Persepsi tentang Relevansi dan Reliabilitas Informasi

Terdapat perdebatan terus-menerus tentang keseimbangan antara relevansi dan reliabilitas informasi akuntansi. Misalnya, penggunaan nilai wajar (*fair value*)

dianggap lebih relevan untuk pengambilan keputusan, tetapi kurang reliabel karena bergantung pada estimasi dan asumsi.

5. Dampak Perubahan Lingkungan Bisnis dan Teknologi

Perkembangan teknologi, seperti blockchain, *artificial intelligence*, dan *big data*, telah mengubah cara informasi akuntansi diproses dan disajikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana standar akuntansi harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.

6. Isu Keberlanjutan dan Akuntansi Lingkungan

Semakin meningkatnya kesadaran tentang isu lingkungan dan keberlanjutan menuntut akuntansi untuk mengintegrasikan aspek non-keuangan, seperti dampak lingkungan dan sosial, ke dalam laporan keuangan. Namun, belum ada kerangka yang jelas tentang bagaimana mengukur dan melaporkan informasi tersebut.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, peneliti dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan mengembangkan teori-teori baru atau memperbaiki teori yang sudah ada. Proses identifikasi masalah juga memungkinkan akuntan dan regulator untuk mengevaluasi efektivitas standar akuntansi yang berlaku serta merancang solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Pada akhirnya, identifikasi masalah-masalah akuntansi dalam praktik menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa akuntansi tetap relevan dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan informasi di era yang terus berubah.

C. Pendekatan dalam Perumusan Teori Akuntansi

International Accounting Standards Board (IASB) menyebutkan bahwa perumusan teori akuntansi berfungsi sebagai dasar bagi standar akuntansi, yang memengaruhi bagaimana informasi keuangan disiapkan dan disajikan. Pengembangan teori akuntansi merupakan proses yang berkelanjutan, yang didorong oleh berbagai pemangku

kepentingan seperti akademisi, praktisi, regulator, dan badan pembuat standar (Oladutire, Soyinka and Akinnola, 2023).

Perumusan teori akuntansi melibatkan berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan memahami konsep, prinsip, dan praktik akuntansi. Setiap pendekatan memiliki perspektif, metodologi, dan tujuan yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi yang unik terhadap perkembangan ilmu akuntansi. Beberapa pendekatan tersebut adalah: **Normatif dan Positif** (Harahap and Siregar, 2022), (Oladutire, Soyinka and Akinnola, 2023); **Non-Teoretis dan Teoretis / Formal** (Kolawole *et al.*, 2024); **Tradisional yang meliputi Non-teoritis/Pragmatis/Praktis dan Teoritis (Deduktif, Induktif, Etis, Sosiologis, Ekonomis, Eklektik) serta pendekatan baru meliputi Pendekatan Peristiwa, Perilaku, Pemrosesan Informasi Manusia, Prediktif dan Positif** (Oseni, Ireghah and Ali-momoh, 2011), (Riahi-Belkaoui, 2000).

1. Pendekatan Normatif (*Normative Approach*)

Pendekatan normatif berfokus pada pengembangan teori akuntansi yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan standar atau prinsip akuntansi yang ideal yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Contoh: Pengembangan konsep seperti "*true income*" atau "*economic income*" yang berusaha mengukur laba secara teoritis ideal.

2. Pendekatan Positif (*Positive Approach*)

Pendekatan positif berfokus pada menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi, bukan bagaimana seharusnya dilakukan. Pendekatan ini menggunakan metode ilmiah, seperti pengujian hipotesis dan analisis empiris, untuk memahami perilaku akuntan, perusahaan, dan pengguna laporan keuangan.

Contoh: Penelitian tentang bagaimana manajemen memilih metode akuntansi tertentu untuk memengaruhi laba yang dilaporkan (*earnings management*).

Berdasarkan 2 (dua) pendekatan tersebut, dapat diuraikan perbedaan teori akuntansi positif dan normatif sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbedaan Teori Akuntansi Positif dan Normatif

Area	Teori Akuntansi Positif (PAT)	Teori Akuntansi Normatif (NAT)
Peran	Menjelaskan perilaku yang diamati dalam bidang akuntansi.	Memberikan landasan normatif untuk memandu praktik akuntansi secara etis dan bertanggung jawab secara sosial
Implikasi Praktis	Memiliki implikasi praktis bagi investor, regulator, dan profesional akuntansi dengan membantu mereka memahami dan mengantisipasi perilaku manajerial	Memiliki implikasi praktis bagi pembuat standar dan pembuat kebijakan dalam menyusun standar akuntansi yang etis dan transparan.
Fleksibilitas vs Kekakuan	Sering dipandang lebih fleksibel, beradaptasi dengan berbagai konteks dan kondisi pasar.	Dengan fokusnya pada prinsip-prinsip etika, dapat dianggap lebih kaku dan kurang mudah beradaptasi terhadap perubahan keadaan ekonomi
Realisme vs Idealisme	Sering dikritik karena terlalu sederhana dan terlalu bergantung pada asumsi	Dapat dikritik karena terlalu idealis dan terpisah dari kompleksitas dunia nyata.
Kepraktisan	Lebih memperhatikan aplikasi praktis	Meskipun menyediakan landasan etika yang kuat, mungkin dikritik karena

Area	Teori Akuntansi Positif (PAT)	Teori Akuntansi Normatif (NAT)
	karena berupaya menjelaskan praktik yang ada	kepraktisannya yang terbatas dalam dunia bisnis.
Pendekatan	Mengambil pendekatan deskriptif dan empiris, dengan fokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi aktual berdasarkan kepentingan pribadi dan memaksimalkan kekayaan.	Bersifat normatif dan preskriptif, menekankan praktik akuntansi apa yang harus didasarkan pada pertimbangan etika dan sosial
Cakupan	Terutama membahas perilaku manajer dan peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.	Mempertimbangkan pemangku kepentingan dan pertimbangan etika yang lebih luas.
Penelitian Empiris vs Konseptual	Sangat bergantung pada penelitian empiris untuk mendukung klaim dan hipotesisnya. Ia menggunakan pengamatan praktik akuntansi aktual dan data keuangan untuk menjelaskan perilaku manajerial	Sering kali melibatkan pengembangan kerangka konseptual untuk akuntansi yang menguraikan prinsip dan nilai yang harus menjadi panduan standar akuntansi. Kerangka ini menyediakan landasan bagi praktik akuntansi yang etis.
Sifat vs Fokus	Pada dasarnya bersifat deskriptif dan eksplanatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan	Bersifat normatif, artinya menetapkan prinsip dan praktik akuntansi seperti apa yang seharusnya. Berkaitan dengan penetapan standar

Area	Teori Akuntansi Positif (PAT)	Teori Akuntansi Normatif (NAT)
	dan menjelaskan praktik akuntansi sebagaimana yang diamati di dunia nyata. Fokusnya adalah pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi pilihan yang dibuat oleh manajer, seperti kepentingan pribadi dan keinginan untuk memaksimalkan kekayaan mereka.	akuntansi yang etis dan ideal. Menekankan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan etika dan nilai-nilai sosial.
Globalisasi vs Harmonisasi	Pendekatan yang digerakkan oleh pasar	Landasan etika NAT dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap upaya konvergensi
Pendidikan vs Pengembangan Profesional	Kurikulum berbasis PAT mungkin menekankan analisis empiris.	Program berbasis NAT dapat berfokus pada pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip etika

Sumber: Oladutire, Soyinka and Akinnola (2023)

3. Pendekatan Non-Teoretis (*Non-Theoretical Approaches*)

Pendekatan non-teoretis berfokus pada pengembangan metode dan prinsip akuntansi yang berguna bagi para pengambil keputusan, dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi para manipulator. Pendekatan ini biasanya merupakan pendekatan pragmatis (praktis) dan otoriter (otoritarian). Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian terhadap praktik sesungguhnya, yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis. Pendekatan otoritarian umumnya digunakan oleh organisasi profesi, terdiri dari

penyajian sejumlah peraturan praktik-praktik akuntansi. Kedua pendekatan ini berasumsi bahwa teori akuntansi dan teknik-teknik yang dihasilkan harus didasarkan pada pemanfaatan secara maksimal. Hal ini didasarkan suatu kaidah bahwa suatu teori tanpa konsekuensi praktik adalah teori yang buruk.

4. Pendekatan Teoretis/Formal (*Theoretical/ Formal approaches*)

Pendekatan teoritis pada teori akuntansi, meliputi pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etis, pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomis, dan pendekatan eklektik. Pendekatan deduktif berpusat pada permulaan dengan proposisi, premis, dan asumsi fundamental, dan menggunakannya untuk menetapkan prinsip akuntansi yang akhirnya menghasilkan solusi praktis dan nyata.

5. Pendekatan Pragmatis /Praktis (*Pragmatic Approach*)

Pendekatan pragmatis menekankan pada praktik akuntansi yang berguna dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah-masalah praktis dan mengutamakan kegunaan informasi akuntansi bagi pengguna.

Contoh: Pengembangan standar akuntansi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh perusahaan, seperti prinsip pengakuan pendapatan.

6. Pendekatan Deduktif (*Deductive*)

Penyusunan teori dalam pendekatan ini dimulai dengan adanya asumsi-asumsi dasar dan hasil penarikan konklusi yang bersifat logis tentang suatu subjek dengan sejumlah pertimbangan. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi atau dalil dasar akuntansi dan konklusi logis yang diperoleh dari sejumlah prinsip akuntansi untuk menyajikan petunjuk dan dasar bagi pengembangan teknik-teknik akuntansi.

Tahap-tahap yang digunakan dalam pendekatan deduktif, meliputi:

- a. Penetapan tujuan-tujuan laporan keuangan
- b. Pemilihan dalil-dalil akuntansi
- c. Penentuan prinsip-prinsip akuntansi
- d. Pengembangan teknik-teknik akuntansi

7. Pendekatan Induktif (*Inductive*)

Pendekatan ini dimulai dengan serangkaian pengamatan, kemudian pengukuran dan selanjutnya aktivitas untuk memperoleh suatu konklusi. Jika diterapkan dalam bidang akuntansi, dimulai dengan serangkaian pengamatan terhadap informasi keuangan perusahaan dan diperoleh rumusan gagasan dan prinsip-prinsip akuntansi dengan dasar-dasar hubungan yang terjadi secara berulang. Tahapannya meliputi:

- a. Mencatat seluruh pengamatan
- b. Menganalisis dan mengelompokkan pengamatan untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang (sama atau mirip)
- c. Penginduksian asal mula konklusi-konklusi dan prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan-pengamatan yang menggambarkan hubungan secara berulang
- d. Pengujian konklusi-konklusi yang dibuat

8. Pendekatan Etis (*Ethical*)

Inti dasar dari pendekatan etika terdiri dari konsep kewajaran (*fairness*), keadilan (*justice*), kesetaraan (*justice*), dan kebenaran (*truth*). Akuntan menyamakan "keadilan" dengan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan, "kebenaran" dengan laporan akuntansi yang benar dan akurat tanpa salah tafsir, dan "kewajaran" dengan penyajian yang adil, tidak bias, dan tidak memihak. Konsep "kewajaran" menyiratkan bahwa laporan akuntansi tidak mengalami pengaruh atau bias yang tidak semestinya. "Kewajaran" secara umum menyiratkan bahwa penyusun informasi akuntansi telah bertindak dengan itikad baik dan menggunakan praktik bisnis yang etis serta penilaian

akuntansi yang baik. "Kewajaran" adalah pernyataan nilai yang diterapkan secara beragam dalam akuntansi. "Kewajaran" diperingkat sebagai standar dasar yang akan digunakan dalam evaluasi standar lain, karena itu adalah satu-satunya standar yang menyiratkan "pertimbangan etis". Kewajaran adalah tujuan yang diinginkan dalam konstruksi teori akuntansi jika apa pun yang dinyatakan atas dasarnya diverifikasi secara logis atau empiris dan dibuat operasional dengan definisi dan identifikasi propertinya yang memadai.

9. Pendekatan Sosiologis (*Sociological*)

Pendekatan ini menekankan pada akibat-akibat sosial yang ditimbulkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan etis yang dasarnya merupakan suatu perluasan konsep kewajaran yang disebut kesejahteraan sosial (*social welfare*). Prinsip maupun teknik akuntansi yang tersedia dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan akibat-akibat yang dilaporkan berbagai oleh berbagai kelompok masyarakat.

Pendekatan sosiologis telah memberikan kontribusi pada evolusi cabang ilmu akuntansi baru yang dikenal sebagai sosioekonomi (*socioeconomic accounting*). Tujuan utamanya mendorong entitas bisnis beraktivitas dalam pasar bebas agar mempertanggungjawabkan aktivitas produksi mereka terhadap lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

10. Pendekatan Ekonomi (*Economic*)

Pada pendekatan ini, penekanan ada pada pengendalian perilaku indikator-indikator ekonomi makro yang diakibatkan oleh berbagai praktik akuntansi. Jika pendekatan etis menekankan konsep kewajaran (*fairness*) dan pendekatan sosiologis pada kesejahteraan sosial, maka pendekatan ekonomis menekankan pada kesejahteraan ekonomi secara umum. Pada pendekatan ekonomi, pemilihan teknik-teknik yang berbeda tergantung pada pengaruhnya terhadap barang ekonomi nasional.

Kriteria umum yang digunakan adalah kebijakan dan teknik akuntansi yang digunakan harus menyajikan realitas ekonomi dan pemilihan teknik-teknik akuntansi bergantung pada konsekuensi ekonomik. Dalam menetapkan standar akuntansi, pertimbangan yang digunakan lebih bersifat ekonomik daripada operasional.

11. Pendekatan Eklektik (*Eclectic Approach*)

Pendekatan eklektik menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan (normatif, positif, dan pragmatis) untuk mengembangkan teori akuntansi yang komprehensif. Pendekatan ini berusaha memadukan kelebihan masing-masing pendekatan untuk menciptakan kerangka teoritis yang lebih lengkap.

Contoh: Pengembangan kerangka konseptual akuntansi yang mencakup prinsip normatif, analisis positif, dan pertimbangan pragmatis.

12. Pendekatan Peristiwa (*event*)

Pendekatan ini pertama kali dinyatakan secara eksplisit setelah adanya perbedaan pendapat di antara anggota komite *American Accounting Association*, yang mengeluarkan Pernyataan Teori Dasar pada tahun 1966. Mayoritas anggota Komite mendukung pendekatan nilai dalam akuntansi. Hanya satu anggota, George Sorter, yang mendukung pendekatan peristiwa. Aliran nilai, yang juga disebut aliran kebutuhan pengguna, menganggap bahwa kebutuhan pengguna harus diketahui secara memadai untuk memungkinkan deduksi teori akuntansi yang memberikan masukan optimal pada model keputusan yang ditentukan. Sebaliknya, pendekatan peristiwa, menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah “untuk memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi relevan yang mungkin berguna dalam berbagai model keputusan”.

13. Pendekatan Perilaku (*Behavioural*)

Pendekatan perilaku terhadap formulasi teori akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia, karena berkaitan dengan informasi dan masalah akuntansi. Dalam konteks ini, pilihan teknik akuntansi harus dievaluasi dengan mengacu pada tujuan dan perilaku pengguna informasi keuangan.

14. Pendekatan Pemrosesan Informasi Manusia (*Human information processing*)

Minat terhadap pendekatan pemrosesan informasi manusia muncul dari keinginan untuk meningkatkan kumpulan informasi yang disajikan kepada pengguna data keuangan dan kemampuan pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Teori dan model dari pemrosesan informasi manusia dalam psikologi menyediakan alat untuk mengubah isu akuntansi menjadi isu pemrosesan informasi umum. Ada tiga komponen utama model pemrosesan informasi, yaitu input, proses, dan output.

15. Pendekatan Prediktif (*Predictive*)

Pendekatan prediktif muncul dari kebutuhan untuk memecahkan masalah sulit dalam mengevaluasi metode pengukuran akuntansi alternatif dan dari pencarian kriteria yang menjadi dasar pilihan di antara alternatif pengukuran. Secara khusus, "pengukuran dengan daya prediksi terbesar sehubungan dengan peristiwa tertentu dianggap sebagai "metode terbaik untuk tujuan tertentu".

16. Pendekatan Kritis (*Critical Approach*)

Pendekatan kritis berfokus pada menganalisis peran akuntansi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini mengkritik praktik akuntansi yang dianggap memperkuat ketidakadilan atau ketimpangan sosial, serta mengeksplorasi bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang positif.

Contoh: Analisis tentang bagaimana laporan keuangan dapat memengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat.

17. Pendekatan Institusional (*Institutional Approach*)

Pendekatan institusional mempelajari bagaimana institusi (seperti regulator, pasar, dan organisasi) memengaruhi praktik akuntansi. Pendekatan ini menekankan pada peran aturan, norma, dan budaya dalam membentuk perilaku akuntansi.

Contoh: Studi tentang bagaimana adopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) memengaruhi praktik akuntansi di berbagai negara.

Dengan memahami berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, peneliti dan praktisi dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka. Setiap pendekatan memiliki kontribusi yang unik dalam mengembangkan teori akuntansi, sehingga kombinasi atau integrasi dari beberapa pendekatan sering kali diperlukan untuk menciptakan kerangka teoritis yang komprehensif dan relevan.

D. Kesimpulan

Perumusan teori akuntansi adalah proses penting dalam membangun dasar konseptual yang digunakan dalam praktik akuntansi. Teori akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan tetapi juga dalam penyusunan standar akuntansi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Oleh karena itu, integrasi dari berbagai pendekatan sering kali diperlukan untuk membangun teori akuntansi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M.A. and Siregar, S. (2022) 'Perkembangan Teori Akuntansi: Tinjauan Literature Terpilih', *Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP)*, 23(01), pp. 48-56. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v23i1.5259>.
- Kolawole, O.J. *et al.* (2024) 'Accounting Theory: Formulation and Diversities in the Use of Accounting Information', *International Journal of Management, Social Sciences, Peace and Conflict Studies (IJMSSPCS)*, 7(2), pp. 29-39.
- Oladutire, O.E., Soyinka, K.A. and Akinnola, M.T. (2023) 'Accounting Theory Formulation: the Methodological Approach', *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)*, VII(XI), pp. 1175-1189. Available at: <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7011129>.
- Oseni, A.I., Ireghah, M.M. and Ali-momoh, B. (2011) 'Accounting Theory Formulation as a Tool for Enhancing International Harmonization of Accounting Standards', *Journal of innovative Research in Management and Humanities*, 2(1), pp. 1-14.
- Riahi-Belkaoui, A. (2000) *Teori Akuntansi*. Pertama. Edited by Marwata *et al.* Jakarta: Salemba Empat.
- Scott, W.R. (2015) *Financial Accounting Theory*. Seventh. Edited by R. Ryoji. Canada: Pearson.
- Suwardjono (2011) *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Ed Ketiga. Edited by H. Rahayu and T. Devina. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



Catur Ragil Sutrisno, S.E., M.Si., Ak.
Universitas Pekalongan

Penulis lahir di Cilacap, pada 12 Mei 1978. Tercatat sebagai lulusan S1 - PPAk - S2 Akutansi di FEB Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Pengajar tetap di Prodi Akuntansi FEB Universitas Pekalongan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Alamat email: caturunikal@gmail.com

BAB 4

PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN

Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin intens, penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi salah satu fondasi utama bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, tidak jarang perusahaan menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan target kinerja tertentu sehingga mendorong praktik perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan merujuk pada serangkaian teknik manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan—baik melalui pengakuan pendapatan yang dipercepat, penundaan pengakuan biaya, maupun penggunaan estimasi subjektif dengan tujuan menciptakan citra keuangan yang lebih menguntungkan daripada kondisi riil perusahaan (Cug & Cugova, 2021; Healy & Wahlen, 1999).

Praktik ini tidak hanya berdampak pada keakuratan informasi keuangan, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan investor, melemahkan integritas pasar modal, dan menimbulkan risiko sistemik bagi stabilitas ekonomi. Berbagai faktor pendorong seperti insentif manajerial, tekanan pasar, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal kerap kali menjadi akar permasalahan yang melatarbelakangi praktik manipulasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, standar internasional seperti International Financial Reporting

Standards (IFRS) telah dikembangkan guna mendorong transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. IFRS tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti “true and fair view,” tetapi juga mewajibkan pengungkapan asumsi kritis dan estimasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan (IFRS Foundation, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perekayasaan pelaporan keuangan dapat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan investasi dan menurunkan kepercayaan pasar secara luas (Sikka, 2009). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai motivasi, metode, dan dampak dari praktik perekayasaan pelaporan keuangan sangat penting bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam mengembangkan strategi pengendalian yang efektif serta memperkuat tata kelola perusahaan.

B. Definisi dan Konsep Perekayasaan Pelaporan Keuangan

1. Definisi

Perekayasaan pelaporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan suatu produk, baik dalam bentuk konkret maupun konseptual. Proses ini melibatkan pemikiran, penalaran, serta pertimbangan dalam menentukan dan memilih teori, pengetahuan yang tersedia, konsep, metode, teknik, serta pendekatan yang sesuai (Carolina *et al.*, 2011). Oleh karenanya dalam penyusunan laporan keuangan melibatkan pertimbangan sehat dalam pemilihan metode akuntansi yang sesuai tanpa melanggar aturan dari Standar Akuntansi Keuangan. Praktik ini dapat berkisar dari pengelolaan angka yang berada dalam batas toleransi, yang sering disebut dengan istilah “*creative accounting*” hingga praktik yang melanggar hukum (*fraud* keuangan).

2. Konsep Dasar Perekayasaan Pelaporan Keuangan

Secara etimologis, istilah "perekayasaan" berasal dari kata "rekayasa," yang merujuk pada proses perancangan atau rekonstruksi dengan menerapkan metode, teknik, serta

prinsip tertentu (Hidayat & Nizar, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekayasa didefinisikan sebagai pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk menyusun sesuatu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, perekayasaan dapat dipahami sebagai suatu pendekatan sistematis dalam merancang dan mengembangkan produk, sistem, atau konsep berdasarkan prinsip ilmiah. Sementara itu, pelaporan keuangan bertujuan menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan menjadi elemen utama dalam sistem pelaporan keuangan, yang mencakup laporan laba rugi dan elemen lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Pelaporan keuangan berfungsi sebagai suatu kerangka kerja yang mengatur tahapan dalam penyusunan dan penyampaian informasi keuangan. Proses ini dirancang untuk mencapai tujuan akuntansi dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi serta sosial suatu negara (Heridiansyah & Sijadi, 2011).

Peran pelaporan keuangan dalam dunia bisnis sangat signifikan dalam menanggapi tantangan dan mencapai tujuan ekonomi suatu entitas (Imaduddin, 2013). Perekayasaan pelaporan keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi dalam perekayasaan pelaporan keuangan menjadi krusial bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan demi tercapainya tujuan ekonomi. Hal ini perlu didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau General Accepted Accounting Principles (GAAP). Oleh sebab itu, pemahaman mengenai rekayasa pelaporan keuangan menjadi aspek penting dalam strategi pencapaian kesuksesan ekonomi suatu perusahaan.

3. Tujuan Rekayasa Pelaporan Keuangan

Rekayasa pelaporan keuangan bertujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomi yang berlaku. Dalam praktiknya, pengendalian otomatis dalam pelaporan keuangan dicapai dengan merujuk pada pedoman pelaporan keuangan seperti PABU/GAAP, termasuk standar akuntansi yang mendukung.

C. Proses Perencanaan

Perencanaan akuntansi adalah suatu proses logis dan objektif dalam membangun struktur serta mekanisme pelaporan keuangan yang dapat menunjang pencapaian tujuan ekonomi suatu negara (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Secara umum, tahapan dalam proses rekayasa pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan negara diterjemahkan dalam tujuan pelaporan keuangan, sehingga pencapaian tujuan akuntansi dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.
2. Proses rekayasa mempertimbangkan berbagai ideologi, filosofi, paradigma, serta konsep dasar guna memastikan tujuan pelaporan keuangan tercapai. Ide yang dipilih harus sesuai dengan kondisi lingkungan penerapan akuntansi agar hasilnya efektif sebagai alat strategis.
3. Konsep yang diterapkan harus sesuai dengan standar akuntansi serta referensi lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum (PABU).
4. Hasil dari rekayasa pelaporan keuangan harus disampaikan melalui berbagai media informasi agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Pada intinya, proses ini bertujuan untuk menggambarkan aktivitas operasional perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sehingga pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi finansial perusahaan tanpa perlu menyaksikan langsung aktivitas operasionalnya.

Hendrikson menguraikan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses rekayasa guna membangun kerangka teoritis akuntansi, antara lain:

1. Pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik entitas pelapor dan lingkungannya.
2. Tujuan pelaporan keuangan yang berasal dari postulat tersebut.
3. Evaluasi kebutuhan informasi oleh pemangku kepentingan serta kemampuan mereka dalam memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi yang disajikan.
4. Penentuan aspek-aspek yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan.
5. Evaluasi terhadap metode pengukuran dan penyajian informasi guna memastikan efektivitas komunikasi data keuangan.
6. Identifikasi kendala dalam pengukuran dan deskripsi terkait unit usaha serta lingkungan bisnisnya.
7. Pengembangan dan penyusunan dokumen resmi sebagai pedoman dalam penyusunan standar akuntansi.
8. Perancangan sistem informasi akuntansi untuk menciptakan, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pihak yang Berperan dalam Perekayasaan Pelaporan Keuangan

Dalam proses Perekayasaan pelaporan keuangan, badan legislatif seperti DPR dan MPR memiliki peran utama, mengingat kerangka konseptual akuntansi berfungsi layaknya konstitusi dalam sistem keuangan. Badan legislatif membentuk komite khusus yang beranggotakan individu dengan keahlian akuntansi yang mendalam. Sebagai alternatif, penyediaan informasi dapat dilakukan melalui mekanisme pengaturan mandiri (self-regulation), di mana profesi dan pelaku bisnis memiliki tanggung jawab dalam menentukan standar pelaporan keuangan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa profesi akuntansi dan pelaku bisnis merupakan pihak yang paling

memahami kebutuhan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan.

D. Aspek Semantik dalam Perencanaan

Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fisis kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek statemen keuangan. Konsep informasi akuntansi Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Simbol-simbol (elemen-elemen) yang termuat dalam seperangkat statemen keuangan sebenarnya tidak mempunyai makna kalau tiap elemen di interpretasi sebagai objek yang berdiri sendiri. Artinya, statemen keuangan berisii rangkaian elemen-elemen baru dapat ditangkap maknanya kalau bentuk, isi dan susunannya diartikan secara kontekstual dengan pedoman yang disepakati. Informasi semantik ini harus ditangkap secara kontekstual melalui tiga komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen (*objects*), ukuran dalam unit moneter (*size*), dan hubungan (*relationship*) antar elemen. Proses Saksama Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perencanaan harus dilakukan melalui tahap - tahap prosedur yang saksama dan teliti. Berikut ini adalah proses saksama (*due process*) yang dilaksanakan FASB dalam menyusun pernyataan resmi (Statement of Financial Accounting Concepts No.6, 1985):

1. Mengevaluasi masalah
2. Mengadakan riset dan analisis
3. Menyusun dan mendistribusi
4. Memorandum Diskusi (*discussion memorandum*)
5. Mengadakan dengar pendapat umum (*public hearing*)
6. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan public atas Memorandum Diskusi
7. Menerbitkan draf awal standard (*exposure draft*) yang diusulkan.
8. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tentang ED

9. Memutuskan menerbitkan statemen atau tidak
10. Menerbitkan statemen yang bersangkutan

Kerangka konseptual dalam perikayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perikayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut rerangka konseptual. Tanpa adanya rerangka konseptual sebagai —konstitusil akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumen bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif dari pada perlakuan yang lain dalam rangka mencapai tujuan sosial atau ekonomik. Vernon (1990) menguraikan manfaat rerangka konseptual sebagai berikut:

1. Memberi pengarahannya atau pedomannya kepada badan yang bertanggungjawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi.
2. Menjadi acuan dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi yang di jumpai dalam praktek yang perlakuannya belum diatur dalam standar atau pedomannya spesifik.
3. Menentukan batas-batas pertimbangan (*bounds of judgment*) dalam penyusunan statemen keuangan.
4. Meningkatkan pemahaman pemakai statemen keuangan dan meningkatkan keyakinan terhadap statemen keuangan.
5. Meningkatkan keterbandingan statemen keuangan antar perusahaan. Pondasi (berupa konsep-konsep) dan penalaran-penalaran yang melekat pada rerangka konseptual itulah yang sebenarnya membentuk teori akuntansi sebagai penalaran logis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi standar dan praktek yang berjalan dan mengembangkan (memperbaikinya) standar dan praktek di masa datang.

Model Rerangka konseptual menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023):

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang suatu entitas yang berguna bagi

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang diberikan meliputi:

- a. Laporan Posisi keuangan (aset, liabilitas, dan ekuitas).
- b. Laporan Kinerja keuangan (pendapatan, beban, laba atau rugi).
- c. Laporan Arus kas entitas selama periode tertentu.

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan secara efektif, harus memiliki karakteristik berikut:

- a. Relevansi → Informasi harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis.
- b. Keandalan → Informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Dapat dibandingkan → Memungkinkan analisis antar periode dan antar entitas.
- d. Dapat dipahami → Penyajian informasi harus jelas dan dapat dimengerti oleh pengguna.

3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari lima unsur utama:

- a. Aset → Sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu.
- b. Liabilitas → Kewajiban entitas yang timbul akibat kejadian masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya.
- c. Ekuitas → Hak residual atas aset setelah dikurangi semua liabilitas.
- d. Pendapatan → Peningkatan manfaat ekonomi yang meningkatkan ekuitas.
- e. Beban → Penurunan manfaat ekonomi yang mengurangi ekuitas.

4. Pengakuan dan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

- a. Pengakuan → Suatu unsur laporan keuangan diakui jika memiliki manfaat ekonomi dan dapat diukur dengan andal.

- b. Pengukuran → Beberapa dasar pengukuran yang digunakan meliputi:
- 1) Biaya historis → Berdasarkan harga perolehan awal.
 - 2) Nilai wajar → Berdasarkan nilai pasar yang berlaku.
 - 3) Biaya kini → Berdasarkan harga saat ini untuk aset serupa.
 - 4) Nilai realisasi bersih → Berdasarkan jumlah yang dapat diterima setelah dikurangi biaya penjualan.
 - 5) Nilai kini → Berdasarkan nilai arus kas masa depan yang didiskontokan.

5. Asumsi Dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Dasar akrual adalah suatu konsep dalam akuntansi yang menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi diakui serta dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.
- b. Kelangsungan usaha (*going concern*) adalah adalah suatu asumsi dalam akuntansi yang menyatakan bahwa suatu entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak berniat atau dipaksa untuk menghentikan usahanya dalam waktu dekat.

Sebenarnya terdapat tiga istilah penting atau konsep penting yang sangat berbeda maknanya, yaitu :

1. Prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metoda dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan.
2. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan / negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.
3. PABU adalah suatu kerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (yuridis), teoritis, dan praktis.

Sebagai kerangka pedoman, PABU menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan menyangkut hal berikut ini :

1. Definisi, dalam hal ini PABU memberi batasan atau definisi berbagai elemen, pos, atau objek statemen keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai.
2. Pengukuran /Penilaian, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan.
3. Pengakuan, merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.
4. Penyajian dan Pengungkapan, dalam hal ini penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Rerangka konseptual seharusnya merupakan fondasi rerangka pedoman PABU. Walaupun demikian, karena rerangka konseptual disusun setelah banyak standar akuntansi diterbitkan, beberapa versi PABU menempatkan rerangka konseptual pada tingkat yang kurang autoratif. Tujuannya adalah agar akuntan publik tidak mengganti standar yang tidak sesuai dengan rerangka konseptual. Struktur Akuntansi Bila proses perekayasaan telah selesai serta di aplikasi, rerangka pedoman PABU telah ditentukan, dan secara operasional pelaporan keuangan telah berlangsung, maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi secara luas dapat dilukiskan dalam suatu diagram yang disebut dengan struktur akuntansi.

E. Struktur Akuntansi dalam Bentuk Diagram

Pelaporan keuangan merupakan proses penyusunan, penyajian, dan analisis informasi keuangan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan utama pelaporan keuangan diturunkan dari aspek sosial dan ekonomi, di mana informasi keuangan harus menyediakan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan entitas, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi. Kerangka konseptual pelaporan keuangan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Dasar yang digunakan adalah Prinsip Akuntansi Berterima Umum (GAAP), yang mencakup: Standar Akuntansi yang Berlaku, seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) atau PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia serta Prinsip Dasar Akuntansi, seperti kesesuaian, keandalan, keterbandingan, dan relevansi informasi keuangan. Adapun proses dalam Pelaporan Keuangan, Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan entitas secara transparan. Menurut PSAK 201 Komponen utama laporan keuangan meliputi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, 2016, 2023):

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya
2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Audit Laporan Keuangan yang telah disusun perlu diaudit oleh auditor independen untuk menilai apakah laporan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku tidak mengandung salah saji material yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil audit kemudian dituangkan dalam Laporan Auditor, yang memberikan opini

mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan. Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan setelah laporan keuangan disusun dan diaudit, berbagai pihak akan melakukan analisis untuk memahami kondisi keuangan entitas. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan, mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit.

Menurut PSAK 201, Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaporan Keuangan, Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan yang berbeda, di antaranya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023):

1. Investor untuk menilai profitabilitas dan prospek investasi.
2. Kreditor untuk menilai kemampuan entitas dalam membayar utang.
3. Pemerintah untuk keperluan perpajakan dan regulasi.
4. Pelanggan untuk menilai keberlanjutan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan mereka.
5. Masyarakat serta media dapat menggunakan laporan keuangan untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap praktik keberlanjutan (*sustainability*).
6. Karyawan menggunakan laporan keuangan untuk menilai keberlanjutan perusahaan dan keamanan pekerjaan mereka.
7. Pemasok perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utang dagang sesuai dengan perjanjian pembayaran

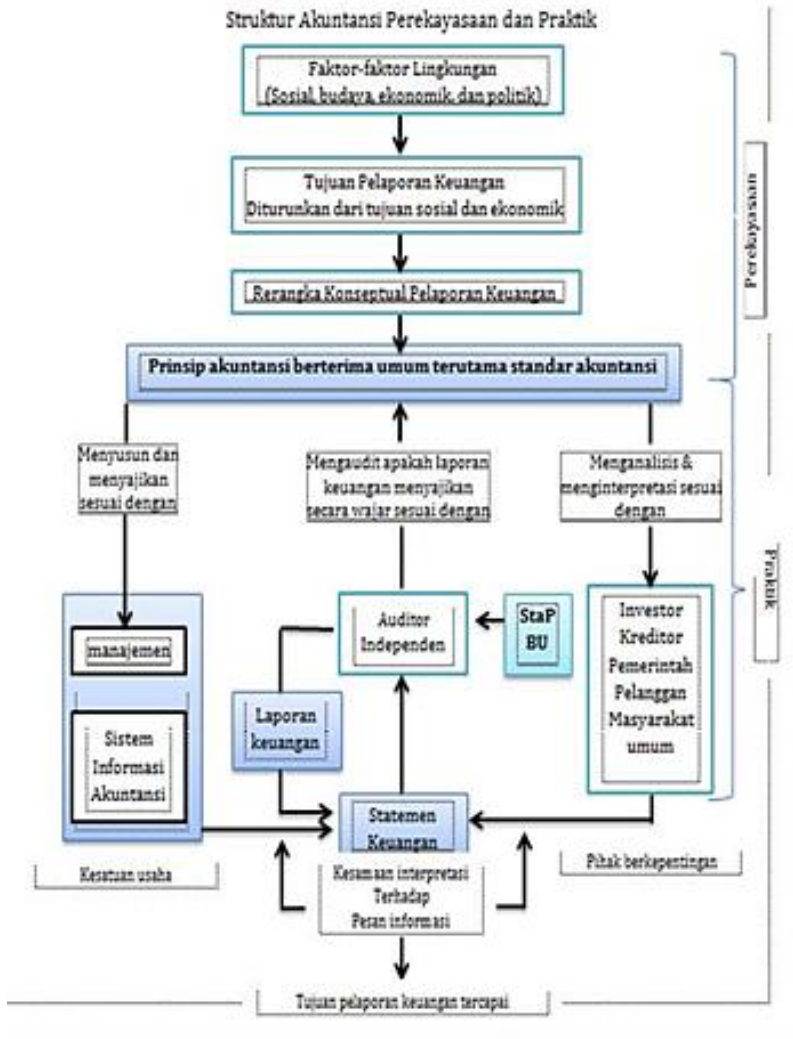
Informasi keuangan dapat dimanfaatkan secara efektif, maka diperlukan kesamaan interpretasi terhadap pesan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaporan Keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh standar dan prinsip akuntansi, tetapi juga oleh berbagai faktor lingkungan, antara lain (Scott, 1931) :

1. Faktor Sosial: Norma dan nilai sosial yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan.

2. Faktor Budaya: Perbedaan budaya di berbagai negara dapat memengaruhi cara laporan keuangan disusun dan ditafsirkan.
3. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi suatu negara atau industri dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pelaporan keuangan dapat dirancang agar lebih relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dapat disimpulkan bahwa rekayasa praktik dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi, diaudit secara independen, serta dianalisis dan diinterpretasikan oleh berbagai pihak. Dengan adanya standar yang jelas, audit yang ketat, serta kesamaan interpretasi informasi, tujuan pelaporan keuangan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Penjelasan di atas digambarkan pada gambar diagram berikut.

Struktur Akuntansi dalam Bentuk Diagram



Gambar 4.1 Struktur Akuntansi dalam Bentuk Diagram
Sumber: (Suwardjono, 2008)

F. Motivasi dan Faktor Pendorong Perekayasaan Pelaporan Keuangan

Perekayasaan pelaporan keuangan merupakan proses perancangan dan penyesuaian laporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan serta mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Motivasi utama dalam perekayasaan pelaporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, terdapat berbagai faktor pendorong yang memengaruhi praktik ini, termasuk faktor ekonomi, regulasi, persaingan bisnis, serta tekanan dari investor dan kreditor. Perkembangan teknologi dan sistem informasi keuangan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keakuratan pelaporan keuangan. Dengan memahami motivasi dan faktor pendorong ini, organisasi dapat merancang laporan keuangan yang lebih informatif, dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang memotivasi perekayasaan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut (Scott, 1931; Vernon, 1990):

1. Insentif Manajerial dan Kompensasi

Insentif manajerial dan kompensasi menjadi salah satu faktor utama dalam perekayasaan pelaporan keuangan, di mana manajemen memiliki dorongan untuk menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja positif guna memperoleh bonus, kenaikan gaji, atau insentif lainnya. Praktik ini sering dikaitkan dengan manajemen laba, di mana manajer dapat melakukan penyesuaian akuntansi untuk memenuhi target tertentu yang berdampak pada kompensasi mereka. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Tekanan Pasar dan Persaingan

Tekanan pasar dan persaingan mendorong perusahaan untuk melakukan perekayasa pelaporan keuangan guna menampilkan kinerja yang lebih baik dan menarik minat investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan mungkin terdorong untuk menyesuaikan laporan keuangan agar terlihat lebih stabil, menguntungkan, atau memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan demi mempertahankan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

3. Sistem Pengendalian Internal yang Lemah

Sistem pengendalian internal yang lemah dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan perekayasa pelaporan keuangan dengan cara memanipulasi data keuangan tanpa terdeteksi. Ketidakefektifan dalam pengawasan, kurangnya pemisahan tugas, serta lemahnya prosedur audit internal dapat meningkatkan risiko penyajian informasi keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan. Tanpa mekanisme kontrol yang ketat, perusahaan dapat lebih mudah melakukan praktik manajemen laba, rekayasa pendapatan, atau bahkan tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sanksi hukum dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan integritas laporan keuangan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Perusahaan.

4. Regulasi dan Pengawasan Eksternal

Regulasi dan pengawasan eksternal memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi perikayasaan pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan prinsip transparansi yang berlaku. Lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta regulator pasar modal lainnya memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan penegakan aturan guna mencegah penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Regulasi yang ketat, kewajiban audit independen, serta implementasi sistem pelaporan yang lebih transparan dapat membantu mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas pasar keuangan. Selain itu, regulator juga memiliki peran dalam menetapkan standar akuntansi yang relevan dengan perkembangan bisnis serta memastikan adanya keterbukaan informasi yang memadai bagi para pemangku kepentingan. Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan melalui kewajiban pelaporan berkala, pengungkapan informasi material, serta pelaksanaan audit yang lebih ketat bertujuan untuk mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan pemegang saham dan masyarakat luas.

Regulasi yang efektif harus disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti denda besar, pembekuan izin usaha, atau bahkan tuntutan pidana bagi pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi dan pengawasan eksternal yang kuat, diharapkan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara jujur, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

G. Teknik Perencanaan Pelaporan Keuangan

Teknik Perencanaan Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang masih sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) (Statement of Financial Accounting Concepts No.6, 1985). Teknik-teknik ini digunakan untuk menampilkan laporan keuangan dalam kondisi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, tetapi tetap dalam batas aturan yang diperbolehkan. Berikut beberapa teknik yang umum digunakan:

1. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Manajemen laba adalah teknik di mana manajer menggunakan kebijakan akuntansi yang fleksibel untuk mengatur angka laba yang dilaporkan tanpa melanggar standar akuntansi. Adapun jenis-jenis teknik manajemen laba yaitu:

- a. *Income Smoothing* (Perataan Laba): Mengatur pengakuan pendapatan dan beban agar laba terlihat lebih stabil dari periode ke periode.
- b. *Big Bath Accounting*: Mencatat beban besar dalam satu periode agar laba di masa depan terlihat lebih baik.
- c. *Window Dressing*: Melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sebelum periode tertentu, misalnya sebelum IPO atau pengajuan pinjaman.

2. Rekognisi Pendapatan yang Dipercepat (*Revenue Recognition Manipulation*)

Teknik ini dilakukan dengan mempercepat pengakuan pendapatan yang sebenarnya belum sepenuhnya terealisasi, sehingga laporan keuangan menunjukkan laba yang lebih tinggi. Berikut contoh *revenue recognition manipulation*:

- a. Mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang lebih awal daripada yang seharusnya.
- b. Mencatat penjualan fiktif atau mempercepat pencatatan penjualan sebelum produk benar-benar dikirim.

3. Penundaan atau Percepatan Pengakuan Beban (*Expense Recognition Manipulation*)

Teknik ini digunakan untuk mengatur laba bersih dengan menunda atau mempercepat pengakuan beban operasional. Berikut contoh *expense recognition manipulation*:

- a. Menunda pengakuan biaya: Misalnya, menunda pencatatan biaya penyusutan atau pengeluaran riset dan pengembangan untuk meningkatkan laba tahun berjalan.
- b. Mempercepat pencatatan biaya: Digunakan dalam strategi *Big Bath Accounting*, di mana perusahaan mencatat seluruh beban dalam satu periode untuk membersihkan laporan keuangan di masa depan.

4. Manipulasi Estimasi Akuntansi

Standar akuntansi memperbolehkan perusahaan membuat estimasi dalam beberapa aspek keuangan, seperti penyusutan aset, cadangan piutang tak tertagih, dan provisi kewajiban. Teknik ini sering digunakan untuk memengaruhi laba bersih. Berikut contoh manipulasi estimasi akuntansi:

- a. Cadangan Kerugian Piutang (*Allowance for Doubtful Accounts*): Perusahaan bisa mengubah estimasi jumlah piutang tak tertagih untuk meningkatkan atau menurunkan laba.
- b. Penyusutan Aset (*Depreciation Estimates*): Mengubah metode penyusutan atau umur manfaat aset agar mempengaruhi beban penyusutan dan laba bersih.

5. Reklasifikasi atau Revisi Penyajian Laporan Keuangan

Teknik ini digunakan untuk mengubah cara penyajian item dalam laporan keuangan agar terlihat lebih menguntungkan. Contoh reklasifikasi penyajian laporan keuangan:

- a. Mengelompokkan beban operasional sebagai beban non-operasional agar tidak terlalu berpengaruh pada laba operasional.
- b. Mengubah klasifikasi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang untuk memperbaiki rasio likuiditas.

6. Pengelolaan Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management*)

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan strategi keuangan yang dilakukan perusahaan untuk memastikan keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki (aset) dan kewajiban yang harus dipenuhi (liabilitas) guna menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas jangka panjang. Dalam konteks perikayasaan pelaporan keuangan, perusahaan dapat mengatur pengakuan, klasifikasi, atau waktu pencatatan aset dan liabilitas agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih menguntungkan. Misalnya, perusahaan dapat menunda atau mempercepat investasi dalam aset tetap untuk mengontrol beban penyusutan atau mengubah struktur utang dengan melakukan restrukturisasi kewajiban guna mengurangi beban bunga dalam periode tertentu. Teknik ini sering digunakan untuk meningkatkan rasio keuangan, seperti likuiditas dan solvabilitas, yang berpengaruh terhadap persepsi investor dan kreditor. Meskipun teknik ini masih dalam batas kepatuhan terhadap standar akuntansi, jika tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan serta meningkatkan risiko keuangan perusahaan di masa depan.

H. Penilaian dan Deteksi Perikayasaan Pelaporan Keuangan

1. Analisis Rasio dan Indikator Keuangan

Analisis rasio dan indikator keuangan merupakan alat penting dalam perikayasaan pelaporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja serta kondisi finansial perusahaan. Perusahaan sering kali memanfaatkan berbagai rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas, untuk menciptakan citra keuangan yang lebih menguntungkan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE) dapat ditingkatkan dengan mempercepat pengakuan pendapatan

atau menunda pencatatan biaya, sehingga laba bersih tampak lebih tinggi. Selain itu, rasio likuiditas seperti Current Ratio dan Quick Ratio dapat dimanipulasi dengan mengklasifikasikan utang jangka pendek sebagai utang jangka panjang, sehingga perusahaan terlihat lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan juga dapat menggunakan strategi tertentu dalam pencatatan aset dan liabilitas untuk mempengaruhi rasio solvabilitas, seperti Debt to Equity Ratio (DER), guna meningkatkan daya tarik bagi kreditor. Meskipun analisis rasio ini membantu dalam pengambilan keputusan, jika digunakan secara tidak etis dalam perikayasaan pelaporan keuangan, dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengurangi transparansi informasi keuangan.

2. Audit Forensik dan Investigasi Independen

Audit forensik dan investigasi independen memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi serta mencegah praktik perikayasaan pelaporan keuangan yang dapat merugikan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Audit forensik dilakukan dengan pendekatan investigatif yang lebih mendalam dibandingkan audit keuangan biasa, menggunakan teknik analisis data, wawancara, serta penelusuran transaksi untuk mengungkap adanya manipulasi laporan keuangan, kecurangan (fraud), atau penyimpangan akuntansi. Tim auditor forensik dan investigasi independen bertugas untuk mengungkap praktik rekayasa seperti manajemen laba, pengakuan pendapatan fiktif, atau penyembunyian kewajiban yang tidak dilaporkan, yang sering kali dilakukan untuk meningkatkan citra keuangan perusahaan. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui audit forensik yang ketat dan investigasi independen yang objektif, praktik perikayasaan laporan keuangan dapat diminimalkan,

sehingga integritas informasi keuangan tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap perusahaan tetap terpelihara.

3. Peran Teknologi dalam Deteksi Dini

Peran teknologi dalam deteksi dini perekayasaan pelaporan keuangan semakin krusial seiring dengan perkembangan sistem informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data keuangan. Teknologi seperti Big Data Analytics, Machine Learning, dan Artificial Intelligence (AI) memungkinkan auditor dan regulator untuk mendeteksi pola tidak wajar dalam laporan keuangan yang dapat mengindikasikan adanya manipulasi atau rekayasa akuntansi. Perangkat lunak audit berbasis AI dapat menganalisis ribuan transaksi dalam waktu singkat, mengidentifikasi anomali, serta mengungkap ketidakwajaran dalam pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan estimasi akuntansi. Selain itu, teknologi *Blockchain* juga berperan dalam meningkatkan transparansi dengan menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan. Dengan penerapan teknologi ini, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi serta mencegah upaya perekayasaan keuangan, sementara regulator dan auditor memiliki alat yang lebih canggih untuk memastikan akurasi serta keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada publik.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis dalam mencegah dan mendeteksi perekayasaan pelaporan keuangan, serta memastikan transparansi dan akurasi informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang efektif mencakup berbagai mekanisme, seperti pemisahan tugas (*segregation of duties*), kebijakan dan prosedur yang jelas, serta pengawasan internal yang ketat untuk mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem pengendalian internal,

seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi terintegrasi dan otomatisasi proses keuangan, dapat membantu mengurangi risiko human error serta meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Peran komite audit dan manajemen risiko juga sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta regulasi yang berlaku. Dengan adanya penguatan sistem pengendalian internal, praktik perekayasaan laporan keuangan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan tetap terjaga. **Peran dan Tantangan IFRS dalam Mencegah Perekayasaan**

I. Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam perekayasaan pelaporan keuangan merupakan aspek krusial dalam menjaga keandalan informasi keuangan yang digunakan oleh investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu pendekatan utama adalah memperkuat regulasi dan standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dan International Financial Reporting Standards (IFRS) di tingkat global. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam memastikan perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menerapkan prinsip transparansi dalam penyajian laporan keuangan (Sikka, 2009; Statement of Financial Accounting Concepts No.6, 1985).

Selain pengawasan dari regulator, penguatan sistem pengendalian internal juga menjadi kunci dalam mencegah perekayasaan laporan keuangan. Perusahaan harus menerapkan kebijakan pemisahan tugas (*segregation of duties*), mekanisme persetujuan berlapis, serta audit internal yang efektif untuk mendeteksi potensi manipulasi laporan keuangan sejak dini. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang canggih dan berbasis teknologi juga dapat meningkatkan akurasi dan

keandalan pencatatan transaksi, sehingga mengurangi peluang rekayasa keuangan yang disengaja.

Audit independen dan audit forensik juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi dan mengungkap indikasi perekayasa laporan keuangan. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi, sementara audit forensik menggunakan teknik investigatif untuk mengungkap kemungkinan kecurangan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya transparansi dan pengawasan yang ketat, risiko terjadinya praktik manajemen laba atau rekayasa akuntansi yang dapat merugikan pemangku kepentingan dapat diminimalkan (Doyle *et al.*, 2006; Ellein & Sherlly, 2023). Selain aspek regulasi dan audit, peran etika dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) juga menjadi faktor utama dalam mencegah perekayasa pelaporan keuangan. Perusahaan harus menerapkan budaya kepatuhan, di mana integritas dan transparansi menjadi prioritas dalam penyajian laporan keuangan. Dewan direksi, komite audit, serta manajemen harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap keputusan keuangan yang diambil.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi seperti Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan Blockchain juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan deteksi dini terhadap praktik rekayasa laporan keuangan. Teknologi ini memungkinkan auditor dan regulator untuk menganalisis pola keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga indikasi anomali dalam laporan keuangan dapat diidentifikasi lebih awal. Dengan kombinasi pendekatan regulasi yang ketat, sistem pengendalian internal yang kuat, audit yang mendalam, serta pemanfaatan teknologi canggih, risiko perekayasa pelaporan keuangan dapat ditekan, sehingga integritas laporan keuangan perusahaan tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha semakin meningkat.

J. Prospek dan Tantangan Masa Depan

Prospek dan tantangan masa depan dalam perikayasaan pelaporan keuangan akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, regulasi yang lebih ketat, serta meningkatnya kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas di dunia bisnis. Dengan kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, dan Blockchain, deteksi dini terhadap manipulasi laporan keuangan akan menjadi lebih canggih dan akurat. Teknologi ini memungkinkan auditor, regulator, serta investor untuk menganalisis data keuangan secara lebih mendalam, mengidentifikasi pola anomali, dan mengungkap indikasi kecurangan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, digitalisasi laporan keuangan melalui sistem otomatis akan mengurangi potensi kesalahan manusia serta mempercepat proses audit dan analisis keuangan (Cug & Cugova, 2021; Healy & Wahlen, 1999; Lo, 2008).

Di sisi regulasi, prospek ke depan menunjukkan adanya penguatan kebijakan dan standar akuntansi yang lebih transparan serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan yang terlibat dalam perikayasaan laporan keuangan. Lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), serta organisasi standar akuntansi global seperti International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) terus melakukan revisi dan pembaruan aturan untuk mengatasi celah yang sering dimanfaatkan dalam manipulasi laporan keuangan. Regulasi yang lebih ketat diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor dan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Namun, meskipun prospek pengendalian perikayasaan laporan keuangan semakin baik, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas bisnis modern yang semakin meningkat, di mana perusahaan menggunakan struktur keuangan yang lebih rumit, termasuk entitas anak, transaksi lintas negara, serta instrumen keuangan derivatif yang dapat dimanfaatkan untuk

menyembunyikan atau merekayasa angka dalam laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tekanan pasar yang tinggi, terutama dalam industri yang kompetitif, yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan perekayasaan laba guna memenuhi ekspektasi investor dan mempertahankan harga saham.

Tantangan lainnya adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi dan standar akuntansi yang terus berkembang. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan sistem pelaporan mereka dengan regulasi baru, terutama bagi perusahaan multinasional yang harus mematuhi berbagai standar di negara yang berbeda. Di sisi lain, kurangnya kesadaran dan literasi keuangan di kalangan investor dan pemangku kepentingan masih menjadi kendala dalam mengidentifikasi rekayasa laporan keuangan, sehingga praktik ini masih dapat terjadi tanpa terdeteksi secara luas (Pregowska *et al.*, 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan harus berinvestasi dalam sistem pengendalian internal yang lebih kuat, meningkatkan kompetensi tenaga akuntansi dan keuangan, serta menerapkan budaya transparansi yang berbasis pada etika bisnis yang tinggi. Selain itu, peran auditor, baik internal maupun eksternal, harus lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi dan metode audit berbasis data untuk mendeteksi perekayasaan laporan keuangan secara lebih efektif. Ke depan, kombinasi antara kemajuan teknologi, regulasi yang lebih ketat, peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi, serta peran pendidikan yang lebih kuat akan menjadi faktor kunci dalam mencegah dan mengendalikan perekayasaan pelaporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik serta praktik pelaporan yang lebih akurat dan akuntabel, diharapkan integritas laporan keuangan dapat terus terjaga, sehingga kepercayaan publik dan investor terhadap dunia bisnis tetap kuat.

K. Kesimpulan

Perekayasaan pelaporan keuangan adalah praktik yang dilakukan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan cara tertentu agar terlihat lebih menguntungkan, baik secara legal maupun manipulatif. Praktik ini sering kali didorong oleh insentif manajerial, tekanan pasar, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Regulasi yang ketat, seperti IFRS dan GAAP, serta peran auditor independen sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Berbagai teknik digunakan dalam perekayasaan, seperti manajemen laba, manipulasi pengakuan pendapatan dan beban, serta pengelolaan aset dan liabilitas. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, audit forensik, pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data, serta penerapan sistem pengendalian internal yang lebih ketat. Tantangan ke depan meliputi kompleksitas bisnis, perubahan regulasi, serta tekanan pasar yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kombinasi antara regulasi yang ketat, teknologi canggih, serta peningkatan kesadaran etika bisnis menjadi kunci utama dalam mengendalikan perekayasaan laporan keuangan demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, V., Martusa, R., & Meythi. (2011). Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Education, Business, Environmental Science*, 1(2).
- Cug, J., & Cugova, A. (2021). Relationship between Earnings Management and Earnings quality in the Globalized Business Environment. *SHS Web of Conferences*, 92, 02011. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202011>
- Doyle, J., Ge, W., Mcvay, S., Bartov, E., Byard, D., Dechow, P., Dichev, I., Feng, M., Hafzalla, N., Imhoff, G., Kolev, K., Leone, A., Li, F., Lundholm, R., Morsfield, S., Peterson, K., Ryan, S., Shakespeare, C., & Zimmerman, J. (2006). *Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting* *.
- Ellein, Y., & Sherlly, F. K. (2023). The Effect of Internal Control System, Information Technology, and Application of Regional Financial Accounting Systems on The Financial Accountability of The Regional Gove. *Eurasia: Economics & Business*, 1(67), 3–10. <https://www.researchgate.net/publication/368690787>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Heridiansyah, J., & Sijadi. (2011). Fungsi Manajemen Dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*, 3(2).
- Hidayat, F., & Nizar, M. (2021). MODEL ADDIE (ANALYSIS, DESIGN, DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam (JIPAI)*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.15575/jipai.v1i1.11042>

- IFRS Foundation. (2018). *Annual Report 2018 IFRS FOUNDATION*.
www.ifrs.org/about-us/who-we-are.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan*. 316.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Imaduddin, M. (2013). MODUL Q-SETS" SEBAGAI REKAYASA BAHAN AJAR KIMIA YANG BERMUATAN QUANTUM LEARNING DAN BERVISI SALINGTEMAS. *Jurnal Pendidikan Sains*, 1(1).
- Lo, K. (2008). Earnings management and earnings quality. *Journal of Accounting and Economics*, 45(2-3), 350-357.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.08.002>
- Pregowska, A., Masztalerz, K., Garlińska, M., & Osial, M. (2021). A worldwide journey through distance education—from the post office to virtual, augmented and mixed realities, and education during the covid-19 pandemic. In *Education Sciences* (Vol. 11, Issue 3). MDPI AG.
<https://doi.org/10.3390/educsci11030118>
- Scott, W. R. (1931). *Financial Accounting Theory* (2nd ed.). Prentice Hall, Inc.
- Sikka, P. (2009). Financial crisis and the silence of the auditors. *Accounting, Organizations and Society*, 34(6-7), 868-873.
<https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.01.004>
- Statement of Financial Accounting Concepts No.6, Financial Accounting Foundation (1985).
- Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Ketiga). BPFE.
- Vernon, K. (1990). *Accounting Theory* (1st ed.). Yadiati.

TENTANG PENULIS



Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Ak., CA.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Penulis lahir di Tanjung Karang tanggal 25 Mei 1983. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung, dan Pendidikan S2 Magister Akuntansi (Maksi) pada Universitas Gadjah Mada serta Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan, dengan fokus penelitian pada bidang Akuntansi Keuangan. Motivasi penulis adalah *“Jangan Pernah Lelah Menuntut Ilmu; Ilmu Akan Selalu Menuntun Kita Pada Cita-Cita yang akan Kita Capai”*

BAB

5

STANDAR - STANDAR AKUNTANSI

Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Universitas Perwira Purbalingga

A. Pendahuluan

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari penerapan berbagai tekniknya. Kerangka ini terdiri dari standar serta praktik yang diterima secara luas karena manfaat dan logikanya. Standar tersebut dikenal sebagai standar akuntansi, yang di Indonesia awalnya dinamakan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), kemudian berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan saat ini disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar akuntansi terus berkembang seiring dengan dinamika bisnis global, regulasi yang berlaku, dan faktor lainnya. Standar Akuntansi yang baik membantu memastikan bahwa laporan keuangan lebih bermanfaat, dapat dibandingkan, tidak menyesatkan serta meningkatkan transparansi perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan menetapkan metode dan format baku dalam penyajian informasi keuangan. Beberapa standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia meliputi PSAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK EP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.

B. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*

IFRS adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*, sebelumnya dikenal sebagai *International Accounting Standards Committee (IASC)*. Standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaporan akuntansi bagi negara-negara di seluruh dunia (Nelvirita, Agustin and Taqwa, 2015). IFRS, sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengharmonisasi standar akuntansi secara global, memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan banyak negara dalam proses penyusunannya, yang memungkinkan integrasi berbagai kepentingan serta karakteristik standar akuntansi dari masing-masing negara.

IFRS bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang disertakan dalam laporan keuangan tahunan menyajikan informasi berkualitas tinggi, transparan, dan dapat diperbandingkan sepanjang periode yang dilaporkan. Selain itu, IFRS juga berfungsi sebagai landasan yang memadai untuk akuntansi berbasis IFRS serta memberikan manfaat bagi pengguna yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Adapun manfaat dari adanya standar global dalam pelaporan keuangan meliputi:

1. Pasar modal menjadi lebih terintegrasi secara global, memungkinkan pergerakan modal investasi tanpa hambatan yang signifikan. Penggunaan standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi secara konsisten di seluruh dunia dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal.
2. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan.
3. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam hal merger dan akuisisi.

4. Ide-ide terbaik yang muncul dari proses penyusunan standar dapat diterapkan untuk mengembangkan standar global dengan kualitas tertinggi.

C. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Standar akuntansi umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi, dan masyarakat. Di Indonesia, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prosesnya melibatkan diskusi dan dengar pendapat dengan kalangan profesional serta akademisi, sebelum akhirnya ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI. Sementara itu, di Amerika Serikat, lembaga yang berwenang untuk menetapkan standar akuntansi adalah *Financial Accounting Standards Board* (FASB), yang beroperasi secara independen tanpa pengaruh langsung dari profesi.

Tahun 1973, pada awalnya standar Akuntansi di Indonesia bernama Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Kemudian PAI berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tahun 1994 dan mulai menyesuaikan standar akuntansi internasional. Pada tahun 2009, IAI menginisiasi program konvergensi Standar Akuntansi Keuangan ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS *Standards*) secara bertahap. Per 1 Juni 2012, SAK telah mengacu pada IFRS *Standards* per 1 Januari 2009. Efektif sejak 1 Januari 2015, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia secara umum telah berkonvergensi dengan IFRS *Standards* yang berlaku per 1 Januari 2014. SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 mencakup tambahan PSAK baru. Sementara itu, per 1 Januari 2022, SAK mengalami pembaruan dengan penambahan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan Standar akuntansi sebagai metode yang seragam dalam penyajian informasi, sehingga laporan keuangan

dari berbagai perusahaan dapat lebih mudah dibandingkan. Standar ini mencakup kumpulan konsep, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih serta diterima secara umum. Standar Akuntansi Keuangan digunakan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan mengatur dua aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan yaitu standar pengungkapan dan standar pengukuran. Standar pengungkapan menentukan apa dan bagaimana suatu kejadian, transaksi, atau informasi keuangan harus diungkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan standar pengukuran mengatur bagaimana setiap transaksi yang terjadi harus diukur dan dicatat dalam laporan keuangan. Standar ini menetapkan metode dan dasar pengukuran yang digunakan seperti biaya historis, nilai wajar atau metode lainnya untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat, konsisten dan dapat diandalkan (Nabilah, 2023)

Tahun 2012 menjadi momen bersejarah karena pada tahun tersebut Indonesia mulai menerapkan PSAK berbasis IFRS. Adopsi penuh IFRS tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya meninggalkan standar akuntansinya sendiri dan langsung menggunakan IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap menjalankan proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia serta melakukan analisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi hukum dan bisnis di Indonesia. Jika diperlukan, DSAK dapat menetapkan pengecualian dalam penerapan IFRS atau sebaliknya menambahkan aturan dalam standar tersebut (Satria, 2016). IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama, yaitu:

1. *Principle Based*

Standar yang berbasis *principles-based* hanya menetapkan aturan utama dalam standar, sementara prosedur dan kebijakan rinci diserahkan kepada pengguna. Pendekatan ini mengatur prinsip pengakuan berdasarkan

substansi ekonomi, bukan sekadar ketentuan rinci dalam atribut kontrak perjanjian. Sebaliknya, standar yang berbasis *rule-based* menetapkan ketentuan pengakuan akuntansi secara lebih rinci. Keunggulan pendekatan *rule-based* adalah mencegah penyusunan perjanjian atau transaksi yang semata-mata disesuaikan agar sesuai dengan aturan dalam konsep pengakuan.

2. Nilai wajar

Standar akuntansi banyak menerapkan konsep nilai wajar (*fair value*) untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Penggunaan nilai wajar dianggap lebih relevan karena mencerminkan nilai terkini dari suatu aset atau liabilitas, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan suatu entitas.

3. Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan diperlukan agar pengguna dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan penting terkait dengan isi laporan serta kejadian signifikan yang berhubungan dengan item tersebut. Pengungkapan ini dapat mencakup kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, serta komitmen yang perlu diketahui oleh pemangku kepentingan.

E. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal tersebut dapat mencakup pemilik yang tidak terlibat langsung dalam operasional bisnis, kreditur, serta lembaga pemeringkat kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011)

SAK ETAP dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat mempermudah akses ETAP terhadap pendanaan perbankan. Standar ini bersifat mandiri dan tidak merujuk pada SAK Umum, dengan sebagian besar prinsipnya berbasis pada konsep biaya historis. SAK ETAP mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP dengan pendekatan yang lebih sederhana dalam perlakuan akuntansi serta relatif stabil tanpa banyak perubahan dalam jangka waktu tertentu.

Setelah lebih dari satu dekade sejak diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009, SAK ETAP resmi digantikan setelah disahkannya Draf Eksposur SAK EP pada 29 Juli 2020. SAK EP akan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2025, menggantikan SAK ETAP yang sebelumnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan akuntansi di berbagai industri. SAK EP, atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat, merupakan standar yang akan menggantikan SAK ETAP. Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola laporan keuangan agar lebih komprehensif dan dinamis, sehingga lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan akuntansi saat ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, standar akuntansi keuangan ini diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Beberapa contoh entitas yang termasuk dalam kategori ini adalah pengusaha UKM, bisnis keluarga, organisasi nirlaba, praktik profesional independen, entitas yang sahamnya tidak diperdagangkan secara publik, serta koperasi dan asosiasi. Namun, entitas dengan akuntabilitas publik juga dapat menerapkan SAK EP, asalkan diperbolehkan oleh regulasi dari otoritas yang berwenang.

F. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

SAK EP adalah standar akuntansi yang dirancang untuk memenuhi keperluan pelaporan keuangan bagi entitas privat. Meskipun memiliki kesamaan dengan SAK, standar ini memiliki

beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik entitas privat. Penerapan SAK EP diwajibkan bagi entitas privat yang memenuhi kriteria tertentu. SAK EP diadopsi dari *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities* (IFRS for SMEs) dengan melalui proses evaluasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi di Indonesia (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2021). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) disahkan oleh DSAK IAI pada 30 Juni 2021.

DSAK IAI menyusun SAK EP karena menilai bahwa SAK ETAP terlalu sederhana dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan penyusunan laporan keuangan entitas privat di tengah pesatnya perkembangan dunia bisnis. Peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP memberikan fleksibilitas lebih bagi entitas bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, bagi entitas privat yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, diperlukan kebijakan akuntansi yang lebih akurat dalam mencerminkan kinerja mereka (Aprilia *et al.*, 2025)

SAK EP memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan SAK ETAP. Salah satu perubahan mencakup penyesuaian nama dalam komponen laporan keuangan, di mana "Neraca" yang sebelumnya digunakan dalam SAK ETAP diubah menjadi "Laporan Posisi Keuangan." Selain itu, "Laporan Laba Rugi" diubah menjadi "Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laba Rugi."

Dalam penyajian Laporan Arus Kas, SAK ETAP hanya memperbolehkan metode tidak langsung, sedangkan SAK EP memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan entitas memilih antara metode langsung atau tidak langsung. Perubahan lainnya terdapat pada metode pengukuran investasi dalam Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama. Jika sebelumnya SAK ETAP hanya memperbolehkan metode biaya (*cost method*), maka dalam SAK EP entitas diberikan pilihan untuk menggunakan metode biaya, metode nilai wajar, atau metode ekuitas.

Dalam SAK ETAP, pengaturan pajak penghasilan hanya dibahas secara singkat dengan merujuk pada peraturan pajak yang berlaku. Namun, dalam SAK EP, pengaturan pajak penghasilan lebih komprehensif, mencakup aspek seperti pengakuan pajak tangguhan, acuan pengenaan pajak atas aset dan kewajiban, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, serta mekanisme saling hapus antara pajak kini dan pajak tangguhan.

Dalam SAK ETAP, aset tetap tidak berwujud tidak mencakup pengakuan *goodwill*, sedangkan dalam SAK EP, *goodwill* diakui sebagai bagian dari aset tidak berwujud. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pengaturan liabilitas dan ekuitas. SAK ETAP hanya membahas secara ringkas klasifikasi instrumen keuangan, seperti surat pengakuan utang, obligasi, saham, dan derivatif. Sementara itu, SAK EP memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait klasifikasi dan perlakuan instrumen keuangan tersebut.

G. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS)

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia yang sangat pesat membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam semakin meningkat. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, pegadaian syariah, koperasi Syariah, BMT, serta berbagai institusi keuangan syariah lainnya.

Standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari peran AAOIFI dan IAI. AAOIFI, atau *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1991 dengan kantor pusat di Bahrain. Lembaga ini berperan dalam mengembangkan standar akuntansi dan audit khusus untuk lembaga keuangan syariah, yang telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dengan sistem keuangan syariah. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI diakui secara luas dan menjadi acuan

utama bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, transaksi keuangan syariah berpedoman pada PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah). PSAK Syariah merupakan seperangkat aturan akuntansi yang mengatur praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah. Standar ini mencakup berbagai aspek akuntansi dan pelaporan keuangan yang harus dipatuhi oleh bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, serta lembaga keuangan Islam lainnya yang menyediakan produk keuangan syariah di Indonesia. Dalam proses penyusunannya, standar ini selalu merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025)

PSAK Syariah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan riba, spekulasi berlebihan (gharar), perjudian (maisir), serta ketentuan lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Standar ini juga mengatur tata cara pelaporan keuangan agar dapat mencerminkan transaksi dan kondisi keuangan lembaga keuangan syariah dengan akurat dan berintegritas. Selain itu, PSAK Syariah bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam praktik keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini, PSAK Syariah mencakup PSAK 101 hingga PSAK 112, yang mengatur berbagai aspek akuntansi dalam keuangan syariah. Di antaranya:

1. **PSAK 101:** Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. **PSAK 102:** Akuntansi Murabahah
3. **PSAK 103:** Akuntansi Salam
4. **PSAK 104:** Akuntansi Istishna
5. **PSAK 105:** Akuntansi Mudharabah
6. **PSAK 106:** Akuntansi Musyarakah
7. **PSAK 107:** Akuntansi Ijarah
8. **PSAK 108:** Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

9. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

10. PSAK 110: Akuntansi Sukuk

11. PSAK 111: Akuntansi Wa'd

12. PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Standar-standar ini dirancang untuk memastikan bahwa praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip Syariah dan memenuhi kebutuhan transparansi serta akuntabilitas.

H. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP memiliki kekuatan hukum dan berperan sebagai persyaratan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yang mencakup Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, serta satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Penerapan SAP berlaku jika berdasarkan peraturan perundang-undangan, satuan organisasi tersebut diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur penyajian berbagai pos dalam laporan keuangan, seperti kas, piutang, aset tetap, dan lainnya. Berdasarkan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal, entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pokok berikut: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas Laporan Keuangan Sementara itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal mewajibkan entitas pelaporan untuk menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok, yang terbagi ke dalam dua jenis pelaporan, yaitu : (1) Pelaporan finansial berbasis akruwal; (2) Pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas; (3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan finansial mencakup:

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. LRA Berbasis Kas, dan
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

I. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan dapat diterapkan oleh entitas yang memenuhi kriteria entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana diatur dalam SAK ETAP, serta sesuai dengan karakteristik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM secara eksplisit menetapkan konsep entitas bisnis sebagai asumsi dasar. Oleh karena itu, untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan standar ini, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan serta hasil usaha entitas tersebut, serta membedakan antara satu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang lebih sederhana karena hanya mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Dasar pengukuran dalam SAK EMKM sepenuhnya menggunakan biaya historis, sehingga entitas cukup mencatat aset dan liabilitas berdasarkan biaya perolehannya. Meskipun demikian, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan SAK EMKM tetap perlu mengevaluasi apakah standar ini sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan mereka. Oleh karena itu, pemilihan antara SAK EMKM atau SAK lainnya harus mempertimbangkan kemudahan yang ditawarkan oleh SAK EMKM serta kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan.

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), penerapan SAK EMKM dalam pencatatan keuangan meliputi penyajian tiga jenis laporan keuangan utama, yaitu:

1. **Laporan Posisi Keuangan.** Laporan ini menjadi acuan dalam pengembangan usaha karena dapat digunakan untuk merencanakan masa depan bisnis. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan keuangan.
2. **Laporan Laba Rugi.** Laporan laba rugi menggambarkan kinerja usaha dalam suatu periode. Berdasarkan IAI (2016), laporan ini mencakup:
 - a. **Penghasilan (income):** Peningkatan manfaat ekonomi berupa kenaikan aset, arus kas masuk, atau penurunan kewajiban yang berdampak pada naiknya ekuitas, kecuali yang berasal dari investasi pemilik.
 - b. **Beban (expenses):** Penurunan manfaat ekonomi berupa pengurangan aset, arus kas keluar, atau peningkatan kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas, misalnya beban keuangan dan beban pajak.
3. **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).** CALK memberikan rincian dan tambahan informasi atas pos-pos tertentu yang relevan. Menurut IAI (2016), CALK mencakup:
 - (1) Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
 - (2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - (3) Informasi tambahan dan rincian mengenai transaksi penting serta material yang membantu pengguna memahami laporan keuangan dengan lebih baik.

J. Kesimpulan

Dalam praktiknya, standar akuntansi di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu agar selaras dengan perkembangan dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Perubahan ini menuntut para pelaku usaha serta instansi atau lembaga untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menerapkan standar akuntansi yang berlaku, baik entitas bisnis

maupun instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan agar sesuai dengan standar internasional. Penerapan ini berdampak positif pada berbagai aspek, seperti meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap transparansi serta akuntabilitas keuangan. Selain itu, standar akuntansi yang jelas dan terstruktur juga mempermudah proses audit keuangan, sehingga perusahaan dapat lebih efisien dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. *et al.* (2025) 'Optimalisasi penerapan sak entitas privat pada laporan keuangan PT XYZ', *Land Journal*, 6, pp. 232–241.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2021) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2016) *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2025) *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nabilah, D. (2023) 'ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK EMKM (STANDAR AKUNTANSI ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) PADA UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM GALERI BUKET SIDOARJO)', *Jurnal Akuntansi Revenue*, 3(2), pp. 625–637. Available at: <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.134>.
- Nelvirita, Agustin, H. and Taqwa, S. (2015) 'KESIAPAN DOSEN AKUNTANSI DALAM MENGINTEGRASIKAN MATERI IFRS DALAM MATA KULIAH (Survey pada Perguruan Tinggi di Kota Padang)', *Simposium Nasional Akuntansi 18*, pp. 1–31.
- Pemerintah Republik Indonesia (2010) *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia.
- Satria, D.I. (2016) *Modul Akuntansi Keuangan 1*. Aceh: Universitas Malikussaleh.

TENTANG PENULIS



Karunia Zuraidaning Tyas, S.Akun., M.Ak.
Universitas Perwira Purbalingga

Penulis lahir di Semarang pada tanggal 16 Agustus 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro pada tahun 2016 dan melanjutkan S2 Akuntansi Universitas Diponegoro pada tahun 2020. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Perwira Purbalingga dengan mengampu mata kuliah akuntansi Keuangan Lanjutan, Teori Akuntansi, dan Akuntansi Pelaporan Berkelanjutan. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karya yang sudah diterbitkan yaitu buku Akuntansi Perpajakan. Korespondensi email : karunia@unperba.ac.id

BAB 6

KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASET

Dr. Heni Purwantini, S.E., M.M.
Universitas Perwira Purbalingga

A. Pendahuluan

Peran sentral struktur keuangan untuk dipergunakan dalam kegiatan perusahaan yang bersifat laba dan nirlaba adalah aset. Aset memainkan peranan penting dalam laju tumbuhnya ekonomi dan kestabilan finansial baik untuk individu, perusahaan ataupun entitas lain. Berbicara mengenai aset (*Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Tentang Penyajian Laporan Keuangan, 2022*), menjelaskan bahwa entitas menyajikan aset dengan pengklasifikasian tersendiri dalam laporan keuangan. Artinya bahwa penyajian aset memerlukan peratutran khusus yang disesuaikan dengan pengklasifikasian baik sifat dan jenis aset dalam entitas untuk menyusun laporan keuangan. Aset memiliki nilai kapital yang dapat berubah seiring waktu. Aset atau harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu dan sumber yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan diperoleh manfaat ekonomis, (Baridwan, 2015).

Aset adalah sumberdaya dan memiliki nilai ekonomi serta dimiliki oleh individu atau entitas bisnis. Aset dapat berupa kekayaan yang dapat bergerak ataupun tidak bergerak, dan mempunyai banyak fungsi dalam menjalankan bisnis, aset akan mendukung operasional bisnis yang dijalankan serta akan menghasilkan pendapatan bagi entitas usaha. Aset juga

berfungsi untuk membantu mencapai tujuan entitas, sebagai alat yang digunakan untuk kestabilan finansial. Aset atau bisa disebut aktiva merupakan sumber ekonomi yang menggambarkan kekayaan yang dimiliki suatu entitas tertentu, dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial serta dapat diukur dalam satuan finansial. Secara umum dapat diartikan bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki suatu entitas akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan memberi manfaat bagi perusahaan dinamakan aset, (Kieso, 2011). Aset merupakan suatu unsur yang bisa dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Begitu pentingnya aset dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha baik bersifat individu atau badan usaha maka diperlukan pengelolaan yang tepat agar aset yang dimiliki memberikan manfaat yang optimal dalam menunjang tercapainya tujuan bisnis atau usaha. Peran aset yang dimiliki dipastikan dan diharapkan oleh pemangku kepentingan memberikan keluasan bisnis yang bersifat berkelanjutan. Aset yang dimiliki dan dicatat serta dikelola dengan optimal dan tepat akan memberikan gambaran nyata bahwa usaha atau bisnis yang dijalankan dengan keberadaan aset memiliki nilai tambah terhadap jalannya usaha atau bisnis.

Peran aset dalam menopang suatu usaha adalah sangat penting dan utama, dengan keberadaan aset maka kegiatan usaha akan berjalan. Sehingga sangat diperlukan kehati hatian dalam mengelola aset. Jika pengelolaan aset mengalami masalah dan kendala sudah pasti akan memberikan dampak yang buruk terhadap kelangsungan kegiatan usaha. Diperlukan pengetahuan yang lebih untuk mengelola aset, karena dinamika usaha dewasa ini sangatlah kompetitif, apabila terjadi kesalahan sedikit saja terhadap pengelolaan aset maka akan berdampak kepada keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan. Pengadaan aset tidak bisa dianggap mudah, karena mendapatkan aset saat untuk memulai usaha membutuhkan perencanaan yang serius,

adakalanya kesalahan menempatkan aset dapat mengakibatkan kesalahan fatal terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan. Artinya bahwa saat memulai kegiatan usaha diperlukan penempatan aset yang terukur dan tepat, begitu juga saat melakukan kegiatan usaha harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap keberadaan aset, karena diharapkan penempatan aset yang tepat dapat membantu memperlancar kegiatan usaha yang akan memberikan nilai kemanfaatan pada perusahaan.

Pengelolaan aset, baik untuk kepemilikan individu atau perusahaan memerlukan kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan dari perusahaan akan tercapai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Karena pentingnya keberadaan dan pengelolaan aset banyak para ahli melakukan penelitian mengenai aset untuk mendapatkan ketepatan penempatan aset yang dapat memacu proses kegiatan usaha agar menghasilkan keuntungan demi keberlanjutan suatu usaha. Pemangku kepentingan terutama investor atau penanam modal tidak akan rela kehilangan nilai investasinya hanya karena penempatan aset yang salah. Perlu pemahaman yang terintegrasi terhadap aset yang dibutuhkan dan ditempatkan agar tidak terdapat kesalahan dalam mencapai tujuan usaha yang ditetapkan.

B. Karakteristik Aset

Aset mencakup keseluruhan sumber daya yang dimiliki suatu entitas baik itu pribadi ataupun perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Tentang Penyajian Laporan Keuangan*, 2022), aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan memiliki nilai manfaat. Menurut (Weygandt, 2013), aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, dimana karakteristik umum yang dimiliki yaitu memberikan jasa atau manfaat di masa yang akan datang (Hanafi, 2018), menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasi oleh

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diraih oleh perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aset memiliki karakteristik yang spesifik yaitu :

1. Hak kepemilikan, dapat dikatakan aset apabila suatu barang dimiliki oleh pihak tertentu
2. Menghasilkan keuntungan, artinya suatu barang harus memiliki nilai ekonomi
3. Diperoleh dari transaksi masa lalu, aset yang dimiliki terjadi karena terdapat kegiatan ekonomi dimasa yang lalu

Klasifikasi aset bisa digolongkan menjadi beberapa jenis pengelompokan yang secara umum digunakan untuk mempermudah pengelompokan serta pengelolaannya. Klasifikasi Jenis -jenis aset yang perlu dipahami :

1. Berdasarkan konvertibilitas, aset dibagi menjadi dua jenis :
 - a. Aset Lancar, merupakan aset yang kepemilikannya lebih mudah untuk dikonversi menjadi mata uang tunai atau equivalen dalam waktu kurang dari satu tahun, (Kieso, 2011). Contoh : uang tunai, piutang, persediaan.
 - b. Aset Tidak Lancar, merupakan aset yang dimiliki mempunyai nilai manfaat lebih dari kurun waktu satu tahun, (Kieso, 2011). Contoh: tanah, bangunan, mesin.
2. Berdasarkan bentuk fisik, secara umum dikategorikan menjadi dua bentuk :
 - a. Aset yang secara fisik dapat diukur, dilihat dan dirasakan (*Tangible Aset*), contoh ; tanah, bangunan, mesin, kendaraan
 - b. Aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diamati (*Intangible Aset*), contoh ; patent, hak cipta, goodwill
3. Berdasarkan Kegunaanya, dibagi menjadi dua untuk memudahkan dalam penggunaan operasional, yaitu;
 - a. Aset operasi, merupakan aset yang digunakan sehari hari dalam mendukung kegiatan operasional usaha sehari hari, yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas kegiatan usaha, contoh ; kas operasional, inventaris mesin

- b. Aset non operasi, cenderung tidak digunakan sehari-hari dalam kegiatan operasional, tetapi dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, contoh; investasi jangka pendek, lahan kosong, penghasilan dari bunga

Dari karakteristik aset semakin jelas bahwa aset memiliki nilai ekonomi dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang bertujuan untuk mendukung operasi bisnis. Aset yang dimiliki harus dikelola dan dijaga agar bermanfaat karena aset digunakan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

C. Pencatatan Aset

Melakukan penggolongan dan pengklasifikasian aset memberikan kemudahan untuk mencatat aset di dalam laporan keuangan. Pencatatan aset yang baik dan akurat merupakan kegiatan akuntansi yang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai aset tetap terjaga dan membantu entitas usaha dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Aset diakui dalam neraca, memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran atas nilai aset berdasarkan biaya atau pengeluaran yang diperolehnya atau dengan kata lain pengukuran aset berdasarkan biaya perolehan. Jika saat pengukuran atau penilaian aset tidak memungkinkan atau tidak dapat menggunakan biaya perolehan maka penilaian aset didasarkan pada nilai wajar saat perolehan atau saat pengakuan.

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang dapat digunakan dengan cepat untuk penggunaan operasional bisnis, aset lancar terdiri dari:

- a. Kas dan setara kas, merupakan aktiva yang paling mudah dicairkan dan menjadi modal kerja yang likuiditasnya sangat tinggi, (Lestari, 2022). Kas merupakan sebuah aktiva dari keuangan, semua mata uang kertas dan logam, baik mata uang asing maupun mata uang dalam negeri, dan semua surat-surat berharga yang mempunyai sifat-sifat seperti uang, yaitu yang bisa segera dicairkan dan

diterima atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran pada setiap waktu. Pencatatan kas & setara kas kas bertambah dicatat di debit, kas berkurang dicatat di kredit, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

KAS	Debit	Kredit
Penjualan/pendapatan	(+)	
Penerimaan piutang	(+)	
Pembelian aktiva		(-)
Pembayaran tagihan		(-)
Biaya /beban operasional		(-)

- b. Piutang Lancar, adalah semua tagihan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak pihak lain, (Kieso, 2011). Piutang terjadi karena penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang dicatat nominalnya saat sebesar saat jatuh tempo. Khusus untuk piutang yang diklasifikasikan ke dalam piutang lancar atau piutang jangka pendek adalah piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari dua belas bulan. Piutang lancar atau piutang jangka pendek dinilai dan dilaporkan pada nilai realisasi bersih (*net realizable value*), yaitu jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas. Pencatatan secara sederhana sebagai berikut:

PIUTANG LANCAR	Debit	Kredit
Tagihan pada konsumen	(+)	
Pinjaman karyawan	(+)	
Pelunasan Konsumen		(-)
Pelunasan pinjaman karyawan		(-)

- c. Persediaan, adalah kelebihan barang agar dapat digunakan dihari berikutnya, atau kelebihan barang agar dapat digunakan untuk kebutuhan proses produksi selanjutnya, atau kelebihan barang agar dapat dijual

dihari selanjutnya, (Kieso, 2011). Persediaan barang yang dapat diakui oleh perusahaan adalah persediaan barang yang telah menjadi hak milik perusahaan dan tercatat dalam pembukuan perusahaan maupun barang yang menjadi hak milik perusahaan tetapi belum tercatat dalam pembukuan perusahaan. Secara umum pengakuan persediaan menjadi hak milik perusahaan pada saat terjadinya transaksi jual-beli atau karena adanya perjanjian perpindahan kepemilikan antara kedua belah pihak. Dalam pencatatan persediaan ada dua metode yang digunakan yaitu pencatatan periodik dan perpetual.

1) Sistem pencatatan persediaan periodik

Penentuan jumlah dan nilai persediaan dicatat secara berkala (periodik), misalnya satu bulan sekali atau satu periode akuntansi. Pencatatan persediaan akan dilakukan berkala dalam kartu persediaan, jika terjadi pembelian maka persediaan di debit, dan jika terjadi penjualan akan dicatat di kredit, pada akhir periodik yang ditentukan akan dilakukan perhitungan kembali.

2) Sistem pencatatan perpetual

Pencatatan perpetual (sempurna) adalah sistem pencatatan setiap perubahan jumlah nilai persediaan. Secara terus menerus diikuti pergerakan persediaan, artinya setiap terjadi pembelian (penambahan) akan langsung menambah persediaan dan setiap terjadi penjualan (pengurangan) akan mengurangi nilai persediaan. Perubahan persediaan secara langsung akan mempengaruhi nilai persediaan yang dicatat dalam akun persediaan.

Selama periode akuntansi pembelian barang yang terjadi akan mengalami perbedaan nilai. Persediaan yang keluar akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Ada beberapa pendekatan dalam mencatat nilai persediaan yaitu:

- a) Metode Identifikasi khusus (*Specific Identification Method*); tiap tiap barang akan diidentifikasi, sehingga baik barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (terjual) akan teridentifikasi dalam pencatatannya. Secara umum metode ini digunakan oleh usaha yang transaksinya relative sedikit tetapi nilai transaksi cukup besar. Contoh : perusahaan mobil, usaha emas.
- b) Metode Rata-rata (*Average Cost Method*), nilai persediaan dihitung dengan cara nilai harga pokok persediaan masuk ditambah nilai harga pokok persediaan keluar kemudian jumlah nilai harga pokok tersebut dibagi dengan jumlah persediaan yang ada. Contoh : usaha furniture/mebelair, alat tulis, bahan bangunan.
- c) Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First in First Out*), metode ini mencatat dengan cara persediaan yang masuk pertama akan keluar pertama, penentuan harga pokok barang mengikuti harga pokok barang itu sendiri. Metode ini biasanya digunakan pada usaha yang mempunyai produk yang bergantung pada masa kadaluarsa. Contoh : usaha makanan dan minuman.
- d) Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (*Last in First Out*), metode ini mencatat persediaan dengan cara persediaan masuk terakhir akan dikeluarkan terlebih dahulu. contoh usaha yang dapat menggunakan metode ini adalah toko elektronik, toko baju, toko buku. Metode ini sudah tidak diperkenankan diterapkan oleh IFRS. Karena ada kecenderungan menekan laba yang dihasilkan dan berdampak atau berpengaruh pada pengurangan besarnya pajak. Secara umum pencatatan persediaan adalah sama meskipun dalam kartu persediaan menggunakan metode apapun.

Prinsipnya persediaan akan bertambah di debit saat terjadi transaksi pembelian, dan akan berkurang di kredit saat terjadi transaksi penjualan pencatatan sebesar harga pokok, dapat dilihat sebagai berikut.

PERSEDIAAN	Debit	Kredit
Pembelian (Harga pokok)	(+)	
Penjualan (Harga pokok)		(-)

- d. Aset lancar lain, pada prinsipnya digunakan untuk operasional bisnis dan bersifat likuid. Antara lain biaya dibayar dimuka, investasi jangka pendek. Pencatatan aset lancar dalam sistim akuntansi diakui dalam neraca. Penyajian aset lancar yang umum disajikan dalam neraca sebagai berikut.

NERACA

Per 31 Desember 20xx

KETERANGAN	
Aset Lancar	Rp xxxxx
Kas dan setara kas	Rp xxxxx
Piutang	Rp xxxxx
Persediaan	Rp xxxxx
Aset lancar lain	Rp xxxxx

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar merupakan aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Kieso et.al (2014), aset tidak lancar terdiri atas :

- a. Investasi jangka panjang, merupakan investasi yang bersifat jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan. Secara umum jenis investasi jangka panjang terdiri dari investasi dalam sekuritas, investasi dalam aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasi, investasi dalam

dana khusus dan investasi dalam perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan. Investasi jangka panjang dalam saham dicatat sebesar harga perolehan, jika terjadi kepemilikan saham jangka panjang maka akan dicatat di debet sebagai investasi saham jangka panjang, apabila terjadi penjualan saham dan terdapat selisih harga dicatat sebagai agio/disagio tetapi tidak menambah harga perolehan saham, pencatatan secara umum sebagai berikut.

SAHAM	Debet	Kredit
Pembelian saham	(+)	
Penjualan saham		(-)
Agio/disagio maka sebagai laba (rugi)		

- b. Aset tetap adalah aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi normal perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aset tetap dicatat sebesar nilai buku di dalam laporan keuangan. Nilai buku diperoleh dari pengurangan harga perolehan aktiva tetap dikurangi depresiasi aktiva tetap. Artinya pencatatan aset tetap di neraca dapat dilihat bahwa nilai aset tetap merupakan nilai aset tetap bersih yang dapat dimanfaatkan pada periode berjalan. Pengurang dari aset tetap adalah depresiasi, terdapat beberapa metode penyusutan yaitu; metode garis lurus (*Straight line method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), jumlah angka tahun (*sum of the years' digit*), dan metode unit produksi (*units of production method*), penggunaan metode depresiasi sesuai dengan kebijakan perusahaan, dengan memilih metode yang paling sesuai maka laporan keuangan aset tetap yang disajikan akan mencerminkan realitas ekonomi aset dengan lebih akurat. Pencatatan kepemilikan aset tetap secara sederhana sebagai berikut.

ASET TETAP	Debet	Kredit
Kepemilikan aset tetap(Pembelian)	(+)	
Depresiasi aset tetap		(-)
Penjualan aset tetap		(-)

- c. Aset tidak berwujud, adalah aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud secara fisik dalam arti merupakan aset teridentifikasi non - moneter yang tidak dapat disentuh/ diukur secara fisik dan memberikan manfaat. Pengakuan pencatatan aset tidak berwujud saat diperoleh, harus sesuai ketentuan antara lain; aset tidak berwujud tersebut berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang; biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya dapat diukur dengan handal. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari; harga beli termasuk bea masuk (impor), dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat; segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan. Penyajian dalam neraca pada kolom aktiva, dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Aset tidak berwujud terdiri atas hak paten, hak cipta, merek dagang, *franchise* (waralaba) dan *goodwill*. Secara sederhana pencatatan aset tidak berwujud sebagai berikut.

Aset tidak berwujud	Debet	Kredit
Pembelian/Perolehan	(+)	
Amortisasi		(-)

- d. Aset jangka panjang lainnya, adalah aset yang tidak dapat dimasukkan kedalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tidak lancar memberikan kontribusi pada kegiatan usaha dalam jangka panjang. Nilai manfaat yang diberikan secara nyata dapat diukur dalam kegiatan operasional berkelanjutan yang dapat diandalkan untuk keberlangsungan kegiatan usaha.

Penyajian dalam neraca aset tidak lancar dapat dilihat sebagai berikut.

NERACA
Per 31 Desember 20XX

KETERANGAN	
Aset Tidak Lancar	
Investasi Jangka Panjang	Rp xxxxx
Aset Tetap	Rp xxxxx
Akumulasi Depresiasi	(Rp xxxxx)
Nilai buku aset tetap	Rp xxxxx
Aset tidak berwujud	Rp xxxxx
Akumulasi amortisasi	(Rp xxxxx)
Nilai tercatat aset tidak berwujud	Rp xxxxx
Aset Jangka panjang lainnya	Rp xxxxx

Pentingnya pemahaman mengenai aset serta kebijakan yang diterapkan dalam suatu usaha baik untuk usaha individu atau perusahaan sangat membantu pengelolaan kegiatan operasional. Tujuan utama dari sebuah usaha adalah mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara umum tujuan pendirian usaha adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi dan bersifat konsisten serta mampu mempertahankan kehidupan yang berkelanjutan bagi usaha yang didirikan. Dari penjelasan mengenai konsep aset serta pencatatan dalam laporan keuangan dalam hal ini neraca maka dapat dilihat sebagai berikut

NERACA
Per 31 Desember 20XX

KETERANGAN	
AKTIVA	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	Rp xxxxx
Piutang	Rp xxxxx
Persediaan	Rp xxxxx
Aset lancar lain	Rp xxxxx
Jumlah Aset Lancar	Rp xxxxx
Aset Tidak Lancar	
Investasi Jangka Panjang	Rp xxxxx
Aset Tetap	Rp xxxxx
Akumulasi Depresiasi	(Rp xxxxx)
Nilai buku aset tetap	Rp xxxxx
Aset tidak berwujud	Rp xxxxx
Akumulasi amortisasi	(Rp xxxxx)
Nilai tercatat aset tidak berwujud	Rp xxxxx
Aset Jangka panjang lainnya	Rp xxxxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp xxxxx
JUMLAH AKTIVA	Rp XXXX

Laporan keuangan yang berisi informasi mengenai aset disajikan dalam bentuk neraca disisi aktiva. Penyajian laporan keuangan aktiva yang benar dan tepat akan membantu para pemangku kepentingan dalam merancang perencanaan kegiatan usaha berkelanjutan. Keakuratan penyajian aset memberikan arah yang jelas terhadap kebijakan usaha yang akan dijalankan sesuai tujuan dari usaha yang didirikan.

D. Kesimpulan

Aset merupakan sumberdaya yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, serta dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Secara umum aset memerlukan pengelolaan dalam pengkalsifikasian dan pencatatannya. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa :

1. Aset merupakan bagian penting dari laporan keuangan, dengan laporan keuangan akan terlihat pengelolaan aset yang tepat akan memberikan gambaran nyata untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan perusahaan.
2. Aset yang dimiliki dapat berbentuk aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan. Serta aset tidak lancar antara lain investasi jangka panjang, aset tetap aset tidak berwujud yang akan memberikan nilai manfaat dimasa yang akan datang.
3. Aset merupakan alat yang sangat kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan usaha, karena aset dapat langsung digunakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, aset yang digunakan untuk operasional jangka pendek diantaranya adalah kas dan setara kas, sedangkan untuk menstimulus kegiatan usaha jangka panjang yaitu aset non operasi dapat memberikan peran dimasa yang akan datang sebagai contoh investasi.
4. Aset mampu menjaga keberadaan kegiatan operasional suatu usaha meskipun tidak dalam bentuk moneter, tetapi dapat meningkatkan nilai keberlanjutan suatu usaha yaitu aset yang secara fisik tidak berwujud seperti hak paten, *goodwill*, kepemilikannya sangat memberikan manfaat untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.
5. Pencatatan aset yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan akan memberikan informasi penggunaan dan kepemilikan aset yang handal, sehingga dapat menarik para pemangku kepentingan dalam melakukan dan menetapkan kebijakan. Seperti konsisten terhadap penggunaan metode pencatatan kas, piutang, persediaan, aktiva tetap dan semua yang termasuk kedalam aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2015). *Intermediate Accounting* (8th ed., Vol. 5). BPFE.
- Hanafi, M. H. H. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (Vol. 5). UPP STIM YKPN.
- Kieso, D. W. T. (2011). *Intermediate Accounting*. Erlangga.
- Lestari, E. P. (2022). Kajian Prosedur Akuntansi Kas CV Tausan .
Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK).
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/9924>
- Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. (2022).
- Weygandt, K. K. (2013). *Financial Accounting* (IFRS Edition). Hoboken:John Wiley & Sons.Inc.

TENTANG PENULIS



Dr. Heni Purwantini, S.E., M.M.
Universitas Perwira Purbalingga

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 07 Februari 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 program studi akuntansi STIE Jaya Negara Malang, S2 program studi magister manajemen STIE Malangkececwara Malang, S3 program studi ilmu ekonomi Universitas Merdeka Malang. Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang pendampingan manajemen dan perpajakan. Motivasi penulis untuk ikut dalam penulisan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara sistimatis, kritis dan mempertajam intelektualitas. Adapun, sejumlah karya tulis yang sudah diterbitkan di antaranya: jurnal *Minimizing tax avoidance by using conservatism accounting trough book tax differences*, Pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance*, Transparansi dan akuntabilitas internal audit dalam mewujudkan *good university*. Korespondensi melalui email heni@unperba.ac.id

BAB 7

KONSEP DAN KARAKTERISTIK KEWAJIBAN

Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak., CA.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

A. Pendahuluan

Dalam dunia akuntansi keuangan, kewajiban (*Liabilitas*) merupakan salah satu elemen utama dalam laporan keuangan yang mencerminkan utang atau tanggung jawab finansial suatu entitas kepada pihak lain (IAI, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban sangat penting karena berdampak pada keputusan ekonomi yang dibuat oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan regulator (Scott, 2022). Kewajiban tidak hanya mencerminkan jumlah utang yang harus dibayar oleh entitas, tetapi juga menjadi indikator kesehatan finansial suatu perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, kewajiban yang tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas dan solvabilitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, standar akuntansi menyediakan panduan yang jelas mengenai bagaimana kewajiban harus diidentifikasi, diukur, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan.

Di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini, harmonisasi standar akuntansi menjadi sangat penting. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi standar akuntansi berbasis *International Financial Reporting Standards (IFRS)* untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan

keuangan. IFRS menetapkan konsep kewajiban dengan pendekatan pengakuan dan pengukuran yang lebih sesuai, guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang.

B. Definisi Kewajiban, Karakteristik dan Konsep Kewajiban

Kewajiban merupakan salah satu unsur utama dalam laporan keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjukkan posisi keuangan suatu entitas. Kewajiban menunjukkan besarnya kepentingan kreditor atas aset suatu perusahaan. Adanya kewajiban di neraca/laporan posisi keuangan memberikan informasi bahwasannya perusahaan telah menarik sumber daya yang digunakan dari kreditor. Sepertihalnya aktiva dan elemen lain yang didefinisikan berbeda dari literatur yang berbeda, maka kewajiban pun memiliki definisi yang berbeda-beda pula. Namun secara substansi definisi kewajiban (*liabilitas*) tersebut tetap sama. Berikut beberapa definisi kewajiban dari berbagai sumber:

1. Menurut IAI (1999), kewajiban adalah tanggung jawab finansial suatu perusahaan yang berasal dari kejadian sebelumnya dan harus diselesaikan dengan menggunakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan SFAC no. 6 mendefinisikan liabilitas merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu (FASB, 1985).
2. Menurut *International Financial Reporting Standards (IFRS)* terbaru, kewajiban didefinisikan sebagai:

"Kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi" (IFRS Foundation., 2024).

Perbandingan dengan Definisi dalam Kerangka Konseptual IASB 1989

Sebelum direvisi, **Kerangka Konseptual IASB tahun 1989** mendefinisikan kewajiban sebagai: "*Suatu kewajiban masa kini yang timbul dari kejadian masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.*" Meskipun definisi ini serupa dengan versi terbaru dalam IFRS, ada beberapa perbedaan utama:

1. Definisi IFRS yang baru lebih menekankan pada ketidakpastian dalam penyelesaian kewajiban, termasuk kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk.
2. IFRS terbaru lebih spesifik dalam menekankan konsep kewajiban konstruktif, yang tidak hanya mencakup kewajiban hukum tetapi juga kewajiban yang timbul dari praktik atau kebiasaan bisnis yang telah menciptakan harapan bagi pihak lain.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), definisi kewajiban atau liabilitas sejalan dengan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Secara umum, kewajiban didefinisikan sebagai kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Artinya, kewajiban mencerminkan tanggung jawab perusahaan yang ada saat ini, yang timbul dari peristiwa atau transaksi sebelumnya, dan penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan. Definisi ini menegaskan bahwa suatu entitas memiliki kewajiban jika memenuhi tiga karakteristik utama. Kewajiban dalam akuntansi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari ekuitas dan aset. Berdasarkan definisi dalam Kerangka Konseptual IFRS dan teori Akuntansi, karakteristik utama kewajiban adalah:

1. Kewajiban kini (*Present Obligation*)

Kewajiban kini merujuk pada tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh suatu entitas di masa mendatang akibat kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Kewajiban ini dapat bersumber dari hukum atau perjanjian yang mengikat. Contoh Utang usaha kepada pemasok karena pembelian barang kredit. Bisa juga berupa kewajiban konstruktif (*constructive obligation*) yang berasal dari kebiasaan bisnis, praktik terbaik, atau harapan yang diciptakan perusahaan kepada pihak eksternal.

2. Timbul dari peristiwa masa lalu

Kewajiban harus merupakan hasil dari suatu transaksi atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Contoh: Jika perusahaan sudah menerima barang dari pemasok tetapi belum membayar, kewajiban sudah ada meskipun jatuh tempo belum tiba, pembelian barang secara kredit menimbulkan utang dagang, penerbitan obligasi menciptakan kewajiban bunga dan pokok utang di masa depan.

3. Penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi

Penyelesaian kewajiban akan menyebabkan pengurangan aset atau arus keluar sumber daya ekonomi seperti kas, barang, atau jasa. Entitas harus mengorbankan aset (misalnya uang atau barang) untuk memenuhi kewajiban tersebut. Contoh: Pembayaran utang pinjaman bank atau pengiriman barang dalam transaksi barter, pembayaran utang kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, atau kewajiban pajak kepada pemerintah.

C. Konsep Kewajiban dalam Teori Akuntansi

Di Indonesia, konsep kewajiban dalam akuntansi diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK mengadopsi dan menyesuaikan standar dari *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, sehingga prinsip-prinsip kewajiban dalam IFRS

banyak diadopsi dalam SAK. IFRS memainkan peran penting dalam menetapkan standar global mengenai bagaimana kewajiban harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Beberapa standar IFRS yang relevan dengan kewajiban meliputi:

1. *IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets)* – Mengatur tentang kewajiban yang memiliki ketidakpastian dalam jumlah atau waktu pembayaran, seperti provisi dan kewajiban kontinjensi.
2. *IAS 32 (Financial Instruments: Presentation)* – Mengatur klasifikasi kewajiban keuangan dan ekuitas dalam laporan keuangan.
3. *IFRS 9 (Financial Instruments)* – Mengatur tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban yang berhubungan dengan instrumen keuangan.
4. *IAS 19 (Employee Benefits)* – Mengatur kewajiban terkait imbalan kerja karyawan, seperti pensiun dan tunjangan pascakerja.

Indonesia, melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah mengadopsi IFRS untuk memastikan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar internasional. Misalnya, PSAK 57 mengadopsi konsep yang terdapat dalam IAS 37 terkait dengan provisi dan kewajiban kontinjensi, sementara PSAK 50 dan PSAK 55 mengatur pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan berbasis IAS 32 dan IFRS 9. Dengan semakin berkembangnya standar akuntansi, pemahaman tentang kewajiban tidak lagi terbatas pada pencatatan utang dagang dan pinjaman bank saja, tetapi juga mencakup kewajiban berbasis keuangan dan hukum yang lebih kompleks. Oleh karena itu, akuntan, manajemen, dan regulator harus selalu mengikuti perkembangan standar akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dibandingkan secara global. Dalam teori akuntansi, kewajiban dapat didefinisikan lebih luas berdasarkan sifatnya. Ada beberapa konsep penting yang membedakan jenis

kewajiban dan bagaimana mereka diakui dalam laporan keuangan. Berikut penjelasannya:

1. Kewajiban sebagai Kontrak Hukum vs. Kewajiban Konstruktif

a. Kewajiban Hukum (*Legal Obligation*) .

Kewajiban yang muncul karena perjanjian kontraktual atau ketentuan hukum. Contohnya adalah utang usaha, pajak terutang, atau pinjaman bank.

b. Kewajiban Konstruktif (*Constructive Obligation*)

Kewajiban yang tidak secara eksplisit diatur dalam kontrak, tetapi muncul dari tindakan atau kebijakan entitas yang menciptakan harapan bagi pihak lain. Contohnya adalah tunjangan pensiun atau program bonus karyawan yang telah menjadi kebiasaan.

Dalam IFRS, kewajiban konstruktif diakui jika terdapat:

a. Polisi atau praktik yang telah diterapkan oleh perusahaan

Misalnya, jika perusahaan secara rutin memberikan bonus akhir tahun kepada karyawan, maka karyawan dapat mengharapkan bonus tersebut di masa mendatang.

b. Ekspektasi yang valid dari pihak eksternal

Jika pelanggan telah mengharapkan pengembalian uang atau garansi dari perusahaan, meskipun tidak ada kewajiban hukum, maka perusahaan dapat memiliki kewajiban konstruktif.

2. Kewajiban Kini vs. Kewajiban Kontinjen

a. Kewajiban Kini (*Present Obligation*)

Kewajiban yang telah ada dan harus dicatat dalam laporan keuangan. Contohnya termasuk utang dagang, utang pajak, atau pinjaman jangka panjang.

b. Kewajiban Kontinjen (*Contingent Liability*)

Kewajiban yang keberadaannya bergantung pada kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Menurut **IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets)**, kewajiban kontinjen harus dicatat sebagai catatan atas laporan keuangan jika:

- a. Ada ketidakpastian dalam pengakuan atau jumlah kewajiban.
- b. Kemungkinan arus keluar sumber daya tidak cukup kuat untuk diakui sebagai kewajiban kini, tetapi tetap relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Contoh kewajiban kontinjen termasuk:

- a. Gugatan hukum yang sedang berlangsung, di mana perusahaan tidak yakin apakah akan kalah atau menang.
- b. Jaminan garansi produk, di mana perusahaan mungkin perlu memperbaiki atau mengganti barang jika ditemukan cacat.

3. Pendekatan Ekuitas Residual dalam Akuntansi Kewajiban

Pendekatan ekuitas residual melihat kewajiban sebagai klaim pihak ketiga atas aset perusahaan sebelum hak pemegang ekuitas terpenuhi. Dalam pendekatan ini:

$$\text{Total aset} = \text{Total kewajiban} + \text{Ekuitas pemilik}$$

Semakin tinggi kewajiban suatu perusahaan, semakin kecil bagian ekuitas yang tersisa bagi pemegang saham. Konsep ini relevan dalam penilaian solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Jika kewajiban terlalu tinggi dibandingkan dengan aset, maka risiko kebangkrutan juga meningkat. Pendekatan ekuitas residual juga digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk mengukur leverage keuangan suatu perusahaan. Misalnya:

- a. **Debt-to-Equity Ratio (DER)**. Mengukur seberapa besar pembiayaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri.
- b. **Interest Coverage Ratio**. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga atas utangnya.

D. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dalam akuntansi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang mengacu pada IFRS, kewajiban dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1. Kewajiban Jangka Pendek (*Current Liabilities*)

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu **satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan**, mana yang lebih lama. Beberapa contoh kewajiban jangka pendek antara lain:

a. Utang Dagang (*Accounts Payable*)

Merupakan kewajiban yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok.

b. Utang Pajak (*Taxes Payable*)

Kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya.

c. Utang Dividen (*Dividends Payable*)

Merupakan jumlah dividen yang telah diumumkan oleh perusahaan tetapi belum dibayarkan kepada pemegang saham.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam kategori ini adalah **utang wesel jangka pendek, utang gaji dan upah, utang bunga**, serta utang lain yang harus dibayar dalam waktu dekat.

2. Kewajiban Jangka Panjang (*Non-Current Liabilities*)

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Beberapa contoh kewajiban jangka panjang meliputi:

a. Obligasi (*Bonds Payable*)

Pinjaman jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor, biasanya dengan tingkat bunga tetap.

- b. Pinjaman Jangka Panjang (*Long-Term Loans Payable*)**
Termasuk utang bank, hipotek, atau kredit investasi yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.
- c. Kewajiban Pensiun (*Pension Liabilities*)**
Merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dana pensiun kepada karyawan sesuai dengan kebijakan atau peraturan ketenagakerjaan.
- d. Provisi (*Provisions*)**
Kewajiban yang bersifat estimasi, seperti provisi garansi produk, provisi untuk tuntutan hukum, atau provisi restrukturisasi.
- e. Utang Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*)**
Kewajiban yang muncul akibat perbedaan antara perhitungan pajak menurut akuntansi dan pajak menurut peraturan perpajakan.

3. Terjadinya Kewajiban

Pemahaman terhadap peristiwa yang berpotensi menimbulkan kewajiban memiliki peran krusial dalam menentukan pengakuan kewajiban yang akan dicantumkan dalam neraca. Kewajiban tidak hanya timbul dari perjanjian kontraktual berdasarkan aspek hukum, tetapi juga dapat muncul dari faktor lain yang memenuhi kriteria pengakuan kewajiban. Menurut Kohler (1970: 263), hutang merupakan sejumlah kewajiban yang harus dilunasi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Secara khusus, hutang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Hutang yang telah terjadi atau sedang berlangsung (*current liability*).
- b. Hutang yang akan timbul pada waktu tertentu di masa depan, seperti hutang pembiayaan (*funded debt*) dan hutang yang masih harus dibayar (*accrued liability*).
- c. Hutang yang muncul akibat kegagalan untuk melakukan suatu tindakan di masa depan, misalnya pendapatan tangguhan (*deferred revenue*) dan hutang bersyarat (*contingent liability*).

Kewajiban dalam SAK dapat timbul dari beberapa kondisi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Terjadinya Kewajiban Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan):I, 2024).

1. Kontrak atau Kesepakatan (*contractual Liabilities*)

Kewajiban dapat muncul dari suatu **perjanjian tertulis atau lisan** antara entitas dengan pihak lain. Kontrak ini menciptakan kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk melakukan pembayaran atau memberikan jasa di masa depan.

Contoh:

- a. **Utang Bank.** Utang bank muncul dari perjanjian pinjaman antara perusahaan dengan bank, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga.
- b. **Utang Dagang.** Utang dagang terjadi ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok secara kredit.

Hutang berdasarkan aspek hukum merupakan perspektif paling terbatas dalam memahami kewajiban. Pandangan ini hanya mengakui hutang yang muncul dari perjanjian atau ketentuan hukum yang mengikat, tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi atau potensial lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban.

2. Regulasi atau Peraturan Pemerintah

Kewajiban dapat timbul karena adanya regulasi atau peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk membayar atau melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum.

Contoh:

- a. **Pajak Penghasilan (PPh) Terutang.** Perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan **PSAK 46 (Pajak Penghasilan)**.
- b. **Retribusi atau Denda.** Jika perusahaan melanggar ketentuan lingkungan atau perizinan usaha, mereka harus membayar denda yang ditetapkan oleh regulator.

3. Kewajiban Konstruktif (*Constructive Liabilities*)

Menurut PSAK 57 (**Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi**), kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul bukan karena hukum atau kontrak, tetapi karena praktik bisnis yang telah dilakukan secara konsisten dan menimbulkan ekspektasi dari pihak lain bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban tersebut.

Contoh:

- a. **Bonus Tahunan Karyawan.** Jika suatu perusahaan secara konsisten memberikan bonus kepada karyawannya setiap tahun, maka walaupun tidak ada kontrak tertulis, karyawan memiliki ekspektasi bahwa mereka akan menerima bonus di tahun berikutnya.
- b. **Garansi Produk.** Jika sebuah perusahaan elektronik selalu memberikan layanan perbaikan gratis walaupun tidak tercantum dalam kontrak, hal ini bisa dianggap sebagai kewajiban konstruktif.

4. Kewajiban Kontinjensi (PSAK 57)

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang bergantung pada peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Jika kemungkinan terjadinya kewajiban cukup besar dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal, maka perusahaan harus **mencatat provisi dalam laporan keuangan**. Jika tidak, kewajiban cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Contoh:

- a. **Gugatan Hukum.** Jika perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum dan kemungkinan besar akan kalah serta harus membayar ganti rugi, perusahaan harus mengakui kewajiban dalam laporan keuangan.
- b. **Jaminan Produk.** Jika produk yang dijual memiliki risiko cacat dan perusahaan harus melakukan perbaikan atau penggantian, maka perusahaan harus membentuk provisi berdasarkan estimasi biaya garansi.

E. Pengukuran Kewajiban dalam SAK dan IFRS

Pengukuran kewajiban dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengikuti prinsip-prinsip yang diadaptasi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Pengukuran ini tergantung pada sifat dan ketidakpastian dari kewajiban tersebut. Metode utama dalam pengukuran kewajiban menurut SAK sebagai berikut:

1. Biaya Historis (*Historical Cost*)

Metode **biaya historis** digunakan untuk kewajiban yang jumlahnya tetap dan pasti, biasanya terkait dengan transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Kewajiban dicatat berdasarkan nilai saat kewajiban pertama kali diakui. (Kieso, 2022)

Contoh:

- a. Utang Dagang → Dicatat sebesar nilai faktur dari pemasok sesuai dengan harga kesepakatan.
- b. Utang Bank Jangka Pendek → Dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman yang diterima.

Metode ini paling umum digunakan dalam laporan keuangan karena memberikan keandalan dalam pencatatan kewajiban.

2. Nilai Kini (*Present Value*)

Metode nilai kini digunakan untuk kewajiban jangka panjang yang pembayaran atau penyelesaiannya dilakukan di masa depan. Pengukuran ini mempertimbangkan faktor waktu dan diskonto untuk mencerminkan nilai wajar saat ini dari kewajiban tersebut.

Contoh:

- a. Dana Pensiun → Perusahaan menghitung kewajiban imbalan kerja karyawan yang akan dibayarkan di masa depan dengan mendiskontokan ke nilai saat ini (PSAK 24 - Imbalan Kerja)
- b. Pinjaman Jangka Panjang → Jika pinjaman memiliki bunga yang lebih rendah dari tingkat pasar, maka pinjaman harus dinilai dengan nilai kini arus kas masa depan.

Metode ini penting dalam pengukuran kewajiban jangka panjang karena memperhitungkan nilai waktu dari uang (time value of money).

3. Nilai Wajar (Fair Value Measurement)

Penilaian kewajiban dengan metode nilai wajar diterapkan pada instrument keuangan yang memiliki harga pasar yang berubah-ubah. Pengukuran ini mengacu pada harga pasar saat ini atau estimasi berdasarkan model valuasi yang sesuai.

Contoh:

- a. Kewajiban Derivatif → Kewajiban yang muncul dari kontrak derivatif seperti opsi, swap, atau futures dinilai berdasarkan harga pasar terkini sesuai dengan PSAK 71 - Instrumen Keuangan.
- b. Kewajiban dalam Kombinasi Bisnis → Dalam transaksi akuisisi, kewajiban yang diperoleh harus diukur pada nilai wajarnya sesuai dengan PSAK 22 - Kombinasi Bisnis.

Metode ini lebih relevan untuk transaksi keuangan yang kompleks dan berbasis pasar.

4. Estimasi dalam Provisi (PSAK 57 - Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi)

Jika kewajiban memiliki ketidakpastian dalam jumlah atau waktu pembayaran, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia.

Contoh:

- a. Kewajiban Garansi Produk → Perusahaan yang memberikan garansi atas produknya harus memperkirakan jumlah biaya yang kemungkinan besar akan dikeluarkan untuk perbaikan atau penggantian produk.
- b. Tuntutan Hukum → Jika perusahaan terlibat dalam litigasi dan ada kemungkinan besar akan mengalami kerugian, maka jumlah yang harus dibayarkan diestimasi berdasarkan analisis hukum yang tersedia.

Estimasi ini sangat penting dalam mengukur kewajiban yang belum pasti untuk memastikan transparansi laporan keuangan.

Metode pengukuran kewajiban menurut IFRS sebagai berikut:

IFRS mengatur pengukuran kewajiban melalui berbagai standar, terutama IAS 37 (*Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets*) dan IFRS 13 (*Fair Value Measurement*). Pengukuran kewajiban dalam IFRS bergantung pada sifat dan jenis kewajiban, yang dapat menggunakan pendekatan biaya historis, nilai kini, atau nilai wajar.

Tabel 7.1 Pengakuan Kewajiban menurut IFRS

Jenis Kewajiban	Standar IFRS yang Berlaku	Metode Pengukuran
Utang dagang	Tidak spesifik, IFRS 9	Biaya Historis
Pinjaman jangka panjang	IFRS 9 – Financial Instruments	Biaya Historis atau Nilai Kini
Obligasi	IFRS 9 – Financial Instruments	Nilai Wajar jika diperdagangkan di pasar
Sewa (Leasing)	IFRS 16 – Leases	Present Value dari pembayaran sewa
Provisi	IAS 37 – Provisions	Estimasi terbaik dari nilai kini
Kewajiban manfaat karyawan	IAS 19 – Employee Benefits	Nilai Kini dari estimasi pembayaran manfaat
Instrumen keuangan derivatif	IFRS 9 – Financial Instruments	Nilai Wajar

Sumber: (IFRS Foundation., 2024)

F. Pengakuan Kewajiban dalam SAK dan IFRS

Pengakuan kewajiban dalam akuntansi mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Standar ini memberikan panduan kapan suatu kewajiban harus dicatat dalam laporan keuangan dan bagaimana menentukan jumlahnya.

1. Pengakuan Kewajiban dalam SAK

Sebuah kewajiban diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi kondisi utama:

a. Merupakan kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu

Perusahaan telah memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar.

Contoh: Pembelian barang secara kredit yang telah diterima oleh perusahaan tetapi belum dibayar.

b. Kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban

Jika ada kemungkinan besar ($\text{probability} > 50\%$) bahwa perusahaan harus mengorbankan aset untuk menyelesaikan kewajiban, maka kewajiban harus diakui.

Contoh: Pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah setelah perusahaan memperoleh laba.

c. Jumlah kewajiban dapat diukur dengan andal

Jika jumlahnya dapat diestimasi dengan keandalan yang memadai, maka kewajiban harus diakui.

Contoh: Kewajiban gaji karyawan yang harus dibayarkan pada bulan berikutnya.

Jenis Kewajiban yang Diakui dalam SAK

a. **Kewajiban Jangka Pendek (Current Liabilities):** Utang dagang, utang pajak, utang bunga, utang gaji.

b. **Kewajiban Jangka Panjang (Non-Current Liabilities):** Obligasi, utang bank jangka panjang, dana pensiun.

c. **Provisi dan Kewajiban Kontinjensi (PSAK 57):** Gugatan hukum, garansi produk, kewajiban lingkungan.

2. Pengakuan Kewajiban Menurut IFRS

IFRS mengatur pengakuan kewajiban dalam berbagai standar, terutama: IAS 37 – *Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets*. IAS 19 – *Employee Benefits*, IFRS 16 – *Leases*, IFRS 9 – *Financial Instruments*

Kriteria Pengakuan Kewajiban dalam IFRS (IAS 37)

Menurut (IFRS Foundation., 2024), kewajiban harus diakui jika memenuhi tiga kriteria utama:

a. Merupakan kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu

Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif yang tidak dapat dihindari.

Contoh: Perusahaan telah menerima barang dari pemasok tetapi belum membayar.

b. Kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban

Jika kemungkinan arus keluar lebih besar dari 50%, kewajiban harus diakui.

Contoh: Pajak yang harus dibayarkan setelah audit fiskal menunjukkan adanya kewajiban pajak tambahan.

c. Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal

Jika tidak dapat diestimasi secara andal, kewajiban dianggap sebagai kewajiban kontinjensi dan hanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

Contoh: Perusahaan menghadapi gugatan hukum, tetapi belum ada kepastian jumlah yang harus dibayarkan.

Jenis Kewajiban dalam IFRS

a. Liabilitas Jangka Pendek

- 1) Utang dagang (IAS 1 – *Presentation of Financial Statements*)
- 2) Utang pajak (IAS 12 – *Income Taxes*)
- 3) Provisi garansi produk (IAS 37)

b. Liabilitas Jangka Panjang

- 1) Utang obligasi (IFRS 9 – *Financial Instruments*)
- 2) Kewajiban pensiun (IAS 19 – *Employee Benefits*)
- 3) Liabilitas sewa (IFRS 16 – *Leases*)

c. Provisi dan Kewajiban Kontinjensi

- 1) Jika kewajiban memiliki ketidakpastian jumlah atau waktu pembayaran, harus diestimasi (IAS 37).
- 2) Jika kewajiban hanya mungkin terjadi di masa depan, diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi, bukan diakui dalam laporan keuangan.

G. Penyelesaian Kewajiban

Penyelesaian kewajiban dalam akuntansi dapat dilakukan melalui berbagai metode, bergantung pada jenis dan sifat kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa metode penyelesaian kewajiban:

1. Pembayaran Kas

Metode yang paling umum dalam menyelesaikan kewajiban adalah dengan melakukan pembayaran tunai kepada kreditur. Hal ini mengurangi jumlah kas perusahaan dan menghapus kewajiban yang bersangkutan dari neraca.

Contoh: Pembayaran utang dagang kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit (Scott, 2022).

2. Transfer Aset Lain

Selain kas, perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban dengan mentransfer aset lain, seperti barang atau saham, kepada kreditur. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana perusahaan ingin mempertahankan likuiditas kas atau sebagai bagian dari strategi kompensasi.

Contoh: Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk saham (stock-based compensation), sehingga mengurangi kewajiban kompensasi tanpa mengeluarkan kas.

3. Penyediaan Jasa atau Barang

Beberapa kewajiban diselesaikan melalui pemberian barang atau jasa, bukan melalui pembayaran tunai. Metode ini umum dalam kewajiban yang berkaitan dengan garansi atau layanan purna jual (International Financial Reporting Standards (IFRS), 2024)

Contoh: Perusahaan yang menawarkan garansi produk harus menyediakan perbaikan atau penggantian barang jika terjadi kerusakan, sesuai dengan ketentuan garansi yang diberikan.

4. Konversi ke Ekuitas

Dalam situasi tertentu, kewajiban dapat dikonversi menjadi ekuitas perusahaan. Hal ini biasanya terjadi melalui instrumen keuangan seperti obligasi konversi, di mana pemegang obligasi memiliki opsi untuk mengubah utangnya menjadi saham perusahaan.

Contoh: Pemegang obligasi konversi memilih untuk mengonversi obligasinya menjadi saham perusahaan, sehingga mengurangi kewajiban utang dan meningkatkan ekuitas perusahaan.

5. Penghapusan Kewajiban

Kewajiban dapat dihapuskan jika kreditur membebaskan perusahaan dari kewajiban pembayaran. Situasi ini dapat terjadi melalui negosiasi restrukturisasi utang atau insentif pemerintah (OJK, 2024)

Contoh: Pemerintah memberikan insentif penghapusan pajak terutang sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi, atau bank menyetujui restrukturisasi utang yang mencakup penghapusan sebagian kewajiban perusahaan.

Pemilihan metode penyelesaian kewajiban yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial dan reputasi perusahaan. Setiap metode memiliki implikasi akuntansi dan keuangan yang berbeda, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan, strategi bisnis, dan peraturan yang berlaku sebelum menentukan cara penyelesaian kewajiban.

H. Kesimpulan

Dalam laporan keuangan, kewajiban adalah bagian utama yang menunjukkan tanggungjawab perusahaan dalam menggunakan sumber daya ekonomi sebagai konsekuensi dari kejadian sebelumnya. Pemahaman yang komprehensif tentang

konsep, karakteristik, pengakuan, pengukuran, serta penyelesaian kewajiban sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dalam **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)** dan **International Financial Reporting Standards (IFRS)**, kewajiban didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan. Kewajiban dapat diklasifikasikan ke dalam **kewajiban jangka pendek** (*current liabilities*) dan **kewajiban jangka panjang** (*non-current liabilities*), dengan berbagai contoh seperti utang dagang, utang pajak, obligasi, dan provisi. erjadinya kewajiban dalam SAK dapat bersumber dari kontrak, regulasi, kewajiban konstruktif, dan kewajiban kontinjensi.

Pengakuan kewajiban harus memenuhi kriteria utama, yaitu adanya kewajiban kini, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, serta dapat diukur dengan andal. Pengukuran kewajiban mengikuti beberapa metode seperti **biaya historis, nilai kini, nilai wajar, dan estimasi dalam provisi**, yang disesuaikan dengan sifat dan ketidakpastian kewajiban tersebut. enyelesaian kewajiban dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk **pembayaran kas, transfer aset lain, penyediaan barang atau jasa, konversi ke ekuitas, serta penghapusan kewajiban** dalam situasi tertentu. Pemilihan metode penyelesaian tergantung pada jenis kewajiban dan kebijakan perusahaan dalam manajemen keuangannya. engan memahami aspek-aspek ini, perusahaan dapat mengelola kewajibannya secara efektif untuk menjaga kesehatan keuangan dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Seiring dengan perkembangan standar akuntansi internasional, entitas bisnis perlu terus mengikuti perubahan dalam regulasi dan kebijakan akuntansi untuk memastikan laporan keuangan yang relevan dan andal.

DAFTAR PUSTAKA

- FASB, 1985. Statement of Financial Accounting Concepts No. 6.
- IFRS Foundation., 2024. International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2024. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- International Financial Reporting Standards (IFRS), 2024. IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. IFRS Foundation.
- Kieso, D.E., W.J.J., & W.T.D., 2022. Intermediate Accounting, 18th ed. ed. Wiley.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024. Laporan dan Regulasi Keuangan.
- Scott, W.R., 2022. Financial Accounting Theory , 8th ed. ed. Pearson Education.

TENTANG PENULIS



Nolita Yeni Siregar, S.E., Ak., M.S.Ak., CA.
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Penulis lahir di Telukbetung pada 28 Oktober 1975. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Institut Informatika dan Business Darmajaya. Penulis meraih gelar Sarjana (S1) dalam bidang Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Lampung dengan konsentrasi Magister Ilmu Akuntansi. Fokus utama penulis adalah Akuntansi Keuangan, di mana ia terus mengembangkan keahlian dan wawasannya. Dorongan utama penulis dalam bidang ini adalah keinginannya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam berbagai aspek teoritis maupun praktis, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

BAB 8

KONSEP DAN KARAKTERISTIK EKUITAS

Indriyani, S.E., M.Ak.
Politeknik Negeri Lampung

A. Pendahuluan

Jika berbicara mengenai ekuitas, maka hal ini tidak terlepas dari struktur modal perusahaan yang terdiri dari liabilitas dan modal. Pada bab ini, fokus pembelajaran pada ekuitas yaitu mempelajari bagaimana konsep dan karakteristik ekuitas. Ekuitas merupakan komponen utama dalam laporan posisi keuangan, yang menunjukkan adanya hak kekayaan pemilik dalam perusahaan. Ekuitas dapat dihasilkan dari berbagai sumber, antara lain investasi pemilik, laba ditahan, modal saham, agio saham, dan lain sebagainya. Dalam analisis keuangan perusahaan, ekuitas sebagai indikator yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian serta mendukung bisnis tanpa terlalu bergantung pada utang, hal ini sebagai cerminan dari stabilitas dan kesehatan finansial suatu entitas.

Karakteristik utama ekuitas mencakup sifatnya yang fluktuatif, bergantung pada laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, ekuitas dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen, perubahan dalam kebijakan akuntansi, serta aktivitas transaksi pemilik seperti penerbitan atau pembelian kembali saham. Melalui pemahaman konsep dan karakteristik ekuitas, pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan

manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, pendanaan, serta strategi bisnis perusahaan.

Pengambilan Keputusan yang baik terkait dengan investasi, pendanaan, serta strategi bisnis perusahaan, tentunya akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, seperti meningkatkan nilai perusahaan, mengoptimalkan struktur modal, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memperkuat daya saing agar *going concern*. Pada bab ini akan membahas mengenai konsep dan karakteristik ekuitas.

B. Konsep Ekuitas

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (1994) ekuitas adalah bagian hak kepemilikan dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan karenanya tidak mewakili ukuran nilai jual perusahaan. Berikut ini merupakan rumus dari ekuitas, yaitu aset dikurangi liabilitas.

$$\text{Ekuitas} = \text{Aset} - \text{Liabilitas}$$

Gambar 8.1 Rumus Ekuitas

Menurut Kasmir (2015) untuk mengukur ekuitas dapat menggunakan rasio *return on equity* yaitu dengan membandingkan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pengembalian dana yang diberikan kepada pemegang saham. Ekuitas berdasarkan klasifikasi dan jenisnya tergantung pada bentuk hukum perusahaan: perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan jawatan (perjan), koperasi, dan lain-lain (Kartikahadi *et al.*, 2023). Namun, saat ini ekuitas tidak lagi diatur dalam PSAK 21, melainkan diatur dalam PSAK 201 yaitu tentang penyajian laporan keuangan, yang didalamnya terdapat konsep ekuitas.

Sesuai perubahan PSAK, dan evolusi entitas, bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan menjadi semakin banyak. Bagian yang umum ditemukan dalam kelompok ekuitas

meliputi: (1) modal saham; (2) tambahan modal disetor; (3) uang muka setoran modal; (4) saldo laba; (5) komponen ekuitas lain; (6) ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan (7) kepentingan ekuitas. Menurut Kusuma & Bangun (2011) terdapat jenis jenis ekuitas dalam perusahaan antara lain: (1) perusahaan perseorangan hanya terdiri dari ekuitas pemilik; (2) perusahaan Persekutuan terdiri dari modal masing-masing sekutu; (3) pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, ekuitas pemilik dibedakan menjadi modal saham dan saldo.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, ekuitas dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan sumbernya:

1. Penyetoran modal dari pemilik atau persero
2. Saldo laba yang berasal dari hasil usaha (*retained earnings*)
3. Modal penilaian kembali aset (*appraisal capital*)
4. Modal donasi (*donated capital*)

Pemisahan ekuitas berdasarkan sumber ini sangat penting dalam kaitannya dengan aspek hukum terkait ekuitas, misalnya sehubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan atau menggunakan saldo laba dari hasil bisnis, distribusi laba dalam kemitraan persekutuan, pembagian dividen oleh suatu perseroan terbatas, atau penarikan kembali modal.

C. Komponen Ekuitas

Menurut Martani *et al* (2016) beberapa komponen dari ekuitas antara lain:

1. Saldo Laba (*Retained Earnings*)

Saldo laba yang dimaksud disini adalah saldo yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, melainkan di tahan di perusahaan. Laba tersebut dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan perusahaan, pelunasan utang, atau investasi pada aset baru. Sumber utama ekuitas pemegang saham adalah: (1) jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan;

(2) dan jumlah yang di peroleh perusahaan melalui menjalankan bisnis.

2. Dividen

Dividen adalah bagaian dari laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk, ada yang berbentuk dividen kas, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan dividen likuidasi. Untuk dividen kas, saham, dan properti kita sudah sering mendengarnya, namun untuk dividen scrip dan likuidasi ini masih asing ditelinga kita. Dividen terbagi menjadi berbagai jenis menurut Martani & Irsyad (2016), antara lain adalah sebagai berikut: (1) Dividen kas; (2) Dividen properti; (3) Dividen Likuidasi; dan (4) Dividen Saham.

3. Tambahan Modal disetor

Jumlah uang yang diinvestasikan pemegang saham di suatu perusahaan dengan membeli saham langsung dari perusahaan, bukan di pasar sekunder. Termasuk uang yang dibayarkan oleh pemegang saham atas nilai nominal saham yang diterbitkan. Pos-pos ini menjumlahkan berbagai pos, seperti agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasuri, selisih mata uang pada modal disetor, selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali. Rinciannya akan dibahas sebagai berikut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2024):

a. Agio Saham

Ini adalah pos setoran yang berlebih oleh pemegang saham diatas nilai nominalnya, sesudah pengurangan biaya emisi Efek ekuitas. Biaya emisi Efek ekuitas adalah instrumen keuangan yang berkaitan dengan penerbitan Efek ekuitas emiten atau perusahaan publik.

b. Selisih Modal dari Transaksi Saham Treasuri

Pos ini, merupakan selisih antara harga pembelian kembali dan harga penjualan kembali saham treasuri.

c. Selisih Kurs atas Modal Disetor

Ini merupakan selisih nilai tukar mata uang asing yang terjadi sehubungan dengan transaksi modal.

d. Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Pengendali

Pos ini mencerminkan selisih antara jumlah imbalan yang ditransfer atau diterima dan jumlah tercatat setiap transaksi yang terkait dengan penggabungan atau pelepasan bisnis di antara entitas pengendali.

4. Modal Saham

Nilai saham yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menghasilkan dana dari investor. Adapun karakteristik dari saham adalah hak pembagiannya proporsional, memiliki risiko kerugian terbesar, mendapatkan pendapatan atas keberhasilan perusahaan, pada saat pembubaran perusahaan, tidak menjamin bahwa pemangku kepentingan mendapatkan aset dan dividen.

5. Modal Setoran Tambahan

Penyetoran jumlah modal oleh pemegang saham kepada perusahaan, yang jumlah dibayarannya melebihi nilai nominal saham yang diterbitkan selama IPO suatu perusahaan. IPO adalah ketika perusahaan untuk pertama kalinya melakukan penjualan saham kepada masyarakat umum. Jumlah modal yang disetor dibedakan berdasarkan 2 hal, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa, namun mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perusahaan mengalami keuntungan. Pemilik saham biasa juga memiliki hak suara pada rapat RUPS, dan pada saat likuidasi pemilik saham biasa berhak memperoleh kekayaan perusahaan setelah kewajiban dibayarkan. Saham preferen adalah saham yang diterbitkan dengan hak yang melebihi saham biasa. Contohnya pada saat likuidasi, maka saham preferen yang terlebih dahulu diberikan hak nya

dibandingkan dengan saham biasa. Selain itu diperbolehkan juga untuk mengusulkan siapa yang menjadi direksi atau komisaris pada saat pencalonan (Yulia, 2016).

6. Selisih Penilaian Kembali

Perubahan nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan akibat penyesuaian nilai pasar.

D. Karakteristik Ekuitas

Ekuitas memiliki kesamaan dengan aset neto, yaitu selisih dari aset dan liabilitas, inilah yang dikatakan ekuitas. Ekuitas dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan aset netonya, apakah terjadi pertambahan atau pengurangan dari sumber pemilik ataupun investor (Ervina *et al.*, 2022). Ekuitas memberikan informasi kepada pihak kepentingan tentang kepengurusan manajemen dan efisiensi perusahaan, serta sebagai pertanggungjawaban pada pemilik terkait ekuitas pemegang saham, minimal sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi. Terdapat dua karakteristik ekuitas yang dapat dipahami, antara lain:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan utang perusahaan. Ketika perusahaan melakukan penambahan modal, maka aset perusahaan akan bertambah, aset ini tentunya harus kita tahu terlebih dahulu apakah berasal dari pemilik usaha, investor, atau dari hutang. Oleh karena itu dikatakan bahwa ekuitas sama dengan aset neto.
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang, akibat kenaikan atau penurunan aset neto, baik yang bersumber dari investasi oleh pemilik atau yang berasal dari buktun pemilik (pendapatan dan biaya).
3. Tidak memiliki batas waktu pengembalian. Berbeda dengan utang, ekuitas tidak memiliki kewajiban pembayaran kembali dalam periode tertentu.

4. Berisiko tetapi berpotensi menguntungkan. Pemegang ekuitas menanggung risiko keuangan perusahaan, tetapi mereka juga berpeluang mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen dan peningkatan nilai saham.
5. Dapat diperjualbelikan di Pasar Keuangan. Dalam perusahaan yang telah *go public*, ekuitas biasanya berbentuk saham yang bisa diperjualbelikan di bursa efek.
6. Dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Nilai ekuitas dapat mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan laba, rugi, serta kebijakan keuangan perusahaan.
7. Pencatatan modal saham dilakukan dengan pengkalian *apr value* atau *stated value*. Modal saham dicatat jika saham telah terbit.
8. Saldo akhir tahun dihitung dengan cara penambahan saldo awal dengan laba bersih, kemudian di selisihkan dengan dividen pada tahun berjalan.

E. Pelaporan dan Pengungkapan Ekuitas

PSAK 201 pada paragraf 79 mengatur tentang pelaporan dan pengungkapan ekuitas pada Perseroan Terbatas. Hal yang diungkapkan pada perusahaan dalam laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk setiap jenis saham, terdiri dari: (1) jumlah seluruh saham modal dasar yang diotorisasi; (2) jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, beserta saham yang telah ditempatkan dan belum disetor penuh; (3) nilai nominal saham, atau nilai saham yang tidak mempunyai nilai nominal; (4) rekonsiliasi jumlah seluruh saham yang beredar pada awal dan akhir periode; (5) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali modal; (6) saham yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh anak perusahaan atau entitas asiasinya; (7) saham yang dicadangkan untuk diterbitkan

berdasarkan opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan ketentuannya.

2. Uraian terkait sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Penyampaian dan penjelasan untuk entitas yang tidak terbagi atas saham, diatur dalam paragraf 80:

“Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwakilan, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 79(a), yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas”.

F. Pelaporan dan Pengungkapan Ekuitas untuk Emiten atau Perusahaan Publik

Entitas yang tercatat di BEI yang bertujuan menghimpun dana dari pasar yaitu melalui penerbitan saham atau obligasi sendiri disebut emiten dan tergolong perusahaan publik. Dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat, kewajiban pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta kegiatan usaha, khususnya yang menyangkut ekuitas, diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, pada prinsipnya merujuk dan mengakui pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun, berdasarkan hal hal tertentu yang dianggap perlu, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan peraturan atau keputusan tersendiri.

G. Kesimpulan

Ekuitas merupakan salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan yang mencerminkan hak kepemilikan terhadap suatu perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban atau lialibitas. Sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan, ekuitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian serta mempertahankan operasionalnya tanpa

ketergantungan yang berlebihan pada utang. Oleh karena itu, ekuitas sering menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan investor, kreditor, serta manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Ekuitas dapat berasal dari berbagai sumber, seperti investasi pemilik, laba ditahan, modal saham, tambahan modal disetor, dan lain sebagainya. Dalam penyajian laporan keuangan, struktur ekuitas terdiri dari beberapa komponen utama antara lain saldo laba (retained earnings), dividen, modal disetor, modal saham, modal setoran tambahan, dan selisih penilaian kembali. Masing-masing komponen ini memiliki peran tersendiri dalam menentukan besarnya ekuitas yang dimiliki perusahaan. Misalnya, laba ditahan berkontribusi dalam pertumbuhan modal perusahaan karena laba yang tidak dibagikan dapat digunakan untuk ekspansi usaha atau pelunasan utang. Selain itu, keputusan terkait dividen juga dapat berdampak langsung terhadap ekuitas. Pembagian dividen kepada pemegang saham mengurangi saldo laba, sedangkan laba ditahan dapat memperbesar ekuitas dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Modal saham dan modal disetor merupakan bentuk kontribusi langsung dari pemegang saham yang memberikan tambahan dana bagi perusahaan, sementara selisih penilaian kembali mencerminkan perubahan nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi pasar.

Dari sisi karakteristik, ekuitas memiliki beberapa ciri khas, seperti bersifat fluktuatif, bergantung pada kinerja keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh laba dan rugi. Selain itu, ekuitas tidak memiliki batas waktu pengembalian, berbeda dengan utang memiliki kewajiban pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Meskipun memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan utang, ekuitas menawarkan potensi keuntungan yang besar bagi pemegang saham dalam bentuk dividen. Dalam perusahaan yang telah go public, ekuitas dapat diperjualbelikan di bursa efek, sehingga nilainya juga dipengaruhi oleh kondisi pasar dan ekspektasi investor.

Pengukuran ekuitas dapat dilakukan melalui rasio *Return on Equity* (ROE), yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat pengembalian investasi yang diterima oleh pemegang saham, yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan dengan struktur ekuitas yang sehat akan lebih menarik investor dan kreditor, serta memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik dalam menghadapi risiko bisnis.

Melalui pemahaman konsep, komponen, dan karakteristik ekuitas, pemangku kepentingan dan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait investasi, strategi pendanaan, serta pengelolaan modal. Pengelolaan ekuitas yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, memperkuat kepercayaan pemegang saham, serta memberikan daya saing yang lebih kuat di industri. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengoptimalkan struktur modalnya dengan menyeimbangkan penggunaan ekuitas dan liabilitas guna mencapai keberlanjutan usaha (*going concern*) dan pertumbuhan jangka panjang yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervina, N., Zuhra, S., Werastuti, D. N. S., Amani, T., Agustina, P. A. A., Wahidahwati, Tenriwaru, Rohmatunnisa, L. D., Murniati, A., Suharsono, R. S., Saleh, L., Hanafie, H., & Dura, J. (2022). *Teori Akuntansi* (S. Bahri (ed.)). CV Media Sains Indonesia. www.medsan.co.id
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Leo, L., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2023). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS* (Tim Editor). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Aplikasi Coretax Portal Financial Information Reporter (FIR)/ Lembaga Keuangan*. Tim Pengembangan dan Implementasi PSIAP.
- Kusuma, B. H., & Bangun, N. (2011). Analisis Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(3), 183–194.
- Martani, D., & Irsyad. (2016). *Akuntansi Keuangan 2* (p. 34). Departemenn Akuntansi FEUI.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (A. Suslia (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat. www.penerbitsalemba.com
- Yulia. (2016). Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 4(Desember), 2016.

TENTANG PENULIS



Indriyani, S.E., M.Ak.
Politeknik Negeri Lampung

Penulis lahir di Natar (Lampung Selatan) pada tanggal 02 November 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, S2 pada program studi Ilmu Akuntansi, Universitas Lampung. Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan. Penulis termotivasi untuk menulis karena untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan, agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Adapun, sejumlah karya tulis yang sudah diterbitkan di antaranya: (1) *Effect of the Covid-19 Pandemic and Good Corporate Governance on the Timeliness of the Company's Annual Financial Reports*; (2) *Strategies for Economic Recovery Through the Post Covid-19 Tourism and Transportation*; (3) Analisis Perhitungan Harga Jual Produk Berbasis *Cost Plus Pricing Method* pada Permata Bakery; (4) Analisis Komprehensif Audit Report Lag Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif per Sektor Industri).

BAB 9

KONSEP DAN KARAKTERISTIK PENDAPATAN

Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

A. Pendahuluan

Pendapatan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Menurut International Financial Reporting Standards (IFRS 15), pendapatan didefinisikan sebagai imbalan yang diperoleh dari pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan selama aktivitas operasional entitas (IASB, 2018). Di sisi lain, menurut Statement of Financial Accounting Concepts SFAC) No. 6 yang diterbitkan oleh (Financial Accounting Standards Board (FASB), 1985), pendapatan adalah arus masuk aset atau penyelesaian kewajiban yang dihasilkan dari aktivitas utama suatu entitas. Dengan kata lain, pendapatan mencerminkan hasil aktivitas ekonomi entitas yang meningkatkan ekuitas selain dari kontribusi pemilik.

Konsep pendapatan memiliki karakteristik utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan. Pertama, pendapatan harus dapat diukur secara andal dengan nilai yang pasti. Kedua, pendapatan diakui pada saat entitas telah memenuhi kewajiban kinerjanya kepada pelanggan, yang umumnya terjadi saat risiko dan manfaat atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Ketiga, pendapatan mencerminkan hasil dari aktivitas normal entitas, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari transaksi tidak biasa atau *non-*

recurring, seperti penjualan aset tetap, tidak dianggap sebagai pendapatan operasional utama.

Pendekatan akuntansi berbasis akrual digunakan dalam pengakuan pendapatan, yang mengakui pendapatan pada saat diperoleh meskipun kas belum diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip pencocokan (*matching principle*) yang bertujuan untuk mencatat pendapatan dan beban terkait dalam periode yang sama, guna memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan. Standar pengakuan pendapatan yang diterapkan di Indonesia merujuk pada PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021), yang mengadopsi IFRS 15 (IASB, 2018) dan memberikan panduan rinci tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pendapatan.

Penelitian terdahulu telah membahas pentingnya pengakuan pendapatan yang tepat terhadap kualitas laporan keuangan. Misalnya, studi oleh (Dechow *et al.*, 1995) dalam jurnal *Accounting Review* menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan berbasis akrual memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor dibandingkan pengakuan berbasis kas. Selain itu, penelitian oleh (Healy & Wahlen, 1999) dalam jurnal *Journal of Accounting Literature* menekankan bahwa pendapatan yang diakui secara tidak tepat dapat mengarah pada praktik manajemen laba, yang berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan karakteristik pendapatan sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pendekatan yang tepat terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan akan memberikan manfaat besar bagi pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal, dalam mengevaluasi kinerja entitas dan prospek masa depan.

B. Konsep Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan keberhasilan entitas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Secara umum, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik (PSAK 23, 2020).

Dalam akuntansi, pendapatan diakui ketika dua kriteria utama terpenuhi: pertama, entitas telah menyelesaikan kewajiban kinerjanya dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, dan kedua, entitas dapat mengukur jumlah imbalan yang diharapkan secara andal. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS 15) memberikan lima langkah untuk mengakui pendapatan, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban kinerja, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja, dan mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi (IASB, 2018).

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional berasal dari aktivitas utama entitas, seperti penjualan produk atau jasa. Sebaliknya, pendapatan non-operasional mencakup sumber-sumber lain yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama, seperti bunga, dividen, atau keuntungan dari penjualan aset tetap.

1. Definisi Pendapatan

a. Definisi menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 72)

PSAK 72 mengatur tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 yang bertujuan untuk menyusun prinsip-prinsip pengakuan pendapatan yang konsisten dan transparan.

Berikut adalah definisi-definisi utama menurut PSAK 72:

1) Pendapatan

Merupakan jumlah yang diterima atau akan diterima oleh entitas sebagai imbalan atas barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan, yang mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima dari kontrak.

2) Kontrak dengan Pelanggan

Merupakan kesepakatan yang disetujui antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban terkait barang atau jasa yang akan diserahkan. Kontrak ini dapat berupa tertulis atau lisan.

3) Kewajiban Pelaksanaan (*Performance Obligation*)

Merupakan janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, yang dapat bersifat terpisah atau dapat digabungkan dengan kewajiban pelaksanaan lainnya.

4) Transaksi Terpisah (*Distinct*)

Sebuah barang atau jasa dianggap terpisah jika pelanggan dapat memanfaatkan barang atau jasa tersebut secara mandiri atau bersamaan dengan sumber daya yang tersedia bagi pelanggan.

5) Harga Transaksi

Merupakan jumlah imbalan yang diharapkan oleh entitas sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan, termasuk estimasi variabel yang ada dan mempertimbangkan waktu nilai uang.

PSAK 72 menekankan pentingnya pengakuan pendapatan berdasarkan transfer kendali atas barang atau jasa yang diserahkan, bukan berdasarkan pemindahan risiko atau kepemilikan. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan untuk menganalisis kontrak secara mendalam dan mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan secara lebih rinci.

b. Definisi menurut IFRS 15

Menurut IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers*, pendapatan didefinisikan sebagai jumlah imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh entitas sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. IFRS 15 mengatur bagaimana pendapatan diakui dan diukur dalam konteks kontrak dengan pelanggan. Proses pengakuan pendapatan mengikuti lima langkah utama yang melibatkan identifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, harga transaksi, alokasi harga kepada kewajiban pelaksanaan, dan pengakuan pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

c. Definisi Konsep pendapatan menurut FASB

Dalam FASB *Concepts Statement* No. 8 (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2021) menekankan bahwa pendapatan adalah kenaikan dalam aset bersih yang timbul dari kegiatan entitas yang mengarah pada peningkatan kekayaan ekonominya, dan pendapatan ini dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan, seperti pengalihan barang atau penyediaan jasa.

FASB menyatakan bahwa pendapatan mencerminkan aliran sumber daya yang diterima oleh entitas sebagai bagian dari transaksi yang terjadi antara entitas dan pihak lain. Ini dapat berupa penjualan barang, jasa, atau kontribusi dari pihak lain yang meningkatkan posisi keuangan entitas. FASB juga menekankan pentingnya mengukur pendapatan berdasarkan kontrol yang telah dipindahkan kepada pelanggan dalam konteks kontrak dan transaksi, dengan mempertimbangkan sifat barang atau jasa yang diserahkan, serta kondisi-kondisi yang terkait dengan pengakuan pendapatan.isi menurut FASB (Financial Accounting Standards Board (FASB), 1985).

C. Elemen-Elemen Pendapatan

Pendapatan adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang menggambarkan arus masuk sumber daya ekonomi ke dalam entitas sebagai akibat dari transaksi yang terjadi, terutama melalui pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Menurut FASB *Concepts Statement* No. 6 (Financial Accounting Standards Board (FASB), 1985) dan IFRS 15 (IASB, 2018), pendapatan diakui berdasarkan beberapa elemen utama yang menjadi dasar pengukuran dan pengakuan pendapatan. Elemen-elemen tersebut meliputi:

1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak yang sah adalah dasar utama pengakuan pendapatan. Sebuah kontrak harus dapat diidentifikasi dan diuraikan dengan jelas antara entitas dan pelanggan. Hal ini mencakup ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal terkait harga transaksi dan kondisi yang perlu dipenuhi.

2. Kewajiban Pelaksanaan

Kewajiban pelaksanaan merujuk pada komitmen entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan kontrak. Setiap kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi akan mempengaruhi cara dan waktu pengakuan pendapatan.

3. Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima oleh entitas sebagai kompensasi atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Penentuan harga ini melibatkan analisis terhadap potongan, diskon, dan pengembalian barang yang mungkin terjadi, serta estimasi tentang jumlah pembayaran yang akhirnya akan diterima.

4. Alokasi Harga kepada Kewajiban Pelaksanaan

Jika sebuah kontrak melibatkan lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, harga transaksi harus dialokasikan ke kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan harga relatif masing-masing. Ini memastikan bahwa pendapatan diakui

secara proporsional dengan pengalihan barang atau jasa yang terjadi.

5. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui saat entitas mengalihkan kontrol atas barang atau jasa kepada pelanggan. Ini bisa terjadi baik pada titik waktu tertentu atau selama periode waktu tertentu, tergantung pada cara pengalihan kontrol terjadi.

1. Arus Masuk Ekonomi

Pendapatan diartikan sebagai arus masuk ekonomi ke dalam entitas selama periode tertentu. Arus masuk ini biasanya berupa penerimaan kas, peningkatan piutang, atau penurunan liabilitas yang timbul dari penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* (IASB, 2018), arus masuk ekonomi harus dapat diukur secara andal dan diakui dalam laporan keuangan. Contohnya, arus masuk ekonomi terjadi ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan produk.

2. Peningkatan Ekuitas

Pendapatan berkaitan erat dengan peningkatan ekuitas perusahaan, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Ketika pendapatan diakui, hal ini mencerminkan hasil dari aktivitas perusahaan yang berhasil menciptakan nilai tambah. Misalnya, penjualan barang meningkatkan kas atau piutang, yang pada akhirnya meningkatkan ekuitas melalui laba bersih. Namun, pendapatan tidak termasuk kontribusi modal dari pemilik, seperti penyeteroran saham oleh pemegang saham. Peningkatan ekuitas hanya terkait dengan hasil operasi perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1* yang menyatakan bahwa pendapatan berkontribusi pada kenaikan ekuitas secara langsung melalui laba (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021).

3. Aktivitas Operasional Normal

Pendapatan umumnya berasal dari aktivitas operasional normal, yaitu kegiatan inti yang menjadi fokus bisnis perusahaan. Aktivitas operasional normal berbeda untuk setiap jenis entitas:

- a. Perusahaan dagang: Pendapatan dari penjualan barang dagangan.
- b. Perusahaan jasa: Pendapatan dari pemberian layanan.
- c. Perusahaan manufaktur: Pendapatan dari penjualan barang hasil produksi.

Menurut PSAK, pendapatan diakui jika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan kewajiban kontraktual. Ini menunjukkan bahwa pendapatan adalah hasil langsung dari aktivitas normal yang dilakukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan.

D. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan sifatnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana suatu entitas menghasilkan pendapatan. Berikut penjelasan dari setiap jenis klasifikasi pendapatan:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas inti atau utama perusahaan. Jenis pendapatan ini mencerminkan kinerja utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Menurut PSAK 1 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2020), pendapatan operasional mencerminkan kinerja utama yang menjadi fokus bisnis perusahaan. Pendapatan operasional biasanya ditampilkan pada bagian atas laporan laba rugi, sebagai elemen utama yang menentukan laba kotor. Adapun ciri utama dari pendapatan operasional adalah:

- a. Berasal dari aktivitas utama perusahaan;
- b. Mencerminkan kinerja inti perusahaan; dan
- c. Bersifat berulan dan stabil.

Pendapatan operasional adalah metrik penting dalam mengevaluasi profitabilitas inti suatu entitas. Investor dan kreditor sering melihat pendapatan operasional untuk memahami potensi pertumbuhan perusahaan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pendapatan non-operasional. Misalnya, dua perusahaan mungkin memiliki laba bersih yang sama, tetapi jika salah satu perusahaan mendapatkan sebagian besar labanya dari pendapatan operasional, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja yang lebih solid dibandingkan perusahaan lain yang bergantung pada pendapatan insidental.

Pendapatan operasional memiliki pengaruh besar pada beberapa elemen penting laporan keuangan, seperti:

- a. **Laba Kotor:** Pendapatan operasional dikurangi harga pokok penjualan (HPP).
- b. **Laba Operasi:** Pendapatan operasional setelah dikurangi beban operasional lainnya, seperti gaji, utilitas, dan biaya pemasaran.

Pendapatan operasional yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aktivitas inti tanpa bergantung pada pendapatan non-operasional.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang tidak berasal dari aktivitas utama perusahaan, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap total pendapatan. Contoh pendapatan non-operasional termasuk:

- a. Pendapatan bunga atas investasi.
- b. Keuntungan dari penjualan aset tetap.
- c. Dividen dari investasi ekuitas.

Pendapatan non-operasional bersifat insidental atau sekunder, dan tidak mencerminkan aktivitas inti perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2021), pendapatan non-operasional sering kali dicatat di bawah pendapatan operasional pada laporan laba rugi, sehingga memberikan pandangan yang jelas tentang komponen laba bersih.

3. Pendapatan *Recurring* dan *Non-Recurring*

Pendapatan *recurring* dan *non-recurring* adalah dua klasifikasi pendapatan berdasarkan sifat keberlanjutan dan frekuensinya. Klasifikasi ini sering digunakan dalam analisis keuangan untuk membedakan antara pendapatan yang stabil dan berkelanjutan dengan pendapatan yang bersifat insidental atau tidak berulang.

Pendapatan *recurring* adalah pendapatan yang dihasilkan secara konsisten dari aktivitas operasional normal perusahaan dalam periode tertentu. Pendapatan ini merupakan sumber utama yang mencerminkan stabilitas operasional perusahaan dan sering kali menjadi dasar dalam mengevaluasi potensi pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan berulang mencerminkan stabilitas operasional karena bersumber dari aktivitas inti yang dilakukan secara konsisten oleh entitas” (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2021).

Ciri-ciri Pendapatan *Recurring* adalah bersumber dari aktivitas inti bisnis, seperti penjualan barang, jasa, atau langganan, dapat diprediksi karena bersifat berulang, pendapatan ini cenderung stabil dan memberikan proyeksi yang jelas untuk pendapatan masa depan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendapatan *non-recurring* adalah pendapatan yang bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak dihasilkan dari aktivitas operasional utama perusahaan. Pendapatan ini biasanya berasal dari peristiwa luar biasa, aktivitas sekunder, atau transaksi yang jarang terjadi. Pendapatan *non-recurring* tidak mencerminkan kinerja operasional berkelanjutan dan sering dianggap sebagai elemen sementara dalam laporan keuangan” (IASB, 2018). Adapun ciri-ciri dari pendapatan *non-recurring* adalah sumber pendapatan tidak rutin, tidak dapat diprediksi dan tidak mencerminkan operasi inti entitas.

E. Karakteristik Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan adalah proses akuntansi untuk menentukan kapan dan bagaimana pendapatan dicatat dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara akurat. Pendapatan diakui berdasarkan framework akuntansi yang diatur dalam standar seperti PSAK 72 (*Revenue from Contracts with Customers*) di Indonesia dan IFRS 15 secara internasional.

Menurut PSAK 72 (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021), pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dengan cara mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan pendapatan secara berbasis kontrak. Prinsip dasar pengakuan pendapatan yaitu, *realization principle* (realisasi) dimana pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi benar-benar diperoleh dan dapat diukur secara andal dan *earning principle* (pendapatan dihasilkan), dimana pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan.

a. *Realization Principle* (Prinsip Realisasi)

Prinsip realisasi menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi benar-benar diperoleh oleh perusahaan dan dapat diukur secara andal. Dengan kata lain, pendapatan harus direalisasikan atau dapat direalisasikan sebelum dapat dicatat. Menurut (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2021), pendapatan harus diakui ketika manfaat ekonomi dapat direalisasikan dan nilai transaksinya dapat diukur secara andal.

b. *Earning Principle* (Prinsip Pendapatan Dihasilkan)

Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian

kontrak. Prinsip penghasilan mengharuskan pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yang menunjukkan penyelesaian proses penghasilan oleh perusahaan” (IASB, 2018). Pendapatan tidak hanya diakui berdasarkan penerimaan kas, melainkan juga ketika kewajiban perusahaan untuk memberikan barang atau jasa telah diselesaikan.

2. Kriteria Pengakuan Pendapatan

a. Risiko dan Manfaat Telah Berpindah

Menurut (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2021), pendapatan diakui ketika risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah, yang menunjukkan pelanggan telah memperoleh kendali atas barang atau jasa. Kriteria ini menekankan bahwa pendapatan hanya dapat diakui ketika risiko dan manfaat kepemilikan barang atau jasa telah sepenuhnya berpindah dari perusahaan ke pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut dan perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban substantif terkait kepemilikan barang. Indikator perpindahan risiko dan manfaat kendali barang telah beralih ke pelanggan adalah:

- 1) Pelanggan dapat mengarahkan penggunaan barang atau jasa dan memperoleh manfaat dari barang tersebut;
- 2) Pelanggan Menanggung Risiko Kerugian:
Setelah risiko berpindah, pelanggan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan barang.
- 3) Pelanggan Memiliki Hak Legal atas Barang:
Hak ini mencakup kemampuan untuk menjual, menggunakan atau memodifikasi barang tanpa batasan.

b. Entitas Telah Memenuhi Kewajiban Kinerja

Pengakuan pendapatan juga memerlukan pemenuhan kewajiban kinerja oleh entitas. Kewajiban kinerja adalah janji perusahaan dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang dapat dibedakan kepada pelanggan. Pemenuhan Kewajiban Kinerja Dapat Terjadi dengan Dua Cara (PSAK 72) (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021):

- 1) *At a Point in Time* (Sekali Selesai): Kewajiban kinerja dianggap selesai pada satu titik waktu tertentu. Ini biasanya berlaku untuk penjualan barang atau jasa yang memiliki penyerahan langsung. Indikator Pemenuhan Kewajiban Kinerja adalah pelanggan menerima kendali atas barang atau jasa. entitas tidak lagi memiliki kontrol atas barang atau jasa tersebut dan hak pembayaran atas barang atau jasa telah diterima.
- 2) *Over Time* (Bertahap): Pendapatan diakui secara bertahap jika pelanggan menerima manfaat barang atau jasa secara simultan selama proses penyelesaian. Adapun kriteria pengakuan pendapatan bertahap, yaitu pekerjaan entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan, aset yang diciptakan tidak memiliki alternatif penggunaan, dan entitas memiliki hak atas pembayaran untuk pekerjaan yang selesai.

3. Prinsip Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai entitas, baik sektor publik maupun swasta. Prinsip ini mengharuskan pencatatan transaksi ekonomi dilakukan pada saat kejadian, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan suatu entitas

Menurut *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1* (International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), n.d.), akuntansi berbasis akrual adalah metode akuntansi yang mencatat transaksi dan kejadian lainnya pada saat terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)* yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

- a. **Peningkatan Transparansi:** Laporan keuangan mencerminkan seluruh kewajiban dan aset secara lebih komprehensif.
- b. **Pengukuran Kinerja yang Akurat:** Pendapatan dan beban dicatat sesuai dengan periode terjadinya, sehingga mencerminkan hasil operasional yang sebenarnya.
- c. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Informasi keuangan yang lebih lengkap memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih tepat.

Di Indonesia, akuntansi berbasis akrual telah diterapkan pada sektor publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (*Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*., n.d.). Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, entitas bisnis juga menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara internasional.

4. Pengukuran Pendapatan

a. Pengukuran Berdasarkan Nilai Wajar

Pendapatan diukur berdasarkan **nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima**. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis IFRS, khususnya dalam **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**, nilai wajar mencerminkan jumlah yang akan diterima dalam transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berpengetahuan luas dan memiliki itikad baik. Pendapatan harus diukur setelah dikurangi dengan jumlah estimasi diskon, insentif, rabat, dan potongan lainnya yang diberikan kepada pelanggan. Dalam hal ini, jika ada imbalan variabel, entitas harus memperkirakan jumlah imbalan yang akan diterima dengan menggunakan metode yang paling tepat, baik metode nilai ekspektasian maupun metode jumlah paling mungkin.

b. Diskon dan Potongan Penjualan

Diskon dan potongan penjualan merupakan pengurangan harga jual yang diberikan oleh entitas kepada pelanggan, baik dalam bentuk diskon dagang (*trade discount*) maupun diskon tunai (*cash discount*).

1) Diskon Dagang

- a) Diskon yang diberikan kepada pelanggan dalam bentuk pengurangan harga katalog atau harga daftar.
- b) Tidak dicatat secara eksplisit dalam laporan keuangan, karena harga transaksi yang diakui langsung merupakan harga setelah diskon dagang.

2) Diskon Tunai

- a) Diskon yang diberikan kepada pelanggan sebagai insentif untuk pembayaran cepat.
- b) Dicatat sebagai pengurang pendapatan jika kemungkinan besar pelanggan akan mengambil diskon tersebut.

Dalam PSAK 72, diskon dan potongan penjualan dikategorikan sebagai **imbalan variabel**, yang harus diestimasi pada saat pengakuan pendapatan dan disesuaikan jika diperlukan. Jika ada kemungkinan pelanggan tidak memenuhi syarat diskon, maka jumlah pendapatan yang diakui harus disesuaikan berdasarkan ekspektasi penerimaan aktual.

5. Penyajian Pendapatan dalam Laporan Keuangan

Pendapatan merupakan elemen utama dalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan **PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan** dan **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**, pendapatan harus disajikan secara jelas dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas agar dapat memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan.

a. Laporan Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan sebagai elemen utama yang menentukan laba atau rugi bersih perusahaan. PSAK 1 mensyaratkan bahwa pendapatan harus disajikan secara terpisah dari beban untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Penyajian Pendapatan dalam Laporan Laba Rugi, dicatat sebagai pendapatan usaha utama dimana mencerminkan pendapatan dari aktivitas utama entitas, misalnya penjualan barang atau jasa, Pendapatan lain-lain dimana termasuk pendapatan di luar kegiatan utama, seperti bunga, dividen, atau keuntungan dari penjualan aset, dan

b. Laporan Arus Kas

Pendapatan yang diperoleh perusahaan juga memengaruhi laporan arus kas, yang disusun berdasarkan **PSAK 2: Laporan Arus Kas**. Dalam laporan arus kas, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber arus kas yang dihasilkan, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a) Mencerminkan penerimaan kas yang berasal dari pendapatan utama perusahaan, misalnya kas yang diterima dari pelanggan sebagai pembayaran atas barang dan jasa.
- b) Jika entitas menggunakan metode langsung, penerimaan kas dari pelanggan dilaporkan sebagai komponen utama dalam arus kas operasi.
- c) Jika menggunakan metode tidak langsung, laba bersih yang berasal dari pendapatan dikoreksi untuk memperhitungkan perubahan aset dan kewajiban operasional.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Termasuk pendapatan dari penjualan aset tetap, investasi, atau pendapatan dividen dan bunga (jika tidak diklasifikasikan sebagai operasi).

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pendapatan dalam bentuk kas dari penerbitan saham atau penerimaan pinjaman termasuk dalam bagian ini.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan atau individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain:

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Menurut (Mankiw, 2020), faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan perusahaan atau individu. Misalnya, dalam kondisi resesi, pendapatan cenderung menurun karena daya beli masyarakat menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mankiw, 2020) yang menyatakan bahwa "kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP dan tingkat pengangguran

memiliki dampak langsung pada pendapatan rumah tangga dan perusahaan."

b. Regulasi dan Standar Akuntansi

Regulasi pemerintah dan standar akuntansi yang berlaku dapat mempengaruhi cara pendapatan diakui dan dilaporkan. Seperti yang dijelaskan oleh (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2021), perubahan dalam regulasi perpajakan atau standar pelaporan keuangan (seperti PSAK atau IFRS) dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui secara legal dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Mereka menegaskan bahwa "standar akuntansi seperti IFRS menentukan kriteria pengakuan pendapatan, yang dapat mempengaruhi waktu dan jumlah pendapatan yang dilaporkan."

c. Sektor Usaha

Jenis sektor usaha juga mempengaruhi pendapatan. Misalnya, sektor teknologi cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur tradisional. Menurut (Porter, 2008), "struktur industri dan karakteristik sektor usaha memainkan peran penting dalam menentukan potensi pendapatan dan profitabilitas perusahaan." Selain itu, sektor usaha yang bergantung pada sumber daya alam (seperti pertambangan) dapat mengalami fluktuasi pendapatan yang besar karena perubahan harga komoditas di pasar global.

7. Implikasi Praktis dari Konsep dan Karakteristik Pendapatan

Konsep dan karakteristik pendapatan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam dunia bisnis, akuntansi, dan pengambilan keputusan. Pendapatan tidak hanya sekadar angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kinerja operasional dan kesehatan finansial suatu entitas. Berikut adalah beberapa implikasi praktis dari konsep dan karakteristik pendapatan:

a. Pengakuan Pendapatan dalam Pelaporan Keuangan

Pengakuan pendapatan merupakan aspek kritis dalam pelaporan keuangan. Menurut (Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2021), "standar akuntansi seperti IFRS 15 dan PSAK 72 mengatur kriteria pengakuan pendapatan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada waktu yang tepat dan mencerminkan transaksi yang sebenarnya." Implikasi praktisnya adalah perusahaan harus memastikan bahwa pendapatan diakui hanya ketika kewajiban kepada pelanggan telah dipenuhi, seperti penyerahan barang atau jasa. Hal ini mencegah praktik pelaporan pendapatan yang terlalu dini (premature revenue recognition) yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan.

b. Dampak pada Perencanaan dan Penganggaran

Konsep pendapatan memengaruhi proses perencanaan dan penganggaran perusahaan. Pendapatan yang diakui secara akurat membantu manajemen dalam membuat proyeksi keuangan yang realistis. Seperti yang dijelaskan oleh (Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, 2018), "pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi memungkinkan perusahaan untuk merencanakan alokasi sumber daya secara efektif, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan atau ekspansi pasar." Implikasi praktisnya adalah perusahaan dapat menghindari over-budgeting atau under-budgeting yang dapat mengganggu operasional.

c. Pengaruh pada Kinerja dan Evaluasi Manajemen

Pendapatan sering digunakan sebagai indikator kinerja manajemen. Menurut (Merchant, K. A., & Van der Stede, 2017) pendapatan adalah salah satu metrik kunci yang digunakan dalam sistem kontrol manajemen untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan insentif. Implikasi praktisnya adalah perusahaan dapat menggunakan pendapatan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja tim manajemen dan memberikan insentif yang sesuai.

Namun, perusahaan juga harus berhati-hati agar tidak hanya fokus pada pendapatan tanpa mempertimbangkan profitabilitas dan efisiensi.

F. Kesimpulan

Pendapatan merupakan elemen fundamental dalam laporan keuangan yang mencerminkan hasil ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Konsep pendapatan berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran arus masuk manfaat ekonomi yang meningkatkan ekuitas perusahaan, kecuali kontribusi dari pemilik. Karakteristik utama pendapatan meliputi keterukuran, keterwaktuan, dan kepastian realisasi. Pendapatan harus dapat diukur dengan andal, diakui pada periode yang sesuai, serta memiliki tingkat kepastian yang tinggi dalam realisasi kas atau manfaat ekonomi lainnya.

Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi dan standar akuntansi, serta sektor usaha turut mempengaruhi pencapaian pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan karakteristik pendapatan sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan keuangan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, perusahaan dapat mengelola pendapatannya secara lebih efektif, meningkatkan transparansi laporan keuangan, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *Accounting Review*, 193–225.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72: Pendapatian dari Kontrak dengan Pelanggan*. IAI.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (1985). *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6*. FASB.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (2021). *Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting*. CT: Financial Accounting Standards Board.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill/Irwin.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
- IASB. (2018). *IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers*. IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *PSAK 72: Pendapatian dari Kontrak dengan Pelanggan*. IAI.
- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). (n.d.). *IPSAS 1: Presentation of Financial Statements*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Intermediate Accounting* (17th ed). NJ: Wiley.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed). Cengage Learning.
- Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2017). *Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives* (4th ed.). Pearson.

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (n.d.). Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Porter, M. E. (2008). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.

TENTANG PENULIS



Daniel Kartika Adhi, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

Lahir di Semarang tanggal 26 Oktober 1967. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara (STIE PENA) Program Studi Akuntansi. Lulus Magister Akuntansi (S2) STIE Dharma Putra Semarang. Disamping sebagai staf pengajar, penulis juga sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Sophian Wongsargo Semarang. Pengalaman penulis lain adalah sebagai instruktur Bimtek APBD, TUKD, Penilaian Barang Milik Daerah, Penyusunan Sisdur Keuda, di berbagai Pemda mulai tahun 2006-2012 dan berapa *bookchapter*

BAB 10 | KONSEP DAN KARAKTERISTIK BEBAN DAN BIAYA

Kenny Ardillah, S.E., M.Ak., CFP., CSP., CSRS., CSRA., RSA.,
CRA., CPTT

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang alokasi beban, klasifikasi beban, serta hubungan antara biaya dan beban sangat penting dalam akuntansi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang akurat. Alokasi beban membantu mendistribusikan biaya sesuai dengan penggunaannya, sementara klasifikasi beban memisahkan beban berdasarkan karakteristik tertentu. Hubungan antara biaya dan beban menunjukkan bagaimana biaya yang timbul dalam produksi atau penjualan diakui sebagai beban yang sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini penting untuk pengelolaan keuangan yang transparan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan, seperti manajer dan investor.

B. Biaya

Biaya adalah jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya yang tersedia. Biaya dicatat sebagai aset dalam neraca perusahaan, dan mampu menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk keuntungan ekonomi (penurunan aset atau peningkatan kewajiban) biasanya berhubungan dengan aset

yang memberikan pendapatan. Biaya juga merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk barang atau jasa yang dalam pengertian ini biaya merupakan aset. Biaya yang mengacu pada biaya produksi dan biaya distribusi dan ada beberapa jenis, termasuk material, tenaga kerja, perbaikan dan pemulihan aset tetap, dan lainnya (untuk kebutuhan komunikasi, sosial dan budaya).

C. Beban

Beban adalah penurunan aset, atau peningkatan kewajiban, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang terkait dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Distribusi kepada pemegang klaim ekuitas bukan beban. Beban adalah unsur laporan keuangan yang terkait dengan kinerja keuangan suatu entitas. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Oleh karena itu, meskipun beban didefinisikan dalam hal perubahan aset dan kewajiban, informasi tentang beban sama pentingnya dengan informasi tentang aset dan kewajiban. Beban adalah biaya yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk sesuatu atau sumber daya yang dihabiskan dalam proses produksi untuk memperoleh produk tertentu (barang dan jasa). Beban menunjukkan utilitas sumber daya, yang sebagian besar terdiri dari nilai yang dibayarkan atau dibayarkan sebagai imbalan atas bahan baku dan barang yang dibeli dengan pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada perusahaan, dan komitmen yang disetujui perusahaan untuk membayarnya. Beban biasanya ditetapkan sebagai biaya yang diperuntukkan untuk produksi pada periode tertentu. Beban mencakup biaya dasar yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang terkait dengan jumlah bahan yang dikonsumsi, jumlah jam kerja, dan jumlah sumber daya lain yang dikeluarkan. Beban dapat merupakan biaya utama yang berkaitan dengan tujuan atau sasaran tertentu yang mencakup biaya manufaktur, operasi,

atau objek atau aktivitas lain yang menentukan jumlah sumber daya yang digunakan dalam istilah moneter.

Beban bukanlah konsep moneter semata yang merupakan ekspresi finansial dari konsumsi sumber daya internal atau eksternal dari bisnis yang diakui dalam laporan laba rugi. Konsep moneter dalam hal ini merupakan pembayaran yang dapat dikaitkan tidak hanya berdasarkan konsumsi sumber daya, tetapi juga dapat berdasarkan pengembalian pinjaman bank. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan fakta bahwa pendapatan dihasilkan secara langsung atau tidak langsung. Biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk perolehan, produksi, ekstraksi suatu produk atau penyediaan layanan. Harga pokok mencakup total pengeluaran yang dilakukan untuk produksi dan penjualan suatu produk. Biaya didefinisikan sebagai konsumen sumber daya yang terkait dengan produksi, memiliki ekspresi moneter dan mewakili nilai yang dibayarkan atau dibayarkan, akan menghasilkan beban, dan telah menghasilkan, menghasilkan atau akan menghasilkan pergerakan kas atau yang setara dengan pergerakan kas. Aktivitas ekonomi menghasilkan konsumsi faktor produksi dalam proses pembuatan barang berwujud dan tidak berwujud (layanan) dan beban tersebut merupakan biaya yang ditunjukkan dalam akuntansi manajemen internal (manajerial), tetapi berdampak pada akuntansi keuangan.

D. Kriteria Pengakuan

Pengakuan merupakan langkah pencatatan suatu pos ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan apabila pos tersebut memenuhi definisi salah satu unsur laporan keuangan. Proses ini mencakup penyajian pos tersebut dalam laporan baik secara terpisah maupun bersama dengan pos lainnya dalam bentuk uraian dan nilai moneter, serta memasukkan nilai tersebut ke dalam satu atau lebih total dalam laporan yang bersangkutan. Karena saling berkaitan, pengakuan atas satu pos (atau perubahan nilai tercatatnya) biasanya berdampak pada pengakuan atau penghentian pengakuan

terhadap pos lainnya (atau perubahan nilai tercatat dari pos lain). Beban diakui bersamaan dengan: (i) pengakuan awal suatu kewajiban atau peningkatan nilai tercatat kewajiban tersebut; atau (ii) penghentian pengakuan suatu aset atau penurunan nilai tercatat dari aset tersebut. Pengakuan awal atas aset atau kewajiban yang muncul akibat suatu transaksi atau peristiwa juga dapat menimbulkan pengakuan beban yang berkaitan secara langsung. Sebagai contoh, penjualan barang secara tunai menimbulkan beban karena adanya penghentian pengakuan atas barang yang dijual tersebut.

E. Relevansi dan Ketidakpastian Keberadaan

Informasi mengenai beban memiliki relevansi bagi para pengguna laporan keuangan. Namun demikian, pengakuan beban tidak selalu menjamin bahwa informasi yang disajikan menjadi relevan. Hal ini bisa terjadi dalam situasi tertentu, misalnya: (a) terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan aset atau kewajiban; atau (b) aset atau kewajiban memang ada, tetapi kemungkinan terjadinya arus masuk atau keluar manfaat ekonomi sangat kecil. Keberadaan satu atau kedua kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dari pengakuan menjadi tidak relevan. Dalam beberapa keadaan, tingkat ketidakpastian yang tinggi, dikombinasikan dengan kecilnya kemungkinan arus masuk atau keluar manfaat ekonomi serta adanya rentang hasil yang sangat bervariasi, dapat menyebabkan pengakuan atas suatu aset atau kewajiban yang tentu hanya diukur dalam satu nilai tertentu tidak memberikan informasi yang bermanfaat atau relevan bagi pengambilan keputusan.

F. Kemungkinan Rendahnya Arus Masuk atau Keluar Manfaat Ekonomi

Ketika suatu aset diperoleh atau kewajiban timbul melalui transaksi pertukaran yang berlangsung sesuai harga pasar, biaya yang muncul biasanya mencerminkan kemungkinan terjadinya arus masuk atau keluar manfaat ekonomi. Oleh karena itu, biaya

tersebut cenderung menjadi informasi yang relevan dan umumnya mudah diperoleh. Selain itu, jika aset atau kewajiban tidak diakui, maka akan terjadi pengakuan pendapatan atau beban pada saat transaksi berlangsung, yang mungkin tidak mencerminkan esensi transaksi secara akurat. Dalam kasus ketika aset atau kewajiban timbul dari suatu kejadian yang bukan merupakan transaksi pertukaran, pengakuannya biasanya disertai dengan pengakuan pendapatan atau beban. Namun, jika kemungkinan terjadinya arus masuk atau keluar manfaat ekonomi sangat kecil, maka pengguna laporan keuangan mungkin tidak menganggap pengakuan atas kewajiban dan beban tersebut sebagai informasi yang signifikan atau berguna.

G. Basis Pengukuran

1. Biaya Historis

Pengukuran dengan biaya historis memberikan informasi nilai moneter terhadap aset, kewajiban, serta pendapatan dan beban yang berkaitan, berdasarkan informasi dari harga transaksi atau kejadian lain yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur tersebut. Berbeda dengan nilai saat ini, biaya historis tidak memperhitungkan perubahan nilai kecuali terkait penurunan nilai aset atau meningkatnya beban kewajiban.

Biaya historis suatu aset pada saat diperoleh atau dibuat merupakan total biaya yang dikeluarkan, termasuk pembayaran untuk perolehan atau pembuatan aset dan biaya transaksinya. Sementara itu, biaya historis kewajiban adalah imbalan yang diterima saat kewajiban timbul, dikurangi biaya transaksi. Dalam kondisi tertentu, ketika aset atau kewajiban timbul bukan dari transaksi pasar, biaya historis mungkin sulit ditentukan atau tidak mencerminkan nilai yang relevan. Dalam kasus demikian, nilai kini dapat digunakan sebagai dasar pengakuan awal dan menjadi acuan untuk pengukuran historis selanjutnya.

Nilai historis aset disesuaikan seiring waktu untuk mencerminkan:

- a. Konsumsi atas manfaat ekonomi aset (seperti depresiasi atau amortisasi),
- b. Penghapusan sebagian atau seluruh aset karena pembayaran,
- c. Kejadian yang menyebabkan aset tidak dapat dipulihkan (penurunan nilai), dan
- d. Perhitungan bunga bila terdapat unsur pembiayaan.

Sementara itu, nilai historis kewajiban disesuaikan dengan:

- a. Pemenuhan kewajiban melalui pembayaran atau pengiriman barang,
- b. Kejadian yang menambah beban dalam memenuhi kewajiban tersebut, dan
- c. Akumulasi bunga sebagai bagian dari kewajiban pembiayaan.

Salah satu cara penerapan biaya historis pada instrumen keuangan adalah melalui biaya diamortisasi, yang menghitung estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan saat pengakuan awal. Untuk instrumen berbunga variabel, tingkat diskonto ini diperbarui mengikuti perubahan suku bunga. Nilai tercatat pun akan diperbarui sesuai perubahan seperti bunga, penurunan nilai, dan pembayaran.

Pengukuran aset atau kewajiban dengan dasar biaya historis dapat tetap relevan karena didasarkan pada harga pasar saat transaksi. Ketika aset diperoleh berdasarkan harga pasar yang wajar, biasanya diharapkan aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi setidaknya setara dengan biayanya. Hal yang sama berlaku untuk kewajiban yang timbul dari transaksi pasar, di mana nilai kewajiban umumnya tidak melebihi imbalan yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi. Oleh karena itu, biaya historis dapat mencerminkan informasi relevan terkait nilai transaksi awal.

Nilai tercatat aset dikurangi saat terjadi konsumsi atau penurunan nilai, dan nilai yang bisa dipulihkan setidaknya sebanding dengan jumlah tercatat. Kewajiban yang menjadi memberatkan juga meningkatkan nilai tercatatnya, sehingga nilai sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak melebihi jumlah yang dilaporkan.

Jika suatu aset (selain aset keuangan) diukur menggunakan biaya historis, maka beban akibat konsumsi atau penjualan aset diukur berdasarkan nilai historis bagian yang dikonsumsi atau dijual. Beban dari penjualan dicatat bersamaan dengan pendapatan dari penjualan tersebut. Selisih antara pendapatan dan beban menunjukkan margin yang dihasilkan. Beban dari konsumsi aset juga bisa dibandingkan dengan pendapatan terkait untuk mengetahui margin tersebut. Demikian pula, ketika kewajiban dipenuhi sebagian atau seluruhnya dan diukur dengan biaya historis, maka pendapatan yang diakui diukur berdasarkan imbalan yang diterima, dan selisihnya menunjukkan margin pemenuhan kewajiban.

Dalam banyak kasus, mengukur biaya historis lebih mudah dan murah dibandingkan nilai kini. Pengukuran ini juga cenderung lebih mudah dipahami dan dapat diverifikasi. Namun, menilai konsumsi manfaat aset, kerugian penurunan nilai, atau liabilitas memberatkan bisa menjadi hal yang subjektif. Karenanya, meskipun menggunakan biaya historis, proses pengukuran dan verifikasi kadang bisa sama rumitnya dengan nilai kini. Perlu dicatat, jika aset atau kewajiban identik diperoleh atau timbul pada waktu berbeda, biaya historis dapat menyebabkan nilai pelaporan yang berbeda di laporan keuangan. Hal ini bisa mengurangi daya banding baik antar periode maupun antar entitas.

2. Biaya Saat Ini (*Current Cost*)

Biaya saat ini dari suatu aset adalah jumlah yang harus dibayarkan jika entitas membeli aset serupa pada tanggal pengukuran, termasuk biaya transaksi. Sedangkan, biaya saat ini dari suatu kewajiban adalah jumlah imbalan yang akan diterima jika entitas mengambil kewajiban serupa pada tanggal tersebut, dikurangi biaya transaksinya. Seperti biaya historis, biaya saat ini bersifat nilai masuk (*entry value*), karena mencerminkan harga di pasar tempat entitas akan memperoleh aset atau menanggung kewajiban, bukan harga yang akan diperoleh dari menjual atau memenuhi kewajiban (nilai keluar).

Tidak seperti biaya historis yang mencerminkan kondisi saat transaksi awal terjadi, biaya saat ini memperlihatkan kondisi aktual pada tanggal pengukuran. Dalam praktiknya, tidak semua biaya saat ini bisa diperoleh dari pasar aktif, terutama untuk aset bekas. Oleh karena itu, perhitungan sering memerlukan estimasi, misalnya dengan menyesuaikan harga aset baru berdasarkan umur dan kondisi aset yang dimiliki.

Informasi berbasis biaya saat ini dianggap relevan karena menunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan jika aset tersebut harus diganti sekarang, atau berapa pendapatan yang bisa diperoleh jika kewajiban serupa ditanggung sekarang. Ini berguna untuk menghitung margin saat ini dan memperkirakan margin masa depan, terutama saat harga mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks ini, margin berdasarkan biaya saat ini lebih mencerminkan realitas ekonomi dibandingkan biaya historis.

Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan daya banding antara periode atau antar entitas karena aset atau kewajiban yang sejenis dilaporkan dengan nilai yang konsisten. Namun demikian, penentuan biaya saat ini bisa kompleks dan subjektif, karena memerlukan penyesuaian terhadap harga pasar berdasarkan kondisi nyata aset atau kewajiban. Selain itu, perkembangan teknologi dan

perubahan praktik bisnis dapat menyulitkan pencarian pengganti identik, yang membuat estimasi menjadi kurang dapat diverifikasi dan lebih sulit dipahami.

H. Alokasi Beban

Alokasi adalah proses akuntansi yang digunakan untuk membagi atau menetapkan sejumlah biaya berdasarkan rencana atau rumus tertentu. Proses ini mencakup amortisasi, yaitu alokasi biaya secara bertahap melalui pembayaran berkala atau pengurangan nilai aset. Misalnya, amortisasi bisa berarti mengurangi kewajiban sambil mengakui pendapatan, atau mengurangi nilai aset sambil mencatat beban.

Amortisasi sering digunakan dalam konteks biaya dibayar di muka atau penangguhan, seperti asuransi tahunan yang dialokasikan ke beberapa bulan atau periode. Contoh umum dari proses alokasi antara lain:

1. Menetapkan biaya produksi ke tiap departemen dan produk untuk menentukan biaya produk.
2. Membagi biaya pembelian gabungan ke masing-masing aset berdasarkan nilai pasar relatif.
3. Menyebarkan biaya asuransi atau bangunan ke lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk aset yang digunakan dalam waktu lama, biayanya dialokasikan selama masa manfaatnya dengan metode yang sistematis dan rasional misalnya melalui penyusutan atau amortisasi. Ini juga berlaku untuk pendapatan, seperti pendapatan langganan, yang diakui secara bertahap selama periode layanan. Namun, tidak semua beban bisa dialokasikan. Ada juga beban yang langsung diakui saat terjadi karena tidak bisa dikaitkan dengan periode tertentu secara jelas misalnya gaji tenaga penjual atau biaya listrik kantor. Biaya seperti ini diakui langsung pada periode terjadinya.

Dalam akuntansi, penting untuk mencatat pendapatan dan beban secara bersamaan jika keduanya berasal dari transaksi atau peristiwa yang sama. Contohnya:

1. Saat menjual barang, dicatat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan secara bersamaan.
2. Biaya-biaya lain yang langsung terkait, seperti biaya pengiriman, komisi penjualan, juga dicatat pada saat yang sama.

Namun, tidak semua biaya bisa langsung dikaitkan dengan pendapatan tertentu. Beberapa beban diakui karena terjadi dalam periode tersebut, bukan karena terkait langsung dengan pendapatan—misalnya gaji, listrik, atau biaya administrasi. Untuk aset yang memberikan manfaat jangka panjang (seperti bangunan atau peralatan), biaya tidak langsung dikaitkan dengan pendapatan tertentu, tetapi tetap dialokasikan secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Meskipun penyusutan disebabkan oleh keausan, jumlah pastinya tidak dapat diukur dengan akurat, sehingga akuntansi menggunakan metode alokasi yang sistematis untuk mencerminkan penggunaan aset tersebut selama beberapa periode.

I. Klasifikasi Beban

Klasifikasi diterapkan pada beban yang dihasilkan dari unit akun yang dipilih untuk aset atau liabilitas atau komponen beban tersebut jika komponen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan diidentifikasi secara terpisah. Misalnya, perubahan nilai aset saat ini dapat mencakup dampak perubahan nilai dan akrual bunga. Laporan laba rugi adalah sumber informasi utama tentang kinerja keuangan entitas untuk periode pelaporan. Laporan tersebut berisi total laba rugi yang memberikan gambaran yang sangat ringkas tentang kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Banyak pengguna laporan keuangan memasukkan total tersebut dalam analisis mereka baik sebagai titik awal untuk analisis tersebut atau sebagai indikator utama kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Namun demikian, memahami kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut memerlukan analisis semua beban yang diakui, termasuk beban dalam pendapatan komprehensif lain

serta analisis informasi lain yang termasuk dalam laporan keuangan.

Pendapatan dan beban yang timbul berdasarkan pengukuran biaya historis dimasukkan dalam laporan laba rugi. Hal ini juga berlaku ketika beban jenis tersebut diidentifikasi secara terpisah sebagai komponen perubahan nilai aset atau liabilitas saat ini. Pada prinsipnya, beban yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain dalam satu periode direklasifikasi dari pendapatan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi di periode mendatang jika hal tersebut mengakibatkan laporan laba rugi memberikan informasi yang lebih relevan, atau memberikan representasi yang lebih akurat tentang kinerja keuangan entitas untuk periode mendatang tersebut.

J. Hubungan Biaya dan Beban

Dalam konteks akuntansi biaya, biaya berhubungan dengan pengorbanan yang diakibatkan oleh penggunaan aset. Perbedaan mendasar harus dibuat antara biaya yang belum kedaluwarsa (aset) dan biaya yang kedaluwarsa, serta antara biaya dan beban. Biaya dihasilkan dari penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan dan selama aset tersebut tidak digunakan tidak ada biaya yang tercipta. Biaya juga harus dibedakan dari istilah beban. Sebagai contoh, akuisisi sumber daya dengan potensi manfaat menghasilkan penciptaan aset atau biaya yang tidak kedaluwarsa. Penggunaan aset dalam proses manufaktur menghasilkan biaya produk. Penjualan produk pada akhirnya mengubah biaya ini menjadi biaya yang harus dicocokkan dengan penjualan. Penggunaan aset dalam proses penjualan dan administrasi menghasilkan biaya yang harus dicocokkan dengan penjualan.

Terkait penentuan hubungan biaya dan beban, konsep biaya berkaitan dengan proses penjualan, dan konsep biaya berkaitan dengan proses produksi. Biaya diakui sebagai beban jika terjadi secara bersamaan dalam hal layanan yang diberikan yang tidak membentangi dari satu tahun anggaran ke tahun

anggaran lainnya, beban yang berkaitan dengan overhead yang tidak dialokasikan (pengeluaran untuk administrasi, pemasaran), biaya penjualan langsung dan tidak langsung, dan biaya mengikuti beban yang mana biaya produksi diakui sebagai beban dalam hal produksi pemulihan (penjualan).

K. Pembayaran, Biaya, dan Beban

Pembayaran merupakan istilah keuangan, dapat merujuk pada pengeluaran uang tunai atau setara kas tanpa ada kaitannya dengan biaya atau pengeluaran produksi (misalnya: pelunasan pinjaman, pembayaran di muka, PPN yang dibayarkan kepada Negara atau perusahaan lain), tetapi juga dapat merujuk pada pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dihasilkan oleh biaya atau pengeluaran. Biaya dan pembayaran terjadi pada saat yang sama (misalnya: pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang digunakan dalam biaya produksi dan telah dibayarkan, dll.). Pembayaran dapat terjadi sebelum biaya, dalam hal aset tetap yang diperoleh selama tahun tersebut, yang telah dibayarkan, tetapi sampai pada biaya secara mencuil berdasarkan perhitungan amortisasi, dll. Pembayaran dapat terjadi setelah menghasilkan biaya, dalam kategori ini termasuk upah langsung dan biaya yang terkait dengannya (pemberi kerja), yang dibayarkan dalam bulan berikutnya untuk mencatat atau pembayaran pemasok untuk input yang termasuk dalam biaya, dll.

Setiap biaya mewakili jumlah yang dibayarkan atau harus dibayarkan. Operasi pembayaran dapat terjadi sebelum atau setelah pencatatan biaya atau bersamaan. Termasuk dalam hal ini adalah posisi-posisi yang menyebabkan penurunan hasil dan selama satu periode tahun buku keuangan telah dibayarkan. Setiap biaya produksi akan menjadi pengeluaran sekali, tetapi tidak semua biaya merupakan biaya, setiap biaya sekali dan sekali dihasilkan atau akan menghasilkan pembayaran, tetapi tidak semua pembayaran atau diubah/diputar/akan berubah menjadi biaya. Beban dan pembayaran terjadi pada saat yang

sama, seperti pembayaran denda yang diterapkan oleh otoritas pengawas, dll. Pembayaran dapat terjadi sebelum pengeluaran dengan mengacu pada ketentuan yang sesuai untuk perbaikan dalam jaminan (berdasarkan data historis-pembayaran yang perlu dicatat ketentuannya). Pembayaran mengikuti beban, bunga default yang berlaku dicatat kontrak komersial, dll.

Dalam kategori pembayaran (murni) muncul pergerakan kas dan setara kas yang tidak dihasilkan, seperti pelunasan pinjaman bank, pembayaran cicilan sewa guna usaha (finansial), penyeteroran modal kepada anak perusahaan, dan sebagainya. Dalam konteks biaya yang tidak mempengaruhi pengeluaran tahun anggaran, terdapat biaya yang terkait dengan penyusutan mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk dengan siklus produksi yang panjang (misalnya kapal). Dalam kategori ini juga dapat dimasukkan biaya-biaya yang tidak diakui oleh akuntansi seperti kategori biaya peluang.

Dalam kategori beban (murni) yang bukan jenis beban yang dicatat dimuka, bukan merupakan biaya produksi dan tidak menimbulkan entri pembayaran keuangan berjalan, misalnya beban dari selisih kurs yang dicatat dari selisih kurs yang tidak menguntungkan yang timbul dari penilaian piutang mata uang asing pada akhir tahun keuangan, selisih kurs yang timbul, dari selisih kurs yang merugikan yang timbul dari penilaian kewajiban dalam mata uang asing, pada akhir tahun keuangan, selisih kurs yang timbul dari selisih kurs yang tidak menguntungkan yang timbul dari penilaian pada akhir tahun keuangan Bank dalam ketersediaan mata uang asing, ketersediaan mata uang yang ada di tangan, serta simpanan dan uang tunai lainnya dalam nilai mata uang asing, dll.

L. Kesimpulan

Dalam akuntansi, hubungan antara biaya dan beban sangat penting untuk dipahami. Biaya merujuk pada pengorbanan yang terjadi karena penggunaan aset, yang dapat berupa aset atau biaya, tergantung pada apakah nilai aset tersebut kedaluwarsa atau tidak. Penggunaan aset untuk

menghasilkan pendapatan dapat menghasilkan biaya yang akan dicatat sebagai beban pada periode yang bersamaan dengan pendapatan yang terkait. Amortisasi, misalnya, merupakan salah satu bentuk alokasi biaya untuk pengurangan nilai aset yang dimanfaatkan seiring berjalannya waktu, dan ini dicatat sebagai beban yang dialokasikan pada periode yang relevan.

Pembayaran, biaya, dan beban saling terkait tetapi memiliki perbedaan penting. Pembayaran adalah pengeluaran kas yang bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah pencatatan biaya. Sementara biaya berkaitan dengan pengeluaran yang terkait langsung dengan aktivitas produksi atau penjualan, beban mencakup pengeluaran yang lebih luas dan tidak selalu terkait langsung dengan produksi. Misalnya, selisih kurs yang merugikan dalam transaksi mata uang asing yang tidak mempengaruhi pembayaran langsung, tetapi tetap dicatat sebagai beban di laporan keuangan. Dengan demikian, hubungan antara biaya dan beban mempengaruhi pengakuan dan pelaporan keuangan yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, A. R. (2013). *Economics of Cost*. Access at <https://www.researchgate.net/publication/308051694>.
- Financial Accounting Standards Board. (2021). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. FASB Statement of Financial Accounting Concepts No. 8.
- International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation.
- Zortan, F. A. (2016). Cost, Expense and Payments – Conceptual Approaches. *Annals of The Constantin Bracusi. Economic Series*, Issue 6.

TENTANG PENULIS



**Kenny Ardillah, S.E., M.Ak., CFP., CSP., CSRS., CSRA., RSA.,
CRA., CPTT.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di STIE Wiyatamandala dan sudah berkecimpung di dunia akademis sejak tahun 2018. Penulis juga menjadi dosen honorer di beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti dan S2 Akuntansi di Universitas Trisakti. Selain menjadi dosen, penulis saat ini merupakan praktisi dengan posisi Senior Supervisor di salah satu perusahaan perkebunan di Jakarta. Penulis termotivasi untuk menulis bab ini dikarenakan adanya harapan dari penulis untuk bisa memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi di Indonesia. Adapun penulis hingga saat ini sudah menerbitkan lebih dari 50 artikel ilmiah, proceeding penelitian, book chapter, dan artikel PKM yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional dengan 298 sitasi, h-index 9, dan i-index 9 yang dapat diakses di

<https://scholar.google.com/citations?user=X2Y20EIAAAAJ&hl=en>.

BAB 11

KONSEP DAN KARAKTERISTIK LABA

Mohklas, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

A. Pendahuluan

Dalam akuntansi dan manajemen keuangan, laba adalah salah satu konsep paling penting. Laba perusahaan adalah ukuran kinerja finansial dan kesehatan ekonomi. Laba menunjukkan seberapa berhasil sebuah perusahaan menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada biaya yang dikeluarkannya untuk menjalankan operasinya. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ide dan fitur laba sangat penting bagi manajer, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat (Robert, C. H., Jennifer, L. K., & Todd, 2023a).

Dalam akuntansi, laba sering dibagi menjadi berbagai jenis, seperti laba bruto, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Setiap jenis laba memberikan gambaran yang berbeda tentang kinerja perusahaan, yang dapat memengaruhi strategi bisnis yang dipilih. Selain itu, karakteristik laba juga dapat mencerminkan keberlanjutan operasional perusahaan, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta kapasitas perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak (Martini *et al.*, 2023).

Konsep dasar laba, serta berbagai aspeknya, akan dibahas secara menyeluruh dalam bab ini. Pembicaraan dimulai dengan menjelaskan definisi laba dan bagaimana ia berbeda dari istilah serupa lainnya, seperti pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai jenis laba yang sering

digunakan dalam laporan keuangan perusahaan, serta bagaimana setiap jenis laba dapat menunjukkan berbagai informasi tentang kinerja perusahaan. Selain itu, bab ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laba, serta masalah yang dihadapi perusahaan dalam mengukur dan mempertahankan laba yang berkelanjutan (Edwards, E. O., & Bell, 2023a).

Diharapkan bab ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi bisnis, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin lebih memahami peran laba dalam dunia ekonomi dan keuangan. Memahami laba yang tidak hanya bergantung pada angka dalam laporan keuangan, tetapi juga memahami karakteristik dan komponen yang mempengaruhi pencapaian laba akan membantu perusahaan membuat strategi yang lebih efektif untuk berkembang dalam jangka panjang (Hillier, 2024).

B. Pengertian Laba

Dalam akuntansi, laba adalah keuntungan finansial yang diperoleh suatu perusahaan selama suatu periode tertentu setelah mengurangi biaya yang terkait dengan operasional, produksi, dan distribusi produk atau layanan yang dijual. Hal ini adalah perbedaan antara pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan dan biaya atau beban yang dikeluarkan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut (Edwards, E. O., & Bell, 2023b).

Laba adalah indikator utama kinerja finansial sebuah perusahaan dan sering digunakan sebagai referensi dalam perencanaan keuangan, pengambilan keputusan, dan evaluasi nilai. Laba dapat dibagi menjadi beberapa kategori secara lebih rinci, dan masing-masing kategori memainkan peran penting dalam memahami kinerja sebuah perusahaan (Robert, C. H., Jennifer, L. K., & Todd, 2023b) :

1. **Laba Bruto:** Laba bruto adalah jumlah yang diperoleh setelah mengurangi biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti biaya bahan baku dan

tenaga kerja, dari pendapatan penjualan. Ini menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis mengendalikan biaya produksi.

2. **Laba Operasional:** Setelah mengurangi semua biaya operasional yang terkait dengan produksi, pemasaran, dan administrasi, perusahaan menghasilkan laba operasional, yang menunjukkan kinerja inti perusahaan tanpa memperhitungkan faktor luar seperti pajak dan bunga.
3. **Laba Sebelum Pajak:** Setelah mengurangi biaya operasional dan biaya lainnya, laba dihasilkan, tetapi tidak memperhitungkan pajak yang akan dikenakan. Laba ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja bisnis sebelum terpengaruh oleh kewajiban pajak.
4. **Laba Bersih:** laba yang diperoleh setelah mengurangi semua biaya, termasuk biaya pajak dan lainnya. Laporan laba bersih adalah angka yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja akhir suatu organisasi dan juga merupakan dasar untuk pembagian dividen kepada pemegang saham.

Laba tidak menyebabkan keputusan perusahaan tentang investasi, pertumbuhan, dan pembagian keuntungan. Definisi laba dan perhitungannya berbeda untuk pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan. Laba dapat dibagi menjadi dua kategori: laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba akuntansi membantu menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan laba ekonomi membantu mengevaluasi seberapa baik kinerja bisnis. Inilah, ide-ide penting dalam akuntansi dan ekonomi dikenal sebagai laba, yang membantu menjadi efisien sebuah bisnis dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan (Baddon, L., Hunter, L., Hyman, J., Leopold, J., & Ramsay, 2017).

C. Karakteristik Laba

Beberapa karakteristik utama laba dapat diidentifikasi sebagai komponen yang menggambarkan bagaimana laba berfungsi dan apa artinya bagi perusahaan (*et al.*, 2014). Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama laba:

1. **Profitabilitas:** Laba menunjukkan seberapa efektif sebuah bisnis dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya, yang mencakup perbandingan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkannya. Semakin besar laba sebuah bisnis, semakin tinggi tingkat profitabilitasnya.
2. **Sumber Laba:** Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan utama dari penjualan barang atau jasa, serta pendapatan tambahan seperti bunga, investasi, atau penjualan aset. Pendapatan operasi utama dianggap lebih berkelanjutan daripada pendapatan dari sumber lain.
3. **Waktu:** Laba dapat dibagi menjadi laba jangka pendek dan jangka panjang. Laba jangka pendek menunjukkan performa perusahaan dalam jangka waktu yang lebih singkat, sedangkan laba jangka panjang menunjukkan kemajuan dan stabilitas perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama.
4. **Laba Kotor dan Laba Bersih:** Laba bersih adalah laba yang dihitung setelah dikurangi semua biaya dan biaya, termasuk pajak dan bunga. Sebaliknya, laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan (HPP). Laba bersih menunjukkan keuntungan yang sebenarnya bagi pemegang saham.
5. **Fungsi untuk Pengukuran Kinerja:** Laba adalah indikator utama kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan laba menunjukkan keberhasilan strategi bisnis, sementara penurunan laba menunjukkan masalah yang perlu ditangani.
6. **Laba Sebagai Sumber Pembiayaan:** Selain itu, laba digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis, memberikan dividen kepada pemegang saham, atau menyisihkan cadangan untuk melindungi perusahaan dari risiko di masa depan.
7. **Laba yang Relevan untuk Keputusan Manajerial:** Berbagai keputusan manajer, seperti perencanaan anggaran, pengalokasian sumber daya, dan perencanaan pajak, dapat diinformasikan oleh laba. Secara keseluruhan, laba adalah indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan, dan

manajemen internal dan pemangku kepentingan eksternal, seperti investor dan analis, harus mempertimbangkannya.

1. Sumber Laba

Berbagai sumber atau cara perusahaan menghasilkan keuntungan disebut sebagai sumber laba. Sumber laba ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang berkontribusi terhadap pencapaian laba (Heskett, J. L., Sasser, W. E., & Schlesinger, 2010). Berikut adalah beberapa sumber laba utama bagi perusahaan:

a. Pendapatan dari Penjualan Utama (*Revenue from Core Operations*)

- 1) **Penjualan Produk atau Jasa:** Bagi sebagian besar bisnis, ini adalah sumber keuntungan yang paling langsung dan utama. Keuntungan ini diperoleh dari barang atau jasa yang menjadi fokus utama bisnis mereka, seperti bisnis mobil atau bisnis fashion.
- 2) **Laba Kotor:** Untuk menghitung sumber laba ini, harga pokok penjualan (HPP) harus dikurangi dari pendapatan penjualan. Labu kotor menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam membuat atau menyediakan barang dan jasa.

b. Pendapatan dari Investasi (*Investment Income*)

- 1) **Bunga dan Dividen:** Pendapatan yang berasal dari investasi dalam saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya juga merupakan sumber utama laba, terutama bagi perusahaan yang memiliki portofolio investasi yang besar. Bunga dari simpanan bank atau dividen dari saham yang dimiliki perusahaan juga merupakan sumber utama laba.
- 2) **Capital Gain:** laba yang dihasilkan ketika harga aset, seperti saham atau properti, meningkat dan kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi.

- c. **Pendapatan Non-Operasional (*Non-Operating Income*)**
 - 1) **Pendapatan Sewa:** Perusahaan yang memiliki properti dapat menghasilkan uang dengan menyewakan properti mereka kepada pihak lain. Ini adalah contoh bisnis properti yang menyewakan gedung atau tanah kepada pihak lain.
 - 2) **Penjualan Aset:** laba yang dihasilkan dari penjualan aset tetap atau investasi perusahaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan tanah, struktur, atau mesin.
- d. **Pendapatan Lain-lain (*Other Income*)**
 - 1) **Subsidi dan Hibah:** Beberapa perusahaan, terutama di bidang tertentu (seperti energi atau teknologi), mungkin mendapatkan hibah atau subsidi dari pemerintah atau badan lainnya untuk membantu operasi mereka. Hal ini juga dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan.
 - 2) **Pendapatan dari Lisensi dan Royalti:** Perusahaan yang memiliki hak paten, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya dapat memperoleh keuntungan dari royalti dari pihak lain yang menggunakan hak tersebut.
- e. **Laba dari Aktivitas Keuangan (*Financial Activities*)**
 - Arus Kas dari Pinjaman dan Penerbitan Saham:** Beberapa bisnis menghasilkan laba melalui transaksi keuangan, seperti pinjaman atau penerbitan saham; meskipun ini lebih berkaitan dengan pengelolaan modal, transaksi ini juga dapat menghasilkan dana untuk diinvestasikan, yang pada gilirannya akan menghasilkan laba.
- f. **Laba dari Penurunan Liabilitas (*Debt Forgiveness*)**
 - Pembatalan Utang:** Dalam beberapa situasi, bisnis dapat memperoleh keuntungan dari pembatalan atau restrukturisasi utang. Misalnya, ketika kreditur setuju untuk mengurangi jumlah utang yang harus dibayar oleh

bisnis, itu dapat menghasilkan laba atau mengurangi kerugian.

- g. Pendapatan Asuransi atau Klaim:** Beberapa bisnis juga dapat memperoleh keuntungan dari klaim asuransi atau kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kejadian tertentu, seperti kebakaran, bencana alam, atau kerusakan aset.
- h. Laba dari Proyek atau Kontrak Khusus:** Pendapatan dari Kontrak Berjangka: Perusahaan yang terlibat dalam proyek besar atau kontrak jangka panjang (seperti konstruksi, manufaktur, atau teknologi) sering mendapatkan keuntungan dari penyelesaian atau pembayaran proyek.

Sumber laba perusahaan sebagian besar bergantung pada industri tempat perusahaan beroperasi dan strategi bisnis yang dijalankan. Laba dari sumber lain biasanya lebih sementara atau tidak terduga, sementara laba dari kegiatan utama (operasi) biasanya lebih berkelanjutan dan stabil.

2. Laba sebagai Indikator Kinerja

Salah satu ukuran utama yang digunakan untuk menilai seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya dan menjalankan operasionalnya adalah laba; sebagai indikator kinerja, laba memberikan gambaran tentang efisiensi operasional, profitabilitas, dan kesehatan keuangan perusahaan, laba juga digunakan untuk menilai keberhasilan Perusahaan. Laba kotor menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, sedangkan laba operasional (EBIT) menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola kegiatan operasional inti tanpa terpengaruh oleh struktur pendanaan dan pajak. Laba bersih, yang merupakan laba setelah dikurangi biaya, termasuk pajak dan bunga, memberikan gambaran lebih lengkap tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah memenuhi semua kewajibannya. Laba sering digunakan sebagai indikator kinerja untuk

membandingkan kinerja perusahaan dalam industri yang sama (Zairi, 2012).

Perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih besar atau mencapai target labanya menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Selain itu, laba yang stabil atau meningkat menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan, yang memberi kepercayaan kepada investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan strategis didasarkan pada laba. Laba menunjukkan hasil operasi perusahaan dan merupakan alat penting untuk perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih luas. Oleh karena itu, laba tidak hanya menunjukkan hasil operasi perusahaan, tetapi juga merupakan alat penting untuk merencanakan investasi, ekspansi, atau pengurangan biaya (Ton, 2014).

3. Pengaruh Biaya terhadap Laba

Pengaruh biaya terhadap laba sangat penting untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh suatu perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan berdampak langsung pada hasil akhir, yaitu laba, karena biaya memiliki dampak langsung pada laba. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, semakin kecil laba yang dihasilkan, dan sebaliknya. Biaya tetap dan variabel adalah dua jenis biaya utama yang mempengaruhi keuntungan bisnis. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dapat diubah, seperti gaji tetap, sewa gedung, atau asuransi, dan tidak berubah meskipun produksi atau penjualan produk meningkat atau menurun. Jika biaya tetap terlalu tinggi, maka laba perusahaan akan tertekan karena biaya ini harus dibayar oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan pendapatan yang dihasilkan. Namun, biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan utilitas bervariasi tergantung pada berapa banyak produk yang diproduksi atau dijual (Damodaran, 2024).

Biaya variabel yang dikeluarkan berkorelasi positif dengan jumlah produk yang diproduksi atau dijual. Namun, laba perusahaan dapat meningkat jika biaya variabel dikelola dengan baik atau dikurangi, terutama jika pendapatan tetap stabil atau meningkat. Pengendalian biaya yang efektif sangat penting bagi bisnis untuk mempertahankan keuntungan. Dengan mengurangi biaya yang tidak perlu atau meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan keuntungan meskipun pendapatan tidak banyak berubah. Oleh karena itu, untuk menjaga profitabilitas perusahaan, kontrol biaya menjadi komponen penting dari strategi bisnis (Collins, N. R., & Preston, 2023).

4. Keterkaitan dengan Pajak

Keterlibatan antara laba dan pajak sangat erat karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Pajak yang dibayar oleh perusahaan biasanya dihitung berdasarkan laba kena pajak, yang merupakan laba setelah dikurangi dengan biaya yang diizinkan oleh undang-undang pajak (Hopkins, B. R., & Hamilton, 2025).

Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan keterkaitan laba dengan pajak:

- a. **Laba Sebagai Dasar Penghitungan Pajak:** Pajak penghasilan (PPh) dihitung berdasarkan laba perusahaan. Laba yang lebih besar sebanding dengan pajak yang harus dibayar. Tarif pajak yang berlaku biasanya digunakan untuk menghitung pajak ini, yang dapat berbeda-beda tergantung pada negara atau wilayah hukum.
- b. **Pengaruh Pengeluaran dan Deduksi Pajak:** Tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh bisnis dapat dikurangkan langsung dari laba untuk menghitung pajak. Beberapa biaya mungkin memenuhi syarat untuk deduksi pajak, yang berarti biaya tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak dan, akibatnya, mengurangi jumlah pajak yang

harus dibayar. Contoh deduksi pajak termasuk biaya operasional, aset, dan penelitian dan pengembangan.

- c. **Laba Bersih vs. Laba Kena Pajak:** Tidak selalu laba bersih yang dilaporkan dalam laporan keuangan sama dengan laba kena pajak. Beberapa perbedaan antara kedua angka ini disebabkan oleh perbedaan dalam aturan perpajakan dan akuntansi, seperti metode pengakuan pendapatan atau penyusutan aset. Oleh karena itu, pajak yang dibayar mungkin lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada ketentuan pajak yang berlaku, meskipun perusahaan memiliki laba bersih yang tinggi.
- d. **Pajak Penghasilan dan Dampaknya pada Laba Bersih:** Untuk memastikan bahwa keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham atau digunakan untuk reinvestasi tetap optimal, perusahaan harus mengelola pajak dengan baik setelah pajak dihitung dan dibayar.

Secara keseluruhan, laba perusahaan berpengaruh langsung terhadap kewajiban pajak, dan mengelola laba dan pajak dengan baik sangat penting untuk menjaga keuangan perusahaan.

5. Laba dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Laba jangka pendek adalah keuntungan yang dihasilkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, seperti satu kuartal atau satu tahun fiskal. Laba jangka pendek dipengaruhi oleh faktor langsung dan dapat berubah dengan cepat, seperti perubahan harga jual, biaya bahan baku, atau volume penjualan. Laba jangka pendek biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi seberapa efektif operasional mereka selama waktu tersebut dan membuat keputusan cepat tentang perubahan strategi atau operasi.

Sebaliknya, laba jangka panjang adalah keuntungan yang dihasilkan dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari satu tahun, yang lebih stabil dan dipengaruhi oleh elemen struktural yang lebih besar, seperti investasi dalam teknologi, ekspansi pasar, atau inovasi produk. Laba jangka panjang sering kali menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, laba jangka panjang menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang, seperti meningkatkan pangsa pasar atau memperoleh keunggulan kompetitif. Secara umum, laba jangka pendek menunjukkan operasi perusahaan dalam waktu dekat, sedangkan laba jangka panjang menunjukkan stabilitas dan kemajuan perusahaan dalam jangka Panjang (Brooks, S. M., & Saltzman, 2016).

6. Sifat Laba yang Berkelanjutan

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh fluktuasi sementara atau faktor luar yang tidak dapat diprediksi disebut sebagai sifat laba yang berkelanjutan. Untuk mencapai sifat ini, perusahaan harus menggunakan faktor-faktor yang mendukung stabilitas jangka panjang, seperti strategi bisnis.

Pendapatan utama perusahaan tidak selalu berasal dari pendapatan satu kali atau dari penjualan aset yang tidak berulang. Perusahaan yang menghasilkan laba yang berkelanjutan biasanya menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola biaya dengan baik, mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang kuat, dan memiliki posisi yang kuat dalam industri. Selain itu, laba yang berkelanjutan biasanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, laba yang tidak berkelanjutan dapat menunjukkan ketergantungan pada peristiwa luar jangka pendek, seperti kenaikan harga komoditas atau keuntungan dari transaksi yang tidak biasa. Kinerja keuangan perusahaan yang bergantung pada laba tidak berkelanjutan dapat sangat berubah (Settembre-Blundo *et al.*, 2021).

7. Laba Ekonomi vs. Laba Akuntansi

Meskipun keduanya digunakan untuk menilai kinerja keuangan bisnis, laba ekonomi dan laba akuntansi adalah konsep yang berbeda. Keduanya berbeda secara fundamental dalam cara mereka dihitung dan digunakan untuk tujuan apa (Qamariah *et al.*, 2022).

- a. **Laba Ekonomi:** Biaya peluang, atau biaya peluang, adalah biaya yang mengurangi biaya nyata, seperti biaya operasional, dan biaya tersembunyi yang muncul sebagai akibat dari keputusan yang dibuat. Keuntungan yang disebut sebagai laba ekonomi dihitung dengan mempertimbangkan biaya peluang. Oleh karena itu, laba ekonomi dihitung dengan rumus:

$$\text{Laba Ekonomi} = \text{Pendapatan Total} - (\text{Biaya Eksplisit} + \text{Biaya Peluang})$$

Laba ekonomi digunakan untuk mengevaluasi apakah sumber daya yang digunakan telah dialokasikan secara efisien. Jika laba ekonomi positif, berarti keputusan yang diambil menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan alternatif lain.

- b. **Laba Akuntansi:** Keuntungan akuntansi adalah keuntungan yang dihitung menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Keuntungan ini hanya mengurangi biaya yang jelas, seperti biaya administrasi, produksi, dan operasional, tanpa memperhitungkan biaya peluang. Laba akuntansi dihitung dengan rumus:

$$\text{Laba Akuntansi} = \text{Pendapatan Total} - \text{Biaya Eksplisit}$$

Laba akuntansi lebih sering digunakan dalam laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya.

Secara ringkas, laba ekonomi memperhitungkan biaya peluang untuk menilai efisiensi alokasi sumber daya. Sebaliknya, laba akuntansi berfokus pada menghitung laba berdasarkan transaksi dalam laporan keuangan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi laba perusahaan: Faktor-faktor ini dapat berasal dari komponen internal maupun eksternal perusahaan, tetapi mereka sangat beragam (Fikri *et al.*, 2024).

1. Pendapatan atau Penjualan:

- a. **Volume Penjualan:** Jumlah produk atau jasa yang dijual sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan laba.
- b. **Harga Jual:** Harga produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan juga mempengaruhi laba; kenaikan harga jual dapat meningkatkan pendapatan, tetapi ini harus disesuaikan dengan elastisitas permintaan.

2. Biaya Produksi dan Operasional

- a. **Biaya Bahan Baku:** Kenaikan harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, yang dapat mengurangi laba jika harga jual tidak dapat dinaikkan.
- b. **Biaya Tenaga Kerja:** Upah dan gaji karyawan yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya operasional, yang akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Perusahaan yang dapat mengontrol biaya overhead dapat menurunkan biaya tetap seperti sewa, utilitas, dan pemeliharaan.

3. Efisiensi Operasional

- a. **Manajemen Efisien:** Manajemen yang efektif dalam produksi, distribusi, dan pemasaran dapat menurunkan biaya dan meningkatkan laba.
- b. **Inovasi dan Teknologi:** Peningkatan proses produksi atau investasi dalam teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya, yang berdampak positif pada laba.

4. Persaingan Pasar

- a. **Kondisi Persaingan:** Tingkat persaingan di pasar mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan. Persaingan yang tinggi cenderung menurunkan harga jual dan dapat mengurangi laba.
- b. **Daya Saing Produk:** Produk yang lebih baik atau memiliki diferensiasi unik dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan laba.

5. Kebijakan Pemerintah dan Pajak

- a. **Peraturan Pajak:** Jika tarif pajak tinggi, laba bersih perusahaan setelah pajak akan lebih rendah. Sebaliknya, insentif pajak atau potongan pajak dapat meningkatkan laba yang dapat dipertahankan perusahaan.
- b. **Subsidi dan Regulasi:** Regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya kepatuhan, sementara subsidi atau dukungan pemerintah dapat mengurangi biaya operasional.

6. Kondisi Ekonomi Makro

- a. **Inflasi dan Suhu Ekonomi:** Biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya dapat meningkat sebagai akibat dari inflasi yang tinggi, tetapi selama periode ekonomi yang tumbuh, permintaan barang dan jasa cenderung meningkat, yang dapat meningkatkan laba.
- b. **Nilai Tukar Mata Uang:** Biaya impor bahan baku dan harga jual barang di pasar global dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, yang pada gilirannya mempengaruhi laba.

7. Strategi Bisnis

- a. **Strategi Penetapan Harga:** Harga yang tepat, seperti diskon, premium, atau harga kompetitif, dapat memengaruhi laba dan volume penjualan.
- b. **Diversifikasi Produk:** Peluang untuk meningkatkan pendapatan dan laba dapat muncul ketika produk baru diluncurkan atau pasar baru dimasuki.

Secara keseluruhan, laba dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal perusahaan seperti pengelolaan biaya dan operasional, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Mengelola faktor-faktor ini dengan efektif sangat penting untuk mencapai laba yang optimal.

E. Pentingnya Laba dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

Pentingnya laba bagi pengambilan keputusan bisnis karena menunjukkan kesehatan keuangan dan keberhasilan operasional perusahaan. Laba ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya dan membantu membuat banyak keputusan strategis (Manajemen & Sulistyawati, 2024). Untuk beberapa alasan, keuntungan sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis:

1. Indikator Keberhasilan Operasional

Laba menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Manajer dan pengusaha dapat menggunakan laba sebagai indikator untuk menilai apakah strategi seperti penetapan harga, produksi, atau pemasaran sudah berjalan dengan baik atau perlu diubah.

2. Dasar Perencanaan dan Investasi

Perusahaan memiliki sumber daya untuk melakukan reinvestasi dalam proyek atau memperluas bisnis mereka dengan laba yang terus meningkat dan stabil. Keputusan untuk membuat produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kapasitas produksi sangat bergantung pada jumlah laba yang dapat diinvestasikan kembali.

3. Penilaian Kinerja Manajerial

Laba juga digunakan untuk menilai kinerja manajer atau tim eksekutif dalam menjalankan bisnis. Manajer yang dapat menghasilkan laba yang baik biasanya dianggap sukses dalam mengelola biaya, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan sumber daya. Sebaliknya, laba yang rendah atau negatif bisa menunjukkan bahwa strategi atau kepemimpinan perlu diubah.

4. Pengambilan Keputusan Pendanaan

Laba memainkan peran penting dalam keputusan tentang pendanaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman atau penerbitan saham karena laba menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas yang cukup untuk membayar kewajiban finansial.

5. Pengaruh Terhadap Kebijakan Dividen

Bagi perusahaan yang sudah terdaftar di pasar saham, laba mempengaruhi kebijakan dividen. Laba yang baik memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham, yang dapat meningkatkan kepuasan investor dan menarik lebih banyak investor baru.

6. Evaluasi Keputusan Harga

Laba yang diinginkan sangat memengaruhi keputusan harga. Perusahaan yang ingin meningkatkan laba mungkin mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual produk atau mengurangi biaya untuk mempertahankan margin keuntungan. Sebaliknya, jika laba menurun, perusahaan mungkin perlu merevisi strategi harga dan biaya mereka.

7. Pengelolaan Risiko dan Perencanaan Keuangan

Selain itu, laba yang diperoleh membantu bisnis dalam merencanakan masa depan dan mengelola risiko. Dengan laba yang cukup, perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk cadangan atau asuransi yang akan membantu mereka bertahan saat ada resesi atau penurunan permintaan.

Secara keseluruhan, laba bukan hanya angka dalam laporan keuangan; itu juga merupakan dasar untuk membuat keputusan strategis. Mengelola laba dengan benar dapat memastikan perusahaan bertahan hidup, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan daya saingnya di pasar (Sukamulja, 2024).

F. Kesimpulan

Laba adalah perbedaan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam jangka tertentu dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Konsep laba berbagi bagian penting karena mencerminkan kinerja finansial perusahaan dan digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan dan kelangsungan bisnis. Laba operasional mencakup laba setelah memperhitungkan biaya operasional lainnya, kotor adalah perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, bersih adalah laba diperoleh setelah mengurangi semua biaya, termasuk bunga pinjaman, pajak, dan biaya non-operasi lainnya. Salah satu karakteristik utama laba adalah sebagai ukuran kinerja perusahaan.

Laba juga membantu investor dan manajemen membuat keputusan. Laba adalah dasar bagi manajemen untuk merencanakan kebijakan bisnis seperti investasi, ekspansi, atau pembagian dividen. For investors, laba adalah indikator utama untuk menilai potensi keuntungan dari investasi. Berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi laba, yaitu keuntungan juga menunjukkan perusahaan menangani tantangan pasar dan mengelola sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baddon, L., Hunter, L., Hyman, J., Leopold, J., & Ramsay, H. (2017). *People's capitalism?: a critical analysis of profit-sharing and employee share ownership*. Routledge.
- Brooks, S. M., & Saltzman, J. M. (2016). *Creating the vital organization: Balancing short-term profits with long-term success*. Springer.
- Collins, N. R., & Preston, L. E. (2023). *Concentration and price-cost margins in manufacturing industries*.
- Damodaran, A. (2024). *The little book of valuation: How to value a company, pick a stock, and profit*. John Wiley & Sons.
- Edwards, E. O., & Bell, P. W. (2023a). *The theory and measurement of business income*. Univ of California Press.
- Edwards, E. O., & Bell, P. W. (2023b). *The theory and measurement of business income*. Univ of California Press.
- Fikri, G. Al, Marlana, E., Fitriani, P., Aliyudin, A., & Veranita, M. (2024). Strategi Manajemen: Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal. *Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.51977/jsj.v6i1.1629>
- Heskett, J. L., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. (2010). *The value profit chain: Treat employees like customers and customers like*. Simon and Schuster.
- Hillier, D. (2024). *eBook: Corporate Finance 5e*. McGraw Hill.
- Hopkins, B. R., & Hamilton, S. T. (2025). *The law of tax-exempt organizations*. John Wiley & Sons.
- Manajemen, J., & Sulistyawati, U. S. (2024). *Decoding Big Data : Mengubah Data Menjadi Keunggulan Kompetitif dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Abstrak*. 1(2), 58–71.
- Martini, R., Sulaiman, S., Sari, K., Sauky, K., & Hartati, S. (2023). Components Affecting Changes in Gross Profit and Net Profit Initiation. *International Journal of Research in Vocational Studies*

- (IJRVOCAS), 3(1), 45-51.
<https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v3i1.169>
- Qamariah, N., Fatimah, N. I., & Anwar, N. (2022). Analisis Du Pont System dan Economic Value Added (EVA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 46-58.
<https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1633>
- Robert, C. H., Jennifer, L. K., & Todd, M. (2023a). *Analysis for financial management*. McGraw-Hill Education.
- Robert, C. H., Jennifer, L. K., & Todd, M. (2023b). *Analysis for financial management*. McGraw-Hill Education.
- Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, S., & García-Muiña, F. E. (2021). Flexibility and Resilience in Corporate Decision Making: A New Sustainability-Based Risk Management System in Uncertain Times. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 22(December), 107-132.
<https://doi.org/10.1007/s40171-021-00277-7>
- Slávik, Š., & Bednár, R. (2014). Analysis of Business Models. *Journal of Competitiveness*, 6(4), 19-40.
<https://doi.org/10.7441/joc.2014.04.02>
- Sukamulja, S. (2024). *Analisis Laporan Keuangan, Sebagai Dasar Pengambil Keputusan Investasi Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Ton, Z. (2014). *The good jobs strategy: How the smartest companies invest in employees to lower costs and boost profits*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Zairi, M. (2012). *Measuring performance for business results*. Springer Science & Business Media.

TENTANG PENULIS



Mohklas, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

Dilahirkan di Kota Semarang pada tanggal 1 Januari 1970, sebagai dosen tetap di Program Studi Akuntansi STIE Pelita Nusantara. Menyelesaikan S1 di Jurusan Akuntansi STIE Pelita Nusantara pada tahun 2009, dan S2 di Jurusan Akuntansi STIE Dharmaputra Semarang pada tahun 2012. Pada tahun 2023, dia melanjutkan studinya di Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Sultan Agung Semarang dengan fokus pada manajemen keuangan. Penulis aktif telah menulis artikel sampai dengan tahun 2025 sudah lebih dari 55 jurnal terakreditasi nasional, dengan ID SINTA: 6157277. keahlian dalam akuntansi dan perpajakan untuk membangun karir sebagai pengajar profesional dan peneliti aktif. Penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemenristek DIKTI (Penelitian Dosen Pemula dan Abdimas) telah dilakukan. Selain menjadi peneliti, penulis juga aktif menulis buku seperti Pengantar Akuntansi Syariah, Etika Bisnis, Perpajakan, Akuntansi Pajak, Metodologi Penelitian Akuntansi, Teori Akuntansi, Manajemen Konflik, Manajemen Risiko, Manajemen Sumber Daya Manusia, Audit Manajemen, Manajemen Keuangan, Akuntansi Keperilakuan, Perilaku Organisasi, Pengantar Manajemen, Akuntansi Manajemen, AI dan SDM, Etika Profesi Akuntansi, dan Akuntansi Keperilakuan Pendekatan Teori dan Inovasi Era Digital. Harapannya adalah dapat membantu bangsa dan negara, terutama dalam bidang ilmu ekonomi. Penulis memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai

Asisten Manajer Pemasaran, Umum, dan Perizinan di PT. Aneka Ilmu, dan saat ini aktif sebagai dosen tetap di STIE Pelita Nusantara, juga pada tahun 2021 hingga sekarang, dia adalah Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. Email Penulis: mohklas1970@gmail.com

BAB 12

KONSEP DAN KARAKTERISTIK PERSEDIAAN

Dr. Neni Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.
Universitas Kuningan

A. Pendahuluan

Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan perusahaan khususnya entitas yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan adalah persediaan. Dalam akuntansi, persediaan dapat didefinisikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual atau dalam proses produksi untuk dijual. Pencatatan dan pengukuran persediaan yang tepat sangat penting dalam mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Persediaan yang dikelola dengan baik dapat membantu mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok, yang berakibat pada gangguan produksi dan kehilangan peluang penjualan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan karakteristik persediaan menjadi sangat penting bagi manajer dan akuntan.

Persediaan merupakan aset penting bagi perusahaan karena berperan dalam memastikan kelancaran operasional dan pemenuhan permintaan pelanggan. Persediaan dapat berupa bahan baku untuk produksi, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap untuk dijual. Pengelolaan persediaan yang baik menjadi faktor krusial dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sebuah barang sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan stok yang dapat

menghambat operasional bisnis sebuah perusahaan (Park *et al.*, 2020).

Dalam konteks rantai pasokan, persediaan juga berfungsi sebagai buffer terhadap ketidakpastian permintaan dan pasokan. Perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen persediaan yang efisien untuk menghindari gangguan dalam proses produksi dan distribusi. Hal ini mencakup koordinasi dengan pemasok serta pengelolaan stok yang optimal agar perusahaan dapat menyesuaikan dengan fluktuasi pasar (Mouzas, 2022).

Selain itu, persediaan memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan manajemen persediaan yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan mengoptimalkan proses produksi serta distribusi. Penerapan teknologi dalam pengelolaan persediaan, seperti sistem otomatisasi dan analisis data, semakin meningkatkan efisiensi operasional serta membantu perusahaan dalam perencanaan yang lebih akurat (Robertson *et al.*, 2025).

Pada akhirnya, tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk dapat memastikan sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengalami kekurangan stok dan untuk menghindari pemborosan akibat kelebihan barang. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan (Sadeghi R. *et al.*, 2025).

Konsep Dasar Persediaan dalam Akuntansi

Persediaan mencakup berbagai bentuk aset yang berkaitan dengan barang dagangan dan bahan baku produksi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Barang jadi, yaitu barang yang siap untuk dijual kepada pelanggan.
2. Barang dalam proses, yang sedang dalam tahap produksi.
3. Bahan baku, yang digunakan dalam produksi barang.

4. Barang penolong, yang mendukung proses produksi tetapi bukan bagian utama dari produk akhir.

Dalam pencatatan akuntansi, sebuah persediaan dinilai berdasarkan pada biaya historis atau nilai realisasi bersih, tergantung pada mana yang lebih rendah (*lower of cost or net realizable value - LCNRV*). Hal ini bertujuan untuk mencerminkan nilai persediaan yang realistis dalam laporan keuangan. Selain itu, persediaan memiliki peran dalam perhitungan modal kerja dan likuiditas perusahaan. Perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya penyimpanan persediaan dan ketersediaan barang untuk menghindari gangguan produksi atau layanan.

B. Perlakuan Akuntansi Persediaan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan

Perlakuan akuntansi persediaan mencakup pengakuan, penilaian, pencatatan, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Secara umum, persediaan diakui sebagai aset saat diperoleh atau diproduksi, dengan biaya yang mencakup harga pembelian, biaya pengangkutan, serta biaya lain yang diperlukan untuk membuatnya siap dijual (IAI, 2019). Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pengukuran dan pengakuan persediaan diatur dalam PSAK 14, yang menetapkan bahwa persediaan harus diukur dengan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Jika terjadi penurunan nilai (*impairment*), perusahaan harus melakukan penyesuaian melalui penyisihan penurunan nilai persediaan.

Dalam penilaiannya, perusahaan dapat memilih beberapa metode yang berdampak berbeda terhadap laporan keuangan. Metode **FIFO** mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual, sehingga mencerminkan biaya yang lebih rendah dalam *cost of goods sold (COGS)* dan meningkatkan laba kotor ketika harga meningkat (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2018). Sebaliknya, metode **LIFO** mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah yang

pertama kali dijual, yang dalam kondisi inflasi akan mencatat biaya penjualan lebih tinggi, menurunkan laba yang dilaporkan, dan mengurangi beban pajak. Sementara itu, metode **rata-rata tertimbang** menghitung rata-rata biaya persediaan yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu, menghasilkan angka yang lebih stabil dalam laporan keuangan (Sadeghi R. *et al.*, 2025).

Untuk lebih jelasnya, metode penilaian persediaan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kinerja Perusahaan adalah:

1. *First-In, First-Out* (FIFO): Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Sehingga, nilai persediaan akhir mencerminkan harga barang yang lebih baru.
2. *Last-In, First-Out* (LIFO): Dalam metode ini, barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Hal ini dapat mengurangi laba kena pajak dalam kondisi inflasi tetapi dilarang oleh IFRS.
3. *Average Cost* (Biaya Rata-Rata): Metode ini menghitung rata-rata biaya barang yang tersedia untuk dijual dan menerapkannya pada barang yang dijual maupun yang masih dalam persediaan.
4. *Specific Identification*: Metode ini digunakan jika setiap unit persediaan dapat diidentifikasi secara individual, seperti dalam perdagangan barang berharga tinggi.

Selain metode penilaian, perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap persediaan yang mengalami penurunan nilai. Jika terdapat barang yang tidak terjual dalam jangka waktu lama atau mengalami kerusakan, perusahaan harus melakukan penyisihan atau pencatatan kerugian untuk mencerminkan nilai wajar persediaan tersebut. Penyesuaian ini penting untuk dilakukan agar laporan keuangan tetap akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Wang *et al.*, 2025).

Selain itu, untuk menghindari pencurian atau kesalahan dalam pencatatan persediaan, perusahaan juga perlu untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem ini mencakup prosedur audit yang ketat, pemisahan tugas dalam pengelolaan persediaan, serta pemantauan berkala terhadap jumlah dan kondisi persediaan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang tepat dan pengendalian internal yang kuat dapat mendukung efisiensi operasional perusahaan dan memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan.

Persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan, baik dalam laba rugi maupun neraca. Sebagai salah satu aset lancar, persediaan dicatat dalam neraca dan berkontribusi terhadap total aset perusahaan. Semakin besar nilai persediaan, semakin besar total aset yang dilaporkan, yang dapat meningkatkan persepsi investor terhadap kesehatan finansial perusahaan (Park *et al.*, 2020). Namun, pengelolaan persediaan yang tidak efisien dapat menyebabkan masalah likuiditas dan meningkatkan risiko kerugian akibat persediaan usang atau tidak terjual.

Dalam laporan laba rugi, persediaan mempengaruhi biaya penjualan atau *Cost of Goods Sold* (COGS). Ketika barang dijual, biaya persediaan tersebut akan dicatat sebagai beban, sehingga secara langsung mempengaruhi laba kotor dan laba bersih perusahaan. Metode penilaian persediaan yang digunakan—seperti FIFO (*First-In, First-Out*), LIFO (*Last-In, First-Out*), atau metode rata-rata tertimbang—berperan dalam menentukan besaran biaya yang dicatat. Pemilihan metode ini juga berdampak pada laba yang dilaporkan serta beban pajak yang harus dibayar (Horngren, Datar, & Rajan, 2019).

Persediaan juga mempengaruhi arus kas perusahaan. Jika perusahaan memiliki persediaan yang berlebihan, modal kerja dapat terikat dan mengurangi kas yang tersedia untuk kebutuhan operasional lainnya. Sebaliknya, jika persediaan terlalu rendah maka dapat menyebabkan kehilangan peluang dalam penjualan dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan

persediaan agar dapat memenuhi permintaan tanpa mengorbankan likuiditas (Atrill & McLaney, 2020). Selain itu, risiko penurunan nilai persediaan akibat barang usang atau rusak harus diantisipasi. Jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya tercatatnya, perusahaan wajib mencatat penyesuaian dalam laporan keuangan untuk mencerminkan nilai yang lebih realistis, yang pada akhirnya mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan (Robertson *et al.*, 2025).

C. Sistem Pencatatan Persediaan

Terdapat dua sistem utama dalam pencatatan persediaan, yaitu:

1. Sistem Pencatatan Perpetual

Sistem pencatatan perpetual mencatat perubahan persediaan secara real-time setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Setiap perubahan dicatat langsung dalam akun persediaan tanpa perlu menunggu perhitungan fisik periodik. Keuntungan utama sistem ini adalah:

- a. Memberikan informasi yang *up-to-date* dan lebih akurat tentang jumlah persediaan.
- b. Mengurangi kemungkinan kehilangan atau kesalahan pencatatan persediaan.
- c. Memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat menanggapi fluktuasi permintaan pasar.

Namun, sistem ini memerlukan investasi teknologi seperti software manajemen persediaan, sehingga lebih mahal dibandingkan sistem periodik.

2. Sistem Pencatatan Periodik

Dalam sistem pencatatan periodik, perubahan persediaan hanya dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan perhitungan fisik persediaan. Sistem ini tidak mencatat perubahan persediaan secara terus-menerus dan hanya memperbarui saldo persediaan berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan secara berkala. Keuntungan dari sistem ini adalah:

- a. Lebih sederhana dan murah dibandingkan sistem perpetual karena tidak memerlukan sistem pencatatan real-time.
- b. Cocok untuk bisnis kecil dengan transaksi persediaan yang relatif sedikit.

Namun, kelemahannya meliputi:

- a. Kurangnya informasi *real-time* yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan persediaan.
- b. Risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi secara cepat.

D. Manajemen Persediaan dalam Operasi Bisnis

Dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya operasional, manajemen persediaan yang efektif sangat penting bagi Perusahaan. Dengan menerapkan strategi yang tepat dalam perencanaan, pengendalian, pengadaan, serta pemanfaatan teknologi, perusahaan dapat memastikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, investasi dalam sistem manajemen persediaan yang canggih dan strategi pengelolaan yang berbasis data menjadi kunci utama dalam mencapai keunggulan kompetitif di pasar (Sadeghi R. *et al.*, 2025).

1. Manajemen Persediaan dalam Operasi Bisnis

Manajemen persediaan merupakan aspek fundamental dalam operasi bisnis yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah barang yang tepat pada waktu yang tepat. Pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan, menjaga kelancaran operasional dan mengoptimalkan biaya operasional. Dengan menerapkan strategi manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan (Park *et al.*, 2020).

2. Perencanaan dan Pengendalian Persediaan

Perencanaan persediaan merupakan tahap awal dalam manajemen persediaan yang mencakup estimasi permintaan, analisis tren penjualan, serta penentuan tingkat persediaan yang optimal. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi permintaan, musiman, dan tren pasar dalam menyusun strategi perencanaan persediaan. Prediksi ini dapat membantu perusahaan dalam menghindari kekurangan ataupun kelebihan stok yang berpotensi merugikan bisnis perusahaan (Mouzas, 2022). Setelah perencanaan, pengendalian persediaan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa jumlah barang yang tersedia tetap dalam batas yang optimal. Penerapan sistem informasi yang canggih dan pemantauan stok secara berkala melalui audit persediaan dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan secara efisien. Penggunaan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi memungkinkan pelacakan pergerakan barang secara real-time, yang dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi pengelolaan persediaan (Robertson *et al.*, 2025).

3. Pengadaan dan Hubungan dengan Pemasok

Pengadaan merupakan bagian integral dari manajemen persediaan yang mencakup proses pemilihan pemasok, negosiasi harga, serta pengaturan pengiriman barang. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat dalam menentukan metode pengadaan yang efisien, seperti Vendor Managed Inventory (VMI) atau Just-In-Time (JIT). JIT memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan dengan hanya menyimpan persediaan saat dibutuhkan, sementara VMI memberikan wewenang kepada pemasok untuk mengelola persediaan di lokasi perusahaan, sehingga meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar (Wang *et al.*, 2025). Hubungan yang baik dengan pemasok juga sangat penting dalam manajemen persediaan. Perusahaan perlu menjalin kerja sama yang kuat dengan pemasok yang andal guna memastikan ketersediaan barang

yang konsisten, terutama dalam kondisi permintaan yang tidak menentu. Negosiasi kontrak yang menguntungkan serta evaluasi kinerja pemasok secara berkala dapat membantu meningkatkan efisiensi pengadaan dan mengurangi risiko keterlambatan pasokan (Sadeghi R. *et al.*, 2025).

4. Teknologi dan Sistem Informasi dalam Manajemen Persediaan

Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas manajemen persediaan dalam era digital saat ini. Implementasi sistem informasi berbasis perangkat lunak, seperti sistem manajemen persediaan otomatis dan *Enterprise Resource Planning* (ERP) dapat membantu perusahaan dalam mencatat dan melacak pergerakan barang dengan lebih akurat. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses pemantauan persediaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan (Park *et al.*, 2020). Selain itu, analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) dan big data dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Dengan mengolah tren pasar dan data historis, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pengelolaan persediaan mereka agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan (Mouzas, 2022).

5. Optimalisasi Biaya dan Efisiensi Operasional

Dalam mengurangi berbagai biaya operasional yang berkaitan dengan penyimpanan, pengadaan, serta pengelolaan persediaan, manajemen persediaan yang efektif sangat diperlukan perusahaan. Perusahaan perlu menyeimbangkan antara risiko kehilangan penjualan akibat kekurangan stok dan biaya penyimpanan yang tinggi. Untuk menentukan jumlah optimal pesanan yang harus dilakukan maka Strategi seperti *Economic Order Quantity* (EOQ) dapat digunakan sehingga dapat meminimalkan biaya total persediaan (Robertson *et al.*, 2025).

Selain itu, analisis kinerja persediaan melalui metrik seperti rotasi persediaan dan tingkat layanan pelanggan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi berkala terhadap kinerja sistem manajemen persediaan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasional mereka dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan (Wang *et al.*, 2025).

E. Pengendalian Internal Atas Persediaan

Salah satu langkah krusial dalam menjaga keakuratan pencatatan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan efisiensi manajemen persediaan adalah dengan **pengendalian internal atas persediaan**. Sistem pengendalian ini terdiri dari berbagai prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset persediaan, memastikan keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Dengan penerapan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kehilangan, pencurian, atau kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan.

Salah satu aspek penting dalam pengendalian internal atas persediaan adalah **pemisahan tugas**. Memisahkan tanggung jawab antara pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan persediaan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan. Misalnya, individu yang bertanggung jawab atas pembelian barang tidak seharusnya terlibat dalam penerimaan atau pencatatan persediaan. Langkah ini membantu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahap pengelolaan persediaan.

Selanjutnya, **pencatatan yang akurat** sangat diperlukan untuk mendukung pengendalian internal yang efektif. Penggunaan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi, seperti perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP), dapat membantu perusahaan dalam mencatat pergerakan persediaan secara real-time. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap transaksi persediaan, memastikan pencatatan

yang akurat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau manipulasi data dalam laporan keuangan.

Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan **pengawasan fisik dan audit rutin** terhadap persediaan. Pemeriksaan fisik secara berkala bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah persediaan yang tercatat dalam sistem dengan jumlah yang sebenarnya tersedia di gudang. Audit internal yang dilakukan secara terjadwal juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian data, mendeteksi kehilangan barang, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian internal yang telah diterapkan.

Sistem keamanan dan kontrol akses juga menjadi elemen penting dalam pengendalian internal atas persediaan. Perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan, seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), penggunaan sistem akses berbasis kartu atau kode keamanan, serta pembatasan akses ke gudang hanya untuk personel yang berwenang. Dengan adanya kontrol akses yang ketat, risiko pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan persediaan dapat diminimalkan secara efektif.

Selain aspek keamanan, **pengelolaan persediaan yang efektif** juga berperan dalam optimalisasi sistem pengendalian internal. Metode seperti *Just-in-Time* (JIT) dan *Economic Order Quantity* (EOQ) dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk disimpan, sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan serta menghindari risiko kelebihan atau kekurangan stok. Dengan strategi pengelolaan persediaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis.

Terakhir, **pelatihan karyawan** mengenai prosedur pengendalian internal dan pentingnya menjaga integritas persediaan merupakan langkah yang tidak kalah penting. Karyawan yang memahami kebijakan dan sistem pengendalian internal akan lebih sadar terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi serta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih akurat

dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen persediaan, mengurangi risiko kehilangan atau kecurangan, serta memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (Mouzas, 2022; Park *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2025).

F. Kesalahan dalam Perhitungan Persediaan

Kesalahan dalam perhitungan persediaan dapat terjadi karena berbagai faktor dan dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan serta pengambilan keputusan bisnis. Persediaan merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan, dan ketidakakuratan dalam pencatatannya dapat mengarah pada kesalahan dalam perhitungan laba, nilai aset, serta strategi operasional perusahaan. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis kesalahan dalam perhitungan persediaan menjadi penting bagi manajemen perusahaan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah **kesalahan pencatatan**, yaitu ketidaksesuaian antara jumlah yang tercatat dalam sistem dengan jumlah fisik persediaan akibat kesalahan dalam mencatat transaksi pembelian atau penjualan. Misalnya, jika penerimaan barang tidak dicatat dengan benar, hal ini dapat menyebabkan stok barang tampak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang sebenarnya tersedia. Kesalahan ini dapat terjadi karena kelalaian manusia dalam memasukkan data atau sistem yang tidak berjalan optimal.

Selain itu, **kesalahan penghitungan fisik** juga sering ditemukan saat melakukan inventarisasi. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh salah menghitung jumlah barang, tidak memperhitungkan barang yang rusak atau hilang, atau melakukan perhitungan ganda pada barang yang sama. Ketidaktepatan dalam perhitungan ini dapat mengakibatkan laporan persediaan yang tidak akurat, yang pada akhirnya

memengaruhi pengambilan keputusan terkait manajemen stok dan arus kas perusahaan.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap kesalahan dalam perhitungan persediaan adalah **penggunaan metode penilaian yang tidak tepat atau tidak konsisten**. Metode seperti FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), atau metode rata-rata tertimbang memiliki dampak yang berbeda terhadap nilai persediaan yang dilaporkan. Kesalahan dalam memilih atau menerapkan metode yang sesuai dapat menyebabkan nilai persediaan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, yang berimplikasi pada laporan laba rugi dan neraca perusahaan.

Selain itu, **keterlambatan dalam pembaruan data persediaan** juga menjadi penyebab utama ketidakakuratan laporan persediaan. Jika sistem informasi persediaan tidak diperbarui secara real-time, perusahaan mungkin menggunakan data yang sudah kedaluwarsa untuk mengambil keputusan terkait pengadaan atau penjualan barang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang berdampak pada efisiensi rantai pasokan dan kinerja operasional secara keseluruhan.

Kesalahan dalam perhitungan persediaan juga dapat terjadi akibat **kurangnya pengawasan dan kontrol internal**. Tanpa sistem pengendalian yang baik, seperti pemisahan tugas antara bagian pengadaan dan pencatatan, risiko terjadinya kesalahan atau bahkan kecurangan dalam manajemen persediaan menjadi lebih tinggi. Prosedur audit internal yang lemah juga dapat menyebabkan perusahaan tidak menyadari adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan persediaan hingga akhirnya berdampak pada laporan keuangan.

Terakhir, **kesalahan dalam perencanaan permintaan dan perkiraan stok** dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara stok yang tersedia dengan kebutuhan pasar. Jika perusahaan memesan terlalu sedikit barang maka perusahaan dapat kehilangan peluang penjualan. Sedangkan jika terlalu banyak barang, maka akan muncul biaya penyimpanan yang tinggi. Kesalahan dalam perencanaan ini sering kali terjadi akibat

kurangnya analisis terhadap tren pasar atau penggunaan data historis yang tidak akurat.

Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam perhitungan persediaan sangat penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (Park *et al.*, 2020). Dengan menerapkan sistem pencatatan yang lebih baik, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan penggunaan metode penilaian yang sesuai, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan persediaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan asetnya (Mouzas, 2022).

G. Kesimpulan

Persediaan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam industri manufaktur dan perdagangan. Pengelolaan persediaan yang efektif berperan dalam menjaga kelancaran operasional, mengoptimalkan biaya, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Dari perspektif akuntansi, persediaan diklasifikasikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan barang penolong. Penilaian persediaan dilakukan menggunakan metode FIFO, LIFO, rata-rata tertimbang, dan identifikasi spesifik, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan.

Perlakuan akuntansi terhadap persediaan mencakup pengakuan, pencatatan, dan pelaporan dalam laporan keuangan, yang mempengaruhi nilai aset dalam neraca serta biaya penjualan dalam laporan laba rugi. Kesalahan dalam perhitungan persediaan dapat mengakibatkan ketidakakuratan laporan keuangan, sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat guna memastikan keandalan pencatatan persediaan. Dalam manajemen operasional, strategi persediaan seperti Vendor Managed Inventory (VMI) dan Just-In-Time (JIT) dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan stok,

mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan respons terhadap permintaan pasar. Implementasi teknologi dalam sistem manajemen persediaan juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan.

Dengan demikian, manajemen persediaan yang baik tidak hanya mendukung stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan daya saing pasar dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan persediaan yang berbasis data serta pengendalian internal yang kuat untuk memastikan pencatatan dan pengelolaan persediaan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Drury, C. (2021) *Management and Cost Accounting*. 10th edn. London: Cengage Learning.
- Heizer, J. dan Render, B. (2020) *Operations Management*. 12th edn. New Jersey: Pearson Education.
- IFRS Foundation (2022) *International Financial Reporting Standards (IFRS) Handbook*. London: IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2021) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14: Persediaan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J. dan Warfield, T. D. (2020) *Intermediate Accounting*. 16th edn. New York: Wiley.
- Mouzas, S. (2022). What drives business transformation? Evidence from manufacturer-retailer networks. *Journal of Business Research*, 143, 282–293. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.053>
- Park, M., Kim, M., & Ryu, S. (2020). The relationship between network governance and unilateral governance in dynamic consumer demand. *Industrial Marketing Management*, 84, 194–201. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.05.008>
- Robertson, J., Botha, E., Oosthuizen, K., & Montecchi, M. (2025). Managing change when integrating artificial intelligence (AI) into the retail value chain: The AI implementation compass. *Journal of Business Research*, 189. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115198>
- Sadeghi R., K., Ojha, D., Kaur, P., Mahto, R. V., & Dhir, A. (2025). Metaverse technology in sustainable supply chain management: Experimental findings. *Decision Support Systems*, 191. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114423>
- Wang, W. (Britney), Deleersnyder, B., & Yildirim, G. (2025). The impact of new product entry on brand sales volatility at the retailer: A Detailed Look into volatility drivers. *Journal of*

Business *Research,*
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115267>

191.

TENTANG PENULIS



Dr. Neni Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.
Universitas Kuningan

Penulis lahir di Kuningan Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 1988. Penulis adalah PNS Dosen Kemdiktisaintek dpk Pada Program Studi Akuntansi FEB Universitas Kuningan dengan latarbelakang pendidikan S3 Akuntansi & Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) serta memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala (LK). Selain itu penulis aktif menjalankan tri dharma perguruan tinggi seperti mengajar, menulis buku, menghasilkan artikel ilmiah bidang ASP yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks maupun jurnal Internasional bereputasi, melakukan pengabdian kepada masyarakat serta aktif mengikuti berbagai program sertifikasi penunjang kompetensi.

BAB 13 | TEORI AKUNTANSI POSITIF DAN NORMATIF

Anastasia Anggarkusuma A., M.Pd.
Universitas Perwira Purbalingga

A. Pendahuluan

Ilmuwan akuntansi mendefinisikan dan menafsirkan perbedaan akuntansi dengan cara yang berbeda. Beberapa orang berasumsi bahwa definisi akuntansi saat ini tidak memperhitungkan pengembangan dunia bisnis, dan secara eksplisit dapat menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana pembukuan berperan. Dalam hal ini, standar akuntansi dapat mencakup pedoman untuk pengobatan yang terkait dengan definisi, pengukuran, evaluasi, catatan, klasifikasi, dan pengungkapan bidang -bidang yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan.

Pada dasarnya, ada perbedaan dalam desain, pengembangan dan aplikasi negara -negara yang ada secara ilmiah. Akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pada kenyataannya, masing -masing negara akan berbeda tergantung pada struktur dan kondisi negara di mana akuntansi dilakukan. Ini berbeda ketika akuntansi diklasifikasikan dari perspektif sains dan teknologi, karena tujuan akuntansi mengarah pada pembaruan akuntansi yang positif dan normatif.

B. Teori Akuntansi Normatif

Definisi teori normatif sebagai teori wajib dihasilkan oleh perkembangan awal teori akuntansi. Dalam teori penilaian normatif digunakan nilai minimum yang memuat premis. Teori yang disiapkan khusus untuk pengembangan postulat akuntansi digunakan pada tahap awal penulisan teori. (Watts and Zimmerman, 1990) menjelaskan pengertian teori normatif ketika seorang ahli teori akuntansi menjadi lebih terlepas dan peduli dengan bagaimana perusahaan meresepkan laporan menjadi lebih normatif dan peduli dengan apa yang harus dilakukan. Dari pengertian tersebut, teori normatif berupaya menjelaskan informasi sebagaimana mestinya.

Karena "tujuan akuntansi tertentu" harus dipenuhi, satu-satunya tujuan teori akuntansi normatif adalah menjelaskan mengapa pendekatan akuntansi yang berbeda lebih unggul atau lebih berhasil daripada yang lain. Untuk mencapai tujuan akuntansi, misalnya, apakah akuntansi biaya historis lebih unggul daripada akuntansi biaya saat ini? Landasan "tujuan yang disepakati untuk dicapai" digunakan untuk menjelaskan teori akuntansi normatif ini. Tentu saja, teori normatif sarat dengan nilai-nilai dalam situasi ini karena menetapkan praktik dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah proses subjektif yang memerlukan kemampuan untuk menyeimbangkan (secara cerdas) prinsip-prinsip manfaat dan risiko. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa pernyataan atau gagasan yang memerlukan praktik akuntansi adalah hasil akhir dari teori akuntansi normatif. Menurut teori akuntansi normatif, misalnya, aset tetap harus dinilai, dicatat dan dialporkan dalam neraca berdasarkan biaya historis.

Tujuan teori akuntansi normatif adalah untuk menjelaskan apa dan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Cara praktik tertentu harus dilakukan ditentukan oleh teori normatif, dan rekomendasi ini mungkin berbeda secara signifikan dari praktik saat ini. Ketika teori tertentu menyarankan standar, norma, atau tujuan tertentu yang harus dicapai oleh praktik nyata, maka teori normatif pun tercipta.

Teori normatif yang mencoba menawarkan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diperhitungkan saat mengembangkan teori. Teori normatif sering disebut sebagai teori apriori, yang bersifat deduktif atau berarti sebab dan akibat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teori normatif merupakan hasil dari kegiatan semi-penelitian daripada studi empiris. Teori normatif tidak menguji hipotesisnya; teori ini hanya membuatnya tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, teori normatif bertujuan untuk menjelaskan informasi akuntansi apa yang harus disampaikan kepada pengguna dan bagaimana informasi tersebut harus disajikan. Oleh karena itu, teori akuntansi normatif tidak dimaksudkan untuk pengembangan teori yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang "apa dan bagaimana yang harus dilakukan" oleh akuntan, tetapi lebih berfokus pada resep (norma).

Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960an. Selama periode ini perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktikkan. Pada periode tersebut, teori normatif lebih berkonsentrasi pada:

1. Penciptaan laba sesungguhnya (*true income*)
2. Pengambilan keputusan (*decision usefulness*)

Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran (*wealth*) atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Biasanya konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan:

1. Akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran
2. Laba dan nilai dapat diukur secara tepat
3. Akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi
4. Pasar tidak efisien (dalam pengertian ekonomi)
5. Ada beberapa pengukur laba yang unik.

Teori akuntansi normatif memiliki sifat parsial dan ditujukan untuk mendukung simpulan mengenai prosedur tertentu saja. Untuk mengevaluasi praktik saat ini dan mempromosikan evolusi logis prinsip dan praktik akuntansi, kerangka teori akuntansi telah lama diperlukan. Pembeneran untuk menggunakan metode normatif untuk menganalisis teori akuntansi terlalu mudah dan tidak memiliki dasar teori yang kuat. Untuk menutup kesenjangan dalam teori akuntansi normatif, pendekatan yang lebih positif dan berbasis empiris harus dikembangkan untuk membangun model baru bagi pengembangan teori akuntansi di masa mendatang atau untuk mempertahankan beberapa prosedur atau metode akuntansi yang sudah digunakan.

C. Teori Akuntansi Positif

William H. Beaver menerbitkan makalah berjudul *"Information Content"* pada tahun 1968, yang merupakan studi akuntansi positif pertama. Pengumuman Pendapatan Tahunan (Jensen & Mecklen, 1976). Berikutnya adalah teori akuntansi positif yang diakui pada tahun 1978 oleh Watts & Zimmerman dalam makalahnya *"Towards a Positive Theory of Accounting Determination Standards"*. Untuk mendukung berbagai teknik atau metode akuntansi saat ini, atau untuk menemukan model baru bagi perkembangan teori akuntansi di masa depan, artikel tersebut mengembangkan paradigma domain penelitian akuntansi dengan teori akuntansi positif berdasarkan data kualitatif dan empiris (Wiratama and Asri, 2020).

Tiga faktor yang melatarbelakangi munculnya pendekatan normatif ke positif, khususnya (Watts and Zimmerman, 1990): 1. Ketidakmampuan pendekatan normatif

dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada "premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat menguji validitasnya secara empiris; 2. Pendekatan normatif lebih berfokus pada kesejahteraan investor individu daripada kemakmuran masyarakat secara luas; dan 3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan alokasi sumber daya ekonomi yang optimal di pasar modal. Hal ini karena, dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar, akuntansi informasi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien.

Teori akuntansi positif bertujuan untuk menggambarkan prosedur yang menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman akuntansi selain penggunaan praktik akuntansi terbaik untuk menghadapi keadaan tertentu di masa depan. Menurut (Alayemi and Abdul-Lateef, 2017), teori akuntansi positif dalam prinsip ini membuat asumsi bahwa tujuan teori akuntansi adalah untuk memprediksi dan menjelaskan praktik akuntansi. Memberikan pembenaran terhadap suatu amalan yang dilihat disebut dengan penjelasan. Teori akuntansi positif, misalnya, bertujuan untuk menjelaskan mengapa beberapa bisnis mengubah praktik akuntansi mereka dan mengapa bisnis lainnya terus menggunakan metode akuntansi biaya yang sudah ketinggalan zaman. Ketika mengantisipasi prosedur akuntansi, suatu teori mencoba meramalkan suatu peristiwa yang belum terlihat atau dialami.

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa PAT menyoroiti gagasan teori akuntansi yang disajikan dalam literatur akuntansi. menjelaskan prosedur akuntansi yang digunakan dan memprediksi alasan di balik fenomena saat ini dan masa depan (Nana, 2018). Temuan dari penelitian ini (Augustine and Florence M, 2018) menunjukkan korelasi substansial antara pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam organisasi bisnis dan teori akuntansi positif. Studi ini menunjukkan perlunya menguji secara menyeluruh prinsip-prinsip teori akuntansi dalam organisasi perusahaan.

Proposisi yang dibuat oleh teori akuntansi positif hanyalah penjelasan dari prosedur akuntansi yang sebenarnya (Bocuse, Bensabeur-Slimane and Management, 2015). Misalnya, (1) ciri-ciri organisasi yang memutuskan untuk menggunakan teknik akuntansi tertentu, dan (2) bagaimana penerapan standar akuntansi memengaruhi perilaku orang atau organisasi yang tertarik pada data akuntansi. Karena teori akuntansi normatif tidak dapat menggambarkan situasi praktis di dunia nyata secara memadai, teori akuntansi positif juga dapat dianggap sebagai perluasan dari teori akuntansi normatif. Prediksi bahwa bisnis tertentu akan menerima pengajuan aturan akuntansi baru merupakan fokus dari teori akuntansi positif.

Dari definisi di atas, teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena praktik yang belum dilaksanakan. Fenomena yang belum dilaksanakan tidak selalu merupakan fenomena yang akan datang, melainkan fenomena yang sudah terjadi tetapi belum ada bukti empiris yang membenarkan fenomena tersebut.

Pendekatan positif atau empiris berkaitan dengan melakukan usaha pengujian atau menghubungkan kembali hipotesis atau teori dengan pengalaman atau fakta di dunia nyata. Penelitian dalam teori akuntansi positif difokuskan pada pengujian secara empiris terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Misalkan penggunaan kuesioner dan terknis survei lainnya, para peneliti akan melakukan pengujian sikap manajer terhadap kebermanfaatan metode akuntansi tertentu. Pendekatan khusus dapat dilaksanakan dengan cara melakukan survei pendapat analisis keuangan, manajer bank atau para ahli akuntansi terhadap tugas atau kasus tertentu yang dibuat oleh para peneliti (contoh, prediksi keberangkutan, keputusan membeli atau menjual surat berharga).

Pendekatan lain yang bisa digunakan yaitu melakukan pengujian arti penting dari hasil akhir akuntansi di pasar. Dengan demikian teori akuntansi mempunyai fokus ekonomi dan berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sudah sesuai dengan manfaat yang diperoleh
2. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi dengan kebermanfaatannya?
3. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap surat berharga.

Untuk menjawab pertanyaan maka teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Manajer, investor, kreditor, dan individu bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan.
2. Manajer memiliki kebebasan dalam melakukan pilihan metode akuntansi yang memaksimalkan kepuasan atau mengubah kebijakan produksi, investasi dan pendanaan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan.
3. Manajer mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan.

Berdasarkan pernyataan dan asumsi diatas maka teori akuntansi positif berusaha menguji tiga hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan ini diharapkan dapat memberikan kenaikan nilai sekarang bonus yang diterima apabila komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

2. Hipotesis Ekuitas Utang (*Debt/Equity Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin tinggi angka utang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar kemungkinan bagi manajerial untuk melakukan pilihan metode akuntansi yang dapat memberikan kenaikan laba. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas maka semakin dekat

perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan mempunyai metode akuntansi yang bisa memberikan kenaikan laba sehingga dapat mengendurkan Batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

3. **Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)**

Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang bisa mengurangi laba periode. Ukuran perusahaan ini adalah ukuran variabel proksi dan aspek politik. Dasar dari hipotesis ini yaitu asumsi bahwa tingginya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul menunjukkan monopoli laba. Disamping itu, tingginya nilai tersebut bagi individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum regulasi, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi individu. Dengan ini proses politik tidak jauh berbeda dari proses pasar. Atas dasar biaya informasi serta biaya monitoring tersebut, maka manajer memiliki insentif untuk memiliki laba akuntansi tertentu dalam proses politik.

Tiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan yaitu:

1. Manajemen dengan pemilik
2. Manajemen dengan kreditor
3. Manajemen dengan pemerintah

Pada saat ini, teori-teori positif menyoroiti penjelasan tentang alasan praktik perusahaan dan perkiraan peran akuntansi dan informasi terkait dalam kepuasan ekonomi dan ekonomi individu, bisnis dan partai lain yang memainkan peran dalam modal dan pasar ekonomi. Namun demikian, asumsi berdasarkan proyek penelitian positif telah dikritik secara luas sebagai pendukung teori positif menggunakan penolakan alternatif, juga dikenal sebagai ide-ide lain. Ini berarti bahwa

teori positif tidak memiliki nilai atau makna yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan nilai-nilai implisit dan memengaruhi bentuk dan konten penelitian yang dilakukan. Para peneliti tidak dapat menghindari distorsi elemen dalam semua studi yang dilakukan. Oleh karena itu, faktor biasing jelas menunjukkan realisasi peneliti.

D. Perbedaan Teori Akuntansi Normatif dan Teori Akuntansi Positif

Normatif dianggap sebagai opini pribadi dan subjektif, sehingga hal ini tidak bisa diterima dan harus dilakukan pengujian secara empiris supaya mendapatkan landasan teori yang kuat. Dalam praktiknya, para profesional yang menggeluti bidang akuntansi telah menyadari apabila teori akuntansi positif lebih bisa diterapkan dibandingkan dengan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi positif mempunyai sifat pemecahan masalah yang disesuaikan dengan keadaan riil dari praktik akuntansi (Artner, 2014). Pendekatan ekonomi dan perilaku digunakan dalam teori akuntansi positif.

Pendekatan ilmiah akan menghasilkan teori akuntansi positif dan pendekatan teknologi akan menghasilkan teori akuntansi normatif. Kategori ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh teori akuntansi. Definisi positif terdiri dari pernyataan mengenai sesuatu (peristiwa, sikap atau tindakan) berdasarkan fakta atau apa yang telah terjadi didasarkan atas observasi empiris. Definisi positif diarahkan agar memberikan jawaban betul tidaknya suatu pernyataan berdasarkan kriteria ilmiah. Definisi normatif terdiri dari pernyataan dan penalaran untuk menilai hal baik atau salah mengenai kebijakan ekonomi atau sosial. Definisi normatif ditujukan untuk memberikan dukungan atau hasil atas kebijakan politik dengan demikian memiliki sifat untuk pembuatan kebijakan.

Perbedaan antara teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif adalah pada pernyataan, spesifikasi masalah, basis simpulan, kategori penerimaan suatu teori dan

metode pengujian. Berdasarkan perbedaan tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan dari teori akuntansi positif adalah melakukan penjelasan atau penalaran agar bisa memberikan secara ilmiah kebenaran dari suatu pernyataan atau peristiwa akuntansi sesuai dengan fakta. Teori ini memiliki tujuan untuk memberikan definisi prediksi dan memberikan jawaban atas praktik akuntansi. Selain itu, hasil dari teori akuntansi normatif yaitu pernyataan atau proporsi yang perlu dalam kegiatan praktik akuntansi, teori akuntansi normatif memiliki fokus pada norma dan tidak digunakan untuk pengembangan teori. Sedangkan teori akuntansi positif berupaya untuk memberikan penjelasan dan prediksi dari suatu peristiwa mengenai akuntansi (Patty, Fransesco and Lamawitak, 2021).

Validitas teori akuntansi positif diberikan berdasarkan kesesuaian teori dengan apa yang telah terjadi, sedangkan teori akuntansi normatif merupakan definisi penjelasan dalam membenarkan kelayakan suatu perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lebih baik memberikan penjelasan praktik akuntansi yang semestinya dan target utama adalah nilai.

E. Kesimpulan

Teori akuntansi normatif lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Tujuannya adalah memberikan panduan atau pedoman etis dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan teori akuntansi positif yang lebih mengamati dan menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Fokus utamanya adalah pada penjelasan fenomena yang ada di lapangan tanpa menilai apakah itu benar atau salah secara moral.

Dalam pendekatan teori akuntansi normatif dan akuntansi positif memiliki kesamaan dalam mempengaruhi preferensi pemilihan metode akuntansi, hanya saja hasil untuk teori normatif sudah bisa diprediksi dengan jelas, sedangkan teori positif hasilnya masih menunggu pengaruh dari faktor lain contohnya keinginan manajer dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayemi, S. A. and Abdul-Lateef, M. O. (2017) 'Accounting Numbers and Management's Financial Reporting Incentives: Evidence from Positive Accounting Theory', *Noble International Journal of Economics and Financial Research*, 2(2), pp. 50-53. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Sunday_Alayemi2/publication/313837880_Accounting_Numbers_and_Management's_Financial_Reporting_Incentives_Evidence_from_Positive_Accounting_Theory/links/58c99f4a92851c4b5e6c9a33/Accounting-Numbers-and-Managements-Financ.
- Artner, A. (2014) 'Working paper October 2014', (October).
- Augustine, O. and Florence M, A. (2018) 'The General Tenets of Positive Accounting Theory Towards Accounting Practice and Disclosure in Corporate Organizations in Nigeria', *Journal of Economics and Sustainable Development*, 9(20), pp. 1-11.
- Bocuse, I. P., Bensabeur-Slimane, A. and Management, I. (2015) 'The determinants of accounting strategy choices towards positive accounting Theory and institutional theory The determinants of Accounting Strategy Choices: "A Theoretical and Empirical Study through Positive Accounting Theory and Institutional Theory" Fa', pp. 28-30.
- Lyon, T. P. and Shimshack, J. P. (2015) *Environmental Disclosure: Evidence From Newsweek's Green Companies Rankings, Business and Society*. doi: 10.1177/0007650312439701.
- Nana, M. (2018) 'Positive Accounting Theory (Pat): Telaah Literatur Dari Berbagai Perspektif', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 9(2), p. 72. doi: 10.18860/em.v11i2.5271.
- Patty, Q., Fransesco, T. and Lamawitak, P. L. (2021) 'Positive And Normative Accounting Theory: Definition And Development', *International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBIS)*, 1(2), pp. 184-193.

Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. (1990) 'Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective', *The Accounting Review*, 65(1), pp. 131-156.

Wiratama, R. and Asri, M. (2020) 'A Literature Review: Positive Accounting Theory (PAT)', *SSRN Electronic Journal*, pp. 1-10. doi: 10.2139/ssrn.3523571.

TENTANG PENULIS



Anastasia Anggarkusuma A., M.Pd.
Universitas Perwira Purbalingga

Penulis lahir di Purbalingga pada tanggal 14 Mei 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Perwira Purbalingga. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi. Sebagai hal untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Selain peneliti dan pengabdian, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email Penulis : anastasia@unperba.ac.id

BAB 14 | TREN DAN ISU TERKINI DALAM TEORI AKUNTANSI

Nurul Izzah Lubis, S.E., M.Ak.
Universitas Potensi Utama

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, teori akuntansi tidak lagi dapat dipandang sebagai suatu struktur yang kaku dan final. Sebaliknya, teori akuntansi merupakan konstruksi ilmiah yang terus berkembang dan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Pentingnya mengikuti perkembangan dan isu kontemporer dalam teori akuntansi terletak pada fungsinya sebagai landasan ilmiah yang menjembatani antara pemikiran akademik dan praktik akuntansi di lapangan (Scott, 2015).

Perubahan lingkungan bisnis dan regulasi mengharuskan teori akuntansi untuk mampu memberikan penjelasan, prediksi, dan pedoman normatif terhadap praktik akuntansi yang kompleks dan dinamis. Fenomena seperti ekonomi digital, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaporan keuangan, serta meningkatnya kesadaran terhadap akuntabilitas sosial dan lingkungan telah menimbulkan berbagai pertanyaan baru dalam praktik akuntansi yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh teori-teori klasik (Godfrey *et al.*, 2010).

Di Indonesia, perkembangan regulasi seperti PSAK berbasis IFRS, penguatan akuntansi sektor publik, dan tren pelaporan berkelanjutan mendorong adanya pembaruan pendekatan dalam teori akuntansi. Dalam konteks ini, peran

akademisi dan peneliti menjadi penting dalam mengembangkan teori yang adaptif terhadap tantangan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2012), teori akuntansi harus mampu bersinergi dengan perkembangan praktik dan kebutuhan stakeholders, agar dapat menjaga relevansi serta kredibilitas informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, teori akuntansi juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri terhadap karakteristik entitas digital, seperti perusahaan berbasis platform, aset digital, dan transaksi lintas negara yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa teori tidak hanya menjelaskan praktik masa lalu, melainkan juga menjadi alat prediktif dan normatif bagi praktik masa depan (Deby *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, pembahasan terhadap tren dan isu kontemporer dalam teori akuntansi menjadi hal yang urgen dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemikiran teoritis baru yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual, sekaligus mengarahkan pengembangan standar akuntansi yang lebih inklusif dan futuristik.

B. Perkembangan Lingkungan Bisnis dan Implikasinya terhadap Teori Akuntansi

Perubahan lingkungan bisnis dewasa ini telah melahirkan tantangan-tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada praktik akuntansi, tetapi juga menggugah perlunya pembaruan dalam pendekatan teoritis akuntansi. Teori akuntansi, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan, kini harus mampu beradaptasi dengan dinamika global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

1. Globalisasi dan Integrasi Pasar

Globalisasi telah mempercepat mobilitas modal, barang, jasa, dan informasi lintas batas negara. Perusahaan tidak lagi hanya beroperasi secara lokal, tetapi juga secara internasional, melalui ekspansi pasar maupun kolaborasi global. Dalam konteks ini, informasi keuangan harus disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami dan dibandingkan oleh berbagai pihak dari latar belakang negara dan sistem hukum yang berbeda. Konvergensi standar akuntansi internasional melalui adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan ini (Scott, 2015).

Indonesia, melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), pula telah secara progresif mengadopsi IFRS agar laporan keuangan perusahaan nasional dapat diterima secara global. Meski demikian, proses ini tidak terlepas dari tantangan lokal, seperti perbedaan dalam sistem hukum, kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik entitas yang beroperasi dalam konteks sosial dan budaya yang khas (Mulyadi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa teori akuntansi perlu dikembangkan tidak hanya dalam kerangka universal, tetapi juga dengan mempertimbangkan pendekatan kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan lokal.

2. Ekonomi Digital dan Disrupsi Teknologi

Transformasi digital merupakan salah satu perkembangan lingkungan bisnis paling signifikan dalam dekade terakhir. Ekonomi digital telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang tidak selalu sesuai dengan kerangka teori akuntansi konvensional. Contohnya adalah perusahaan berbasis platform, yang meskipun memiliki valuasi sangat tinggi, seringkali tidak memiliki aset fisik yang signifikan. Begitu pula dengan data pelanggan, algoritma, dan hak kekayaan intelektual yang kini menjadi sumber daya utama dalam menciptakan nilai ekonomi.

Disrupsi teknologi juga terjadi dalam proses pelaporan keuangan. Dengan hadirnya teknologi seperti *Blockchain* dan *Artificial Intelligence*, proses pencatatan transaksi dan audit keuangan menjadi semakin otomatis, transparan, dan real-time. Teknologi ini membuka peluang untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih akurat dan efisien, namun sekaligus menantang prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti akrual dan keterandalan informasi (Yermack, 2017). Oleh karena itu, teori akuntansi ke depan harus mengakomodasi perkembangan teknologi ini, serta merumuskan kembali konsep-konsep dasar seperti pengakuan pendapatan, pengukuran nilai wajar, dan definisi aset tidak berwujud dalam kerangka digital.

3. Tuntutan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Selain aspek global dan teknologi, dunia usaha juga menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadi lebih akuntabel dan transparan. Isu-isu seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta praktik bisnis yang tidak etis telah mendorong masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban yang lebih luas dari perusahaan. Konsep akuntabilitas kini tidak lagi terbatas pada pelaporan kepada pemegang saham, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan sosial terhadap masyarakat luas (Gray, Adams and Owen, 2014).

Dalam konteks Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Beberapa perusahaan besar telah menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap transparansi non-keuangan. Namun, pengembangan teori akuntansi keberlanjutan masih memerlukan landasan ilmiah yang kuat agar dapat menjadi bagian integral dari sistem pelaporan keuangan yang diakui secara luas (Harahap, 2007).

Implikasi dari kondisi ini sangat jelas bahwa teori akuntansi masa kini tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan pendekatan positif atau normatif yang klasik. Diperlukan teori-teori baru yang inklusif dan interdisipliner, yang mampu memadukan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, para akademisi dan praktisi akuntansi dituntut untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan teori akuntansi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

C. Akuntansi Berkelanjutan dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*)

Dalam dekade terakhir, praktik bisnis menghadapi tuntutan yang semakin besar dari berbagai pemangku kepentingan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas usahanya. Perubahan ini mendorong lahirnya pendekatan baru dalam teori dan praktik akuntansi yang dikenal dengan akuntansi berkelanjutan (*sustainability accounting*) serta integrasi aspek ESG dalam sistem pelaporan.

1. Konsep Dasar dan Urgensi Akuntansi Berkelanjutan

Akuntansi berkelanjutan merupakan respons atas keterbatasan pendekatan akuntansi konvensional yang cenderung berorientasi pada aspek keuangan jangka pendek. Konsep ini memperluas ruang lingkup pelaporan dengan memasukkan dampak-dampak eksternal dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan tata kelola organisasi. Prinsip dasarnya adalah bahwa keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan hanya dapat dicapai apabila kinerja ekonomi diselaraskan dengan kepedulian terhadap ekologi dan sosial (Gray, Adams and Owen, 2014).

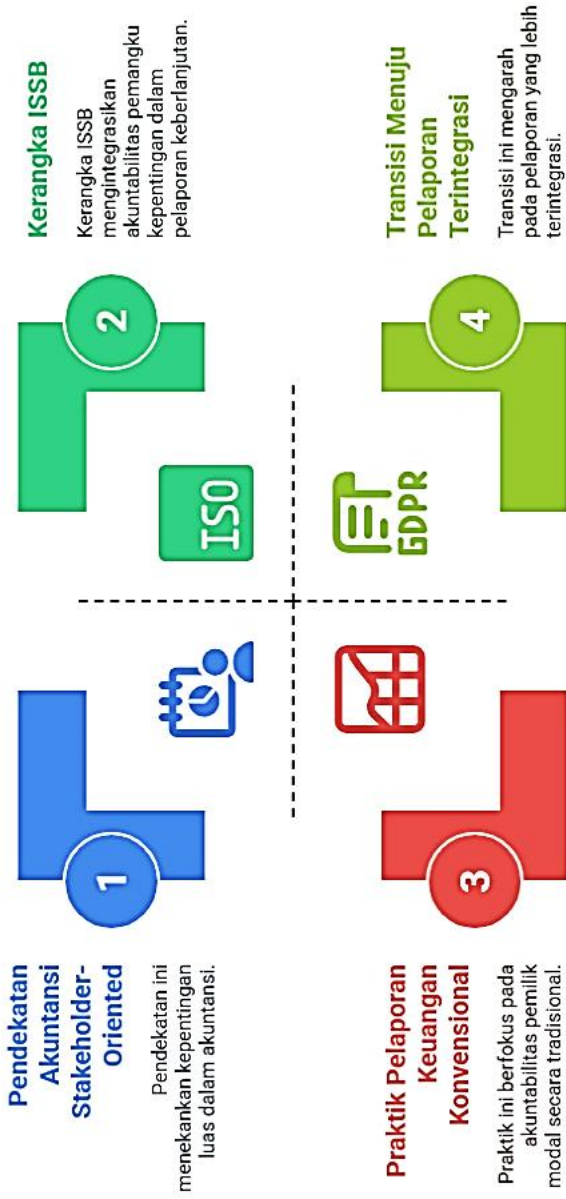
Di Indonesia, urgensi akuntansi berkelanjutan semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah melalui

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) telah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen regulator dalam mendorong pelaporan yang tidak hanya transparan tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis (OJK, 2017).

2. Integrasi ESG dalam Pelaporan Keuangan dan Teori Akuntansi

ESG adalah pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko dan peluang yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Integrasi ESG dalam pelaporan keuangan menuntut adanya perubahan fundamental dalam teori akuntansi, karena tidak semua informasi ESG dapat diukur secara kuantitatif atau direfleksikan secara langsung dalam laporan keuangan konvensional.

Integrasi ESG dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Gambar 14.1 Integrasi ESG dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah penulis (2025)

Dalam praktiknya, banyak perusahaan mulai menggunakan kerangka pelaporan seperti *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan yang terbaru adalah *International Sustainability Standards Board (ISSB)* yang dibentuk oleh *IFRS Foundation*. Tujuannya adalah untuk menyusun standar pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan, agar para investor dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja jangka panjang perusahaan (*IFRS Foundation, 2022*).

Di sisi teori, pengintegrasian ESG menantang pemikiran-pemikiran klasik akuntansi yang selama ini berorientasi pada kepentingan pemilik modal. ESG menuntut pendekatan akuntansi yang lebih stakeholder-oriented, yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, lingkungan hidup, serta praktik tata kelola yang etis (*Zarkasih, Ali and Rahmatika, 2024*). Hal ini memerlukan pengembangan teori akuntansi baru yang mampu menjembatani akuntabilitas multi-dimensi dan memperluas definisi nilai perusahaan.

3. Isu *Greenwashing* dan Tantangan dalam Verifikasi

Meskipun perkembangan akuntansi berkelanjutan dan pelaporan ESG sangat positif, muncul pula fenomena *greenwashing*, yaitu praktik manipulasi informasi agar perusahaan tampak peduli terhadap isu lingkungan atau sosial, padahal tidak sesuai kenyataan. *Greenwashing* menjadi tantangan serius dalam integritas pelaporan keberlanjutan karena dapat menyesatkan pemangku kepentingan dan merusak kepercayaan publik (*Delmas and Burbano, 2011*).

Tantangan lainnya terletak pada aspek verifikasi dan audit atas informasi ESG. Tidak seperti informasi keuangan yang telah memiliki standar dan prosedur audit yang mapan, informasi ESG masih menghadapi kendala dalam hal keterukuran, keterbandingan, dan ketepatan waktu pelaporan. Dibutuhkan standar audit keberlanjutan yang

dapat menjamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hakim and Fuad, 2024).

Proses verifikasi ESG masih berada pada tahap awal. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami bagaimana menyusun laporan ESG secara benar dan terstandarisasi (Aptasari, Aryawati and Falah, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi ESG, serta keterlibatan auditor independen dalam pelaporan keberlanjutan menjadi krusial untuk memastikan kualitas dan kredibilitas laporan ESG.

Dengan semua perkembangan ini, teori akuntansi perlu terus berkembang untuk dapat memberikan kerangka yang memadai bagi akuntansi berkelanjutan dan pelaporan ESG. Teori akuntansi tidak hanya harus responsif terhadap dinamika pasar dan teknologi, tetapi juga harus berkontribusi dalam mendorong praktik bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

D. Digitalisasi Akuntansi dan *Big Data*

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akuntansi. Perkembangan ini tidak hanya memengaruhi praktik akuntansi, tetapi juga mendorong penyesuaian dan pengembangan dalam tataran teoritis. Akuntansi di era digital tidak lagi dapat berpijak semata pada pendekatan konvensional. Sebaliknya, ia dituntut untuk merespons dinamika teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Blockchain*, dan *Big Data analytics* yang telah mengubah secara mendasar cara informasi akuntansi dihasilkan, diproses, dan digunakan.

1. Pengaruh Teknologi seperti AI, *Blockchain*, dan *Big Data Analytics* dalam Pengembangan Teori Akuntansi

Teknologi digital telah memungkinkan otomatisasi banyak proses akuntansi yang sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu. *Artificial Intelligence* (AI), misalnya,

telah digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan transaksi, mendeteksi anomali dalam laporan keuangan, hingga melakukan prediksi berbasis pola data historis. Kemampuan AI untuk belajar dari data besar (*Big Data*) memungkinkan akuntansi bergerak dari model reaktif menjadi proaktif dan prediktif (Warren, Moffitt and Byrnes, 2015).

Tabel 14.1 Pengaruh Teknologi Digital dalam Teori Akuntansi

Teknologi	Sebelum Digitalisasi	Setelah Digitalisasi
Kecerdasan Buatan (AI)	Pengolahan data dan laporan secara manual.	Otomatisasi proses akuntansi, pengolahan data lebih cepat dan efisien.
	Analisis keuangan terbatas pada teknik konvensional.	Analisis prediktif menggunakan machine learning untuk proyeksi keuangan.
	Pengambilan keputusan lebih lambat dan berdasarkan data terbatas.	Keputusan lebih cepat dan berbasis data yang lebih besar dan real-time.
<i>Blockchain</i>	Pencatatan transaksi dilakukan secara manual atau melalui sistem terpusat.	Transparansi yang lebih tinggi, setiap transaksi tercatat dalam buku besar terdistribusi.
	Kerentanannya terhadap kesalahan manusia dan penipuan lebih besar.	Keamanan lebih tinggi dengan sistem enkripsi yang sulit dimanipulasi.

Teknologi	Sebelum Digitalisasi	Setelah Digitalisasi
	Pengawasan dan verifikasi transaksi memerlukan waktu dan tenaga besar.	Transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diaudit lebih cepat dan transparan.
<i>Big Data</i>	Data terbatas pada sumber internal dan pengolahan konvensional.	Pengolahan dan analisis data dalam volume besar (<i>Big Data</i>) dari berbagai sumber.
	Analisis dilakukan dengan menggunakan sampel data kecil dan terbatas.	Analisis data real-time, mendalam, dan berbasis data besar untuk keputusan yang lebih akurat.
	Pengambilan keputusan berdasarkan informasi terbatas dan konvensional.	Kemampuan untuk meramalkan tren pasar, mengidentifikasi pola keuangan, dan membuat keputusan strategis.

Sumber: (Zhang *et al.*, 2020); dan (Borhani *et al.*, 2021).

Sementara itu, teknologi *Blockchain* menawarkan potensi revolusioner dalam aspek transparansi, keandalan, dan keamanan data keuangan. Dengan sistem pencatatan yang terdistribusi dan tidak dapat diubah, *Blockchain* dapat mengurangi kebutuhan akan proses audit tradisional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap akuntansi (Dai and Vasarhelyi, 2017). Teknologi ini bahkan memunculkan konsep baru dalam akuntansi yang disebut dengan *triple-entry accounting*, yang menambahkan lapisan verifikasi independen dalam setiap transaksi.

Big Data analytics, di sisi lain, memungkinkan akuntan dan pengambil keputusan untuk menggali informasi dari volume data yang besar dan kompleks. Ini tidak hanya memperluas ruang lingkup analisis akuntansi, tetapi juga

mendorong lahirnya pendekatan baru dalam teori akuntansi yang lebih berbasis data dan konteks (Ibrahim, Elamer and Ezat, 2021).

2. Perubahan Asumsi Dasar dan Pendekatan Teoritis dalam Era Digital

Kemajuan teknologi tersebut secara tidak langsung menantang asumsi dasar teori akuntansi klasik. Misalnya, prinsip *historical cost* dan *periodicity* kini dinilai kurang relevan ketika informasi keuangan dapat diperoleh dan diproses secara real-time. Demikian pula, asumsi *economic entity* dan *going concern* menghadapi tekanan baru ketika bisnis semakin terdigitalisasi dan batas antara entitas fisik dan digital menjadi kabur.

Teori akuntansi masa depan perlu menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Beberapa akademisi mulai menggagas pendekatan teori akuntansi yang lebih adaptif terhadap data, algoritma, dan interkoneksi digital (Appelbaum *et al.*, 2017). Konsep-konsep seperti *continuous auditing* dan *predictive reporting* mulai muncul sebagai bagian dari kerangka berpikir baru yang harus diakomodasi dalam pengembangan teori akuntansi kontemporer.

3. Konsep Real-Time Accounting dan Tantangannya

Real-time accounting merujuk pada kemampuan sistem akuntansi untuk mencatat, memproses, dan menyajikan informasi keuangan secara langsung pada saat transaksi terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan berkat teknologi digital yang terintegrasi, seperti ERP (*Enterprise Resource Planning*) berbasis *cloud* dan IoT (*Internet of Things*) dalam sistem pelaporan. *Real-time accounting* menawarkan berbagai keuntungan, seperti peningkatan akurasi, efisiensi pelaporan, dan kemampuan respon cepat terhadap perubahan kondisi bisnis.

Namun, penerapan *real-time accounting* juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kebutuhan akan sistem informasi yang sangat andal, ketersediaan data yang valid secara terus-menerus, serta

kapasitas sumber daya manusia yang memahami teknologi tersebut. Selain itu, aspek regulasi dan etika juga menjadi perhatian penting, terutama dalam hal keamanan data dan kerahasiaan informasi (Marota, 2021).

Adopsi teknologi digital dalam praktik akuntansi mulai meningkat, terutama di sektor perbankan dan startup teknologi. Namun, sebagian besar UMKM dan entitas pemerintah daerah masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi akuntansi. Oleh karena itu, teori akuntansi di Indonesia juga harus memperhitungkan realitas digitalisasi yang belum merata ini, agar tetap relevan dan aplikatif secara lokal.

E. Perkembangan Standar Akuntansi Global

Dalam era globalisasi ekonomi dan integrasi pasar modal internasional, kebutuhan akan keseragaman standar pelaporan keuangan menjadi semakin mendesak. Perusahaan multinasional, investor lintas negara, dan institusi keuangan internasional membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipahami dan dibandingkan secara global. Oleh karena itu, perkembangan standar akuntansi global –khususnya konvergensi terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS) –menjadi isu strategis dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi.

1. Konvergensi IFRS dan Dinamika Internasional

International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) telah menjadi rujukan utama dalam harmonisasi pelaporan keuangan global. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi atau melakukan konvergensi terhadap IFRS sebagai bagian dari reformasi akuntansi dan integrasi keuangan internasional (Christiaens *et al.*, 2015).

Konvergensi ini bukan hanya sekadar perubahan teknis, tetapi juga melibatkan dimensi filosofis dan konseptual dalam teori akuntansi. IFRS lebih

mengedepankan prinsip (*principle-based standards*) dibandingkan aturan ketat (*rule-based standards*) seperti yang diterapkan dalam US GAAP. Hal ini menuntut akuntan untuk menggunakan pertimbangan profesional yang lebih luas dalam pengambilan keputusan pelaporan, sehingga berdampak pada pemikiran teoritis mengenai substansi ekonomi, relevansi, dan keterandalan informasi akuntansi.

Proses konvergensi terhadap IFRS dilakukan secara bertahap melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) sejak tahun 2012, dengan penyesuaian lokal yang tetap memperhatikan kebutuhan nasional. Meskipun demikian, implementasi penuh IFRS masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan entitas pelaporan dan pemahaman pengguna laporan keuangan.

2. Isu Harmonisasi dan Keberagaman Konteks Ekonomi Negara

Meskipun konvergensi menuju IFRS telah meluas, isu harmonisasi standar tetap menjadi perhatian. Tidak semua negara memiliki struktur ekonomi, sistem hukum, budaya bisnis, dan kualitas institusi yang sama. Konteks lokal sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi dan penerapan IFRS, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai "divergensi dalam konvergensi" (Nobes, 2006).

Sebagai contoh, negara-negara berkembang mungkin memiliki keterbatasan dalam infrastruktur akuntansi dan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan adaptasi terhadap standar internasional agar sesuai dengan kapasitas nasional. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa standar global seperti IFRS lebih merepresentasikan kepentingan negara maju dan pasar modal besar, yang bisa jadi tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal di negara-negara berkembang (Zehri & Abdelbaki, 2013).

Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi kontemporer harus mempertimbangkan keberagaman konteks penerapan, serta bagaimana standar global bisa

diterjemahkan ke dalam praktik lokal tanpa kehilangan substansi dasarnya.

3. Respons terhadap Fenomena Krisis Global

Perkembangan standar akuntansi juga tidak lepas dari respons terhadap berbagai fenomena krisis global yang berdampak besar terhadap sistem keuangan dan perekonomian dunia. Pandemi COVID-19, misalnya, memunculkan tantangan besar dalam pengakuan pendapatan, penurunan nilai aset, serta ketidakpastian dalam estimasi keuangan. IASB (2020) merespons kondisi ini dengan mengeluarkan panduan interpretatif, termasuk kelonggaran dalam penyajian laporan keuangan terkait sewa (IFRS 16), utang piutang, dan penurunan nilai.

Krisis keuangan global 2008 juga menjadi titik penting dalam evaluasi dan pembaruan standar, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar dan pengakuan kerugian kredit. IFRS 9, yang menggantikan IAS 39, memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) sebagai respons terhadap kritik terhadap keterlambatan pengakuan kerugian dalam sistem perbankan saat itu (IFRS Foundation, 2022). Situasi krisis ini menunjukkan bahwa standar akuntansi global tidak dapat bersifat statis. Sebaliknya, ia harus responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial global, dan teori akuntansi perlu menyediakan landasan untuk penyesuaian konseptual yang adaptif dan relevan.

F. Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Teori Akuntansi

Etika dan tanggung jawab sosial merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam perkembangan teori akuntansi, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan pesat dalam teknologi. Di tengah praktik akuntansi yang semakin kompleks, isu-isu etika menjadi tantangan utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Oleh karena itu, dalam pengembangan

teori akuntansi, peran etika dan tanggung jawab sosial harus diperhatikan secara serius, baik oleh akademisi maupun praktisi.

1. Isu Etika dalam Konstruksi Teori dan Praktik Akuntansi

Teori akuntansi, sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi, tidak hanya berfokus pada konsep teknis dan metodologis, tetapi juga pada aspek etis. Isu etika muncul ketika teori-teori yang dikembangkan berpotensi mendukung praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Sebagai contoh, penggunaan teknik akuntansi yang memungkinkan manipulasi laporan keuangan, seperti pengakuan pendapatan yang dipercepat atau pengelolaan laba, dapat berlawanan dengan prinsip etika dalam akuntansi (Schroeder, Clark and Cathey, 2022).

Menurut etika profesional akuntansi, integritas, objektivitas, dan transparansi adalah nilai-nilai dasar yang harus dijaga dalam setiap tahap penyusunan laporan keuangan (Grubnic, 2014). Oleh karena itu, teori akuntansi yang dikembangkan tidak hanya harus mencerminkan realitas ekonomi yang akurat, tetapi juga harus mencakup dimensi moral yang mendalam agar dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya.

2. Tantangan Terhadap Independensi dan Objektivitas Teori

Independensi dan objektivitas adalah dua aspek fundamental dalam profesi akuntansi. Namun, dalam konteks teori akuntansi, sering kali terjadi tantangan besar terkait dengan kedua aspek ini. Misalnya, pengaruh kuat dari kelompok bisnis tertentu atau kepentingan politik dapat mengarah pada penyusunan teori atau standar akuntansi yang tidak sepenuhnya objektif (Schroeder, Clark and Cathey, 2022). Ketika teori akuntansi dikembangkan dengan mempertimbangkan tekanan eksternal semacam ini, ia bisa kehilangan kredibilitas dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Di sisi lain, independensi teori akuntansi juga dapat terganggu oleh keinginan untuk menghasilkan teori yang dapat dengan mudah diterima atau diadopsi oleh para pemangku kepentingan, seperti regulator atau perusahaan besar. Hal ini memunculkan dilema etis yang serius, terutama dalam konteks standar akuntansi internasional, di mana terdapat ketegangan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang dalam hal penerapan standar yang adil dan seimbang (Zehri & Abdelbaki, 2013).

3. Peran Profesional Akuntan sebagai Agen Perubahan

Menurut Grubnic (2014), akuntan, sebagai profesi yang berperan penting dalam penyusunan dan pelaporan keuangan, memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk menjaga etika profesinya dan menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Dalam mengembangkan teori akuntansi, akuntan tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik terbaik, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika dan sosial dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil.

Sebagai agen perubahan, akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi organisasi mengenai pentingnya akuntabilitas sosial dan keberlanjutan. Ini termasuk memberikan panduan terkait penerapan akuntansi berkelanjutan dan prinsip-prinsip ESG, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, tidak hanya kepada pemegang saham.

4. Arah Pengembangan Teori Akuntansi ke Depan

Pengembangan teori akuntansi ke depan diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang timbul akibat perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan tuntutan terhadap akuntabilitas yang lebih besar. Dalam era di mana informasi dan data semakin melimpah, teori akuntansi perlu mengadaptasi dan merespons dinamika ini dengan lebih fleksibel dan responsif. Pengembangan teori

yang lebih terintegrasi dengan konsep keberlanjutan, etika sosial, dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat akan menjadi kunci dalam menjaga relevansi teori akuntansi di masa depan.

Selain itu, teori akuntansi juga perlu memperhatikan peran teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan semakin berkembangnya teknologi seperti *Blockchain*, penggunaan data besar (*Big Data*), dan kecerdasan buatan (AI), teori akuntansi harus dapat mengakomodasi perubahan dalam proses pelaporan keuangan yang memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus menjaga prinsip etika yang mendasarinya (Zehri and Abdelbaki, 2013).

5. Peran Akademisi dan Praktisi dalam Pembentukan Teori Baru

Akademisi dan praktisi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan teori akuntansi yang relevan dan aplikatif. Akademisi berperan dalam menyusun dan menguji teori-teori baru yang dapat mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang. Sementara itu, praktisi, yang berinteraksi langsung dengan dunia bisnis, memberikan wawasan praktis yang dapat memperkaya dan menyempurnakan teori yang ada (Lee, 2020).

Kerjasama antara keduanya sangat penting untuk menciptakan teori akuntansi yang tidak hanya teoritis tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif dalam praktik. Melalui kolaborasi ini, dapat ditemukan keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan sosial yang menjadi landasan dalam pengembangan teori akuntansi.

G. Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai tren dan isu terkini dalam teori akuntansi, telah dibahas berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan teori akuntansi, termasuk globalisasi, teknologi digital, serta tuntutan terhadap

transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan lingkungan bisnis, yang didorong oleh globalisasi dan ekonomi digital, telah menciptakan tantangan baru bagi teori akuntansi, di mana konsep-konsep seperti akuntansi berkelanjutan dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) semakin penting. Teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data juga telah merevolusi praktik akuntansi, mengarah pada perubahan dalam cara data diproses, dianalisis, dan disajikan dalam laporan keuangan.

Di sisi lain, perkembangan standar akuntansi global, terutama melalui konvergensi IFRS, menunjukkan upaya harmonisasi sistem pelaporan keuangan antarnegara. Namun, perbedaan konteks ekonomi antarnegara tetap menjadi tantangan dalam implementasi standar yang seragam. Isu etika juga tidak kalah penting dalam mengembangkan teori akuntansi, dengan tekanan untuk menjaga independensi, objektivitas, serta tanggung jawab sosial dalam praktiknya. Secara keseluruhan, perubahan cepat dalam teknologi dan tuntutan sosial membawa dampak besar terhadap pengembangan teori akuntansi, menuntut peran aktif akademisi dan praktisi untuk terus berinovasi dan menjaga relevansi teori akuntansi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appelbaum, D. *et al.* (2017) 'Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting', *International journal of accounting information systems*, 25, pp. 29–44. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.03.003>.
- Aptasari, F.W., Aryawati, N.P.A. and Falah, M.H. (2024) 'Identifikasi Greenwashing atau Greenwashing pada Perusahaan Retail di Indonesia: Evaluasi Laporan Keberlanjutan', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), pp. 301–322. Available at: <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.397>.
- Borhani, S.A. *et al.* (2021) 'Adopting blockchain technology to improve financial reporting by using the technology acceptance model (TAM)', *International Journal Of Finance & Managerial Accounting*, 6(22), pp. 155–171.
- Christiaens, J. *et al.* (2015) 'The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: An international comparison', *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), pp. 158–177.
- Dai, J. and Vasarhelyi, M.A. (2017) 'Toward blockchain-based accounting and assurance', *Journal of information systems*, 31(3), pp. 5–21.
- Deby, D. *et al.* (2025) 'Perkembangan Teori Akuntansi: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital', *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), pp. 716–727. Available at: <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1627>.
- Delmas, M.A. and Burbano, V.C. (2011) 'The drivers of greenwashing', *California management review*, 54(1), pp. 64–87. Available at: [https://doi.org/Delmas, M. A. & Burbano, V. C. \(2011\). "The Drivers of Greenwashing." California Management Review, 54\(1\), pp. 64–87. https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64](https://doi.org/Delmas, M. A. & Burbano, V. C. (2011). \).
- Godfrey, J. *et al.* (2010) *Accounting*. John Wiley & Sons, Inc.

- Gray, R., Adams, C.A. and Owen, D. (2014) 'Accounting, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Planet.'
- Grubnic, S. (2014) 'Accountability, social responsibility and sustainability: Accounting for society and the environment'. Taylor & Francis. Available at: <https://doi.org/10.1080/0969160X.2014.967961>.
- Hakim, M.T. and Fuad, F. (2024) 'Impact Of Esg Regulations On Sustainable Business Practices: Evidence From Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 21(2), pp. 247–253. Available at: <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.247-253>.
- Harahap, S.S. (2007) 'Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta: PT', *Raja Grafindo Persada* [Preprint].
- IASB (2020) *IFRS and COVID-19: Accounting for Rent Concessions*. London.
- Ibrahim, A.E.A., Elamer, A.A. and Ezat, A.N. (2021) 'The convergence of big data and accounting: innovative research opportunities', *Technological Forecasting and Social Change*, 173, p. 121171. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121171>.
- IFRS Foundation (2022) *International Sustainability Standards Board (ISSB) Framework*. Available at: <https://www.ifrs.org/issb> (Accessed: 5 April 2025).
- Lee, T.A. (2020) 'Financial accounting theory', in *The Routledge companion to accounting history*. Routledge, pp. 159–184.
- Marota, R. (2021) 'Digital Transformation of Accounting in the Industrial Revolution Era 4.0', *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), pp. 378–390. Available at: <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.660>.
- Mulyadi (2012) *Akuntansi Biaya. Edisi Ke 5. Cetakan Kesebelas*. Yogyakarta: STIM YKPN.

- Nobes, C. (2006) 'The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda', *Accounting and business research*, 36(3), pp. 233-245. Available at: <https://doi.org/10.1080/00014788.2006.9730023>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Schroeder, R.G., Clark, M.W. and Cathey, J.M. (2022) *Financial accounting theory and analysis: text and cases*. John Wiley & Sons.
- Scott, W.R. (2015) *Financial Accounting Theory*. Pearson. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=4oZxngEACAAJ>.
- Warren, J.D., Moffitt, K.C. and Byrnes, P. (2015) 'How big data will change accounting', *Accounting horizons*, 29(2), pp. 397-407. Available at: <https://doi.org/10.2308/acch-51069>.
- Yermack, D. (2017) 'Corporate governance and blockchains', *Review of finance*, 21(1), pp. 7-31. Available at: <https://doi.org/10.1093/rof/rfw074>.
- Zarkasih, A., Ali, M.K. and Rahmatika, D.N. (2024) 'Systematic Literature Review: Tren Penelitian Penerapan Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi', *Business and Investment Review*, 2(3), pp. 57-71. Available at: <https://doi.org/10.61292/birev.125>.
- Zehri, C. and Abdelbaki, A. (2013) 'Does adoption of international accounting standards promote economic growth in developing countries', *International Open Journal of Economics*, 1(1), pp. 1-13.
- Zhang, Y. et al. (2020) 'The impact of artificial intelligence and blockchain on the accounting profession', *Ieee Access*, 8, pp. 110461-110477. Available at: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3000505>.

TENTANG PENULIS



Nurul Izzah Lubis, S.E., M.Ak.
Universitas Potensi Utama

Penulis adalah dosen di Universitas Potensi Utama Medan. Awal pendidikan tinggi penulis dimulai sejak berhasil menyelesaikan studi S1 dan S2 di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sedang menyelesaikan studi program doctoral di Program Studi Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Metodologi Penelitian guna menunjang karir sebagai dosen, penulis, dan peneliti. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh penulis dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Selain sebagai peneliti, penulis juga telah menulis beberapa buku yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama dibidang Akuntansi.